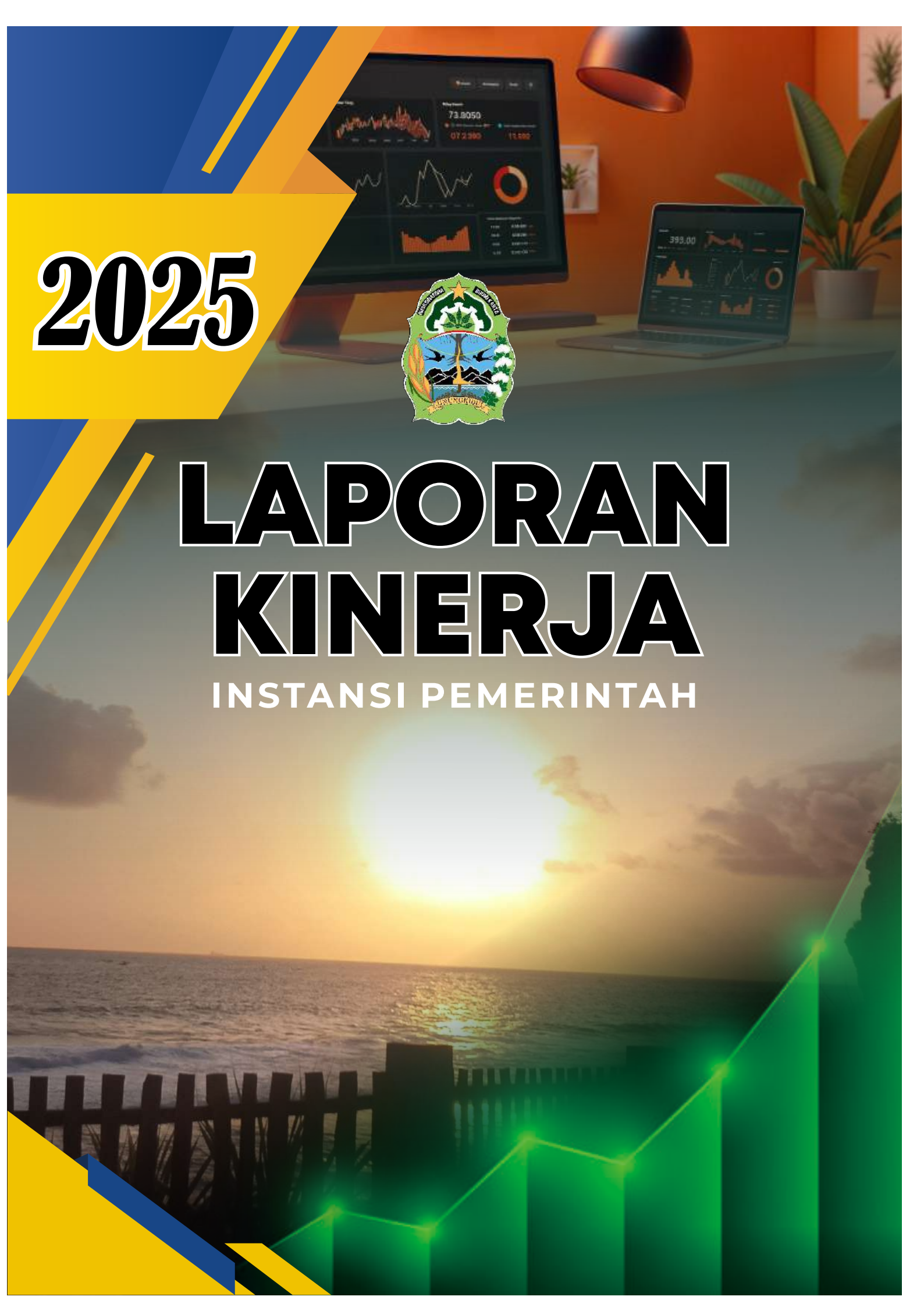


2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 9 Februari 2026
KEPALA,



RISMIYADI, SP, M.Si
NIP. 19741012 199903 1 008



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat”:
 - Diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu (1) Produksi komoditas Tanaman Pangan (Angka kumulatif produksi laporan statistik tanaman pangan pada tahun ke n. Komoditas tanaman pangan yang mendukung produksi meliputi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu dan (2) Produksi perkebunan dan hortikultura (Angka kumulatif produksi laporan statistik perkebunan dan hortikultura pada tahun ke n. Komoditas tanaman perkebunan yang mendukung produksi meliputi kakao, mete, tembakau, kelapa dan komoditas tanaman hortikultura meliputi cabe, bawang merah, pisang, alpukat dan durian
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 untuk produksi tanaman pangan sebesar 1.612.849,29 ton; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 1.662.666,05 ton. Dengan demikian capaian ini belum melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 103,09%.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 untuk produksi perkebunan dan hortikultura sebesar 37.400,00 ton; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 36.865,61 ton. Dengan demikian capaian ini telah



melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 107,90%.

- Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 1.221.580,67 ton dan capaian target 2025 sebesar 1.699.531,66 ton terjadi peningkatan sebesar 477.950,99 ton.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Ketahanan Pangan Meningkat.”:

- Diukur dengan indikator Capaian Skor PPH Konsumsi (Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (%AKG x bobot masing-masing kelompok pangan)).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program yakni Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Pengawasan Keamanan Pangan; Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 90,10 (indeks); sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 98,40 (indeks). Dengan demikian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 109,21%
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 91,4 (indeks) terjadi kenaikan sebesar 7,00 (indeks).

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD”:

- Diukur dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD adalah berdasarkan LHE AKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Nilai AKIP yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja tahun 2025 adalah realisasi Nilai AKIP PD t-1 atau Nilai AKIP PD tahun 2024, yaitu sebesar 81,54. Dengan target Nilai AKIP PD tahun 2025 sebesar 80,40 maka capaian kinerjanya sebesar 101,44%.



-

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Diversifikasi konsumsi belum maksimal, menyebabkan kebutuhan bahan pangan pokok menjadi makin tinggi.
2. Pasar bebas yang sudah mulai terasa pengaruhnya terhadap produk pertanian, sehingga perlu penguasaan informasi pasar dengan teknologi.
3. Pengembangan sumber energi yang terbarukan banyak memanfaatkan produk-produk pertanian, seperti jagung dan ketela pohon. Di masa datang akan terjadi kompetisi penggunaan produk pertanian yaitu sebagai bahan pangan manusia, bahan industri pakan ternak dan bahan baku industri bio energi. Beban penyediaan produk pertanian akan semakin berat seiring besarnya tuntutan kebutuhan akan produksi di tiga sektor tersebut;
4. Peredaran pupuk palsu, penambahan zat pemutih pada beras, dan masih banyak lagi pemalsuan lainnya.
5. Belum maksimalnya promosi produk pertanian.
6. Pewilayahan (zoning) komoditas unggulan, andalan, dan potensial yang telah terformulasi melalui proses identifikasi yang panjang tidak diikuti rekomendasi yang tegas (imperatif) bagi implementasinya pada tingkat petani.
7. Perilaku pasar penumpukan produksi jauh melebihi daya serap pasar pada saat panen. Penetapan quota belum menjadi sesuatu yang dipandang urgen dalam menjaga posisi petani pada situasi tarik ulur antara permintaan (demand) dengan penawaran (supply).
8. Petani seringkali dalam posisi tawar yang lemah dan harus berhadapan dengan industri pangan skala besar yang lebih bersifat padat modal dan padat teknologi.
9. Air merupakan faktor utama dalam budidaya pertanian. Seperti halnya penggunaan lahan, dengan semakin pesatnya pembangunan berbagai sektor sumberdaya air bagi pertanian juga semakin terbatas.



10. Selama ini petani sering menjual produknya dalam bentuk primer tanpa memberikan sentuhan teknologi untuk menjadi bahan setengah jadi. Akibatnya nilai tambah produk pertanian tanaman pangan dinikmati oleh pelaku yang lain, dalam hal ini bukan petani.
11. Terjadinya penurunan produktivitas lahan karena penggunaan pupuk kimia, khususnya urea dalam jangka waktu yang panjang dan dalam dosis yang berlebihan.
12. Akibat dari pemanasan global dimungkinkan terjadi anomali iklim dan perubahan kualitas lingkungan yang sulit diprediksi. Hal ini harus disosialisasikan dan diupayakan meminimalkan kemungkinan kerugian yang akan timbul dari perubahan alam tersebut.
13. Perubahan pola kehidupan masyarakat, pada peningkatan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk yang sehat, aman, dan menunjang kebugaran.
14. Menurunnya sumber daya manusia di sektor pertanian dikarenakan generasi muda lebih memilih bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sehingga perlu upaya terobosan di sektor agribisnis untuk menambah minat generasi muda bergerak di sektor pertanian.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah... 2	
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi..... 4	
D. Tugas dan Fungsi..... 7	
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	9
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran..... 14	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Strategi dan Arah Kebijakan	20
B. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	21
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 26	
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	31
B. Capaian Kinerja Lainnya Tahun 2025..... 108	
C. Efisiensi Anggaran	114
D. Inovasi	117
BAB IV PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan..... 118	
B. Langkah Perbaikan Kinerja	119
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	14
Tabel 1. 2 Sarana-Prasarana	15
Tabel 1. 3 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025	17
 Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2021-2026	19
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2024-2026	20
Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan	20
Tabel 2. 4 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	21
Tabel 2. 5 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	24
Tabel 2. 6 Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	26
Tabel 2. 7 Anggaran Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	26
Tabel 2. 8 Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	27
 Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 3. 3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	34
Tabel 3. 4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	36
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025	39
Tabel 3. 6 Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	73
Tabel 3. 7 Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor ke Pengecer Resmi (F5)	74
Tabel 3. 8 Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios ke Petani (F6)	75
Tabel 3. 9 Daftar Distributor dan Pengecer	76
Tabel 3. 10 Data Sarana Pertanian 2025	78
Tabel 3. 11 Data Prasarana Pertanian 2025	79
Tabel 3. 12 Sumber Daya Pertanian 2025	84
Tabel 3. 13 Kegiatan dan Aktivitas DAK Non Fisik 2025	85
Tabel 3. 14 Ringkasan Capaian Indikator Ketahanan Pangan Tahun 2025	91
Tabel 3. 15 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	92
Tabel 3. 16 Tingkat Kecukupan Gizi Konsumsi Pangan Penduduk Gunungkidul Tahun 2025	93
Tabel 3. 17 Ringkasan Capaian Indikator Akuntabilitas Kinerja PD Tahun 2025	104



Tabel 3. 18 Hasil Evaluasi AKIP Internal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.....	104
Tabel 3. 19 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	105
Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	114
Tabel 3. 21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	3
Gambar 1. 3 Peta Proses Bisnis Manajemen, Proses Utama Dan Proses Lainnya Dinas Pertanian Dan Pangan	5
Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan	7
Gambar 2. 1 Tampilan Beranda E-SAKIP	29
Gambar 2. 2 Tampilan Beranda Aplikasi SIPANDA	29
Gambar 2. 3 Tampilan Beranda SPIP Terintegrasi	30
Gambar 3. 1 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Sawah Tahun 2021-2025	41
Gambar 3. 2 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Ladang Tahun 2021-2025	43
Gambar 3. 3 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Total Padi Tahun 2021- 2025	45
Gambar 3. 4 Panen dan ubinan padi kegiatan DAK NF di KT Sumber Mulyo, Klepu, Rejosari, Semin pada Selasa, 10 Juni 2025	46
Gambar 3. 5 Panen Padi Lahan KT. Ngudi Subur, Bulu (Kalurahan Hargomulyo) pada Rabu, 4 Juni 2025	46
Gambar 3. 6 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Jagung Tahun 2021- 2025	47
Gambar 3. 7 Panen Raya Jagung MH II di Gapoktan Maju Makmur, Bendung, Semin	49
Gambar 3. 8 Panen Bantuan Pemerintah Jagung di Girijati, Purwosari	49
Gambar 3. 9 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Kedelai Tahun 2021- 2025	50
Gambar 3. 10 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2021-2025	52
Gambar 3. 11 Ubinan Ubi Kayu di Padukuhan Pudak, Tepus	53
Gambar 3. 12 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2021-2025	55
Gambar 3. 13 Ubinan Bawang Merah Demplot DAK NF KT Gatakrejo, Gatak, Karangmojo	57
Gambar 3. 14 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Cabai Tahun 2021- 2025	58
Gambar 3. 15 Panen Cabai Demplot DAK NF KT Dadi Subur, Ngeposari, Semanu	59
Gambar 3. 16 Grafik Jumlah Tanaman Akhir dan Produksi Durian Tahun 2024- 2025	61
Gambar 3. 17 Grafik Jumlah Tanaman Akhir dan Produksi Alpukat Tahun 2024- 2025	63



Gambar 3. 18 Grafik Jumlah Tanaman Akhir dan Produksi Pisang Tahun 2024-2025	64
Gambar 3. 19 Grafik Luas Areal dan Produksi Tembakau Tahun 2021-2025 ...	66
Gambar 3. 20 Grafik Luas Areal dan Produksi Kakao Tahun 2021-2025	68
Gambar 3. 21 Grafik Luas Areal dan Produksi Kelapa Tahun 2021-2025	70
Gambar 3. 22 Grafik Luas Areal dan Produksi Jambu Mete Tahun 2021-2025	71
Gambar 3. 23 Monev Pupuk Bersubsidi KPL Mitra Kerja	77
Gambar 3. 24 Monev Pupuk Bersubsidi KPL Daniar	77
Gambar 3. 25 Penyerahan Cultivator DBHCHT bersama Bupati Gunungkidul.	79
Gambar 3. 26 Pembangunan Sumur DBHCHT 2025	80
Gambar 3. 27 Rangkaian Aktivitas dalam Kegiatan DAK NF 2025	87
Gambar 3. 28 Kegiatan Kawasan Pekarangan Pangan Lestari (KRPL) 2025 ..	95
Gambar 3. 29 Contoh Dokumen NIB dan Registrasi PSAT	98
Gambar 3. 30 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	101
Gambar 3. 31 Dokumentasi Pelibatan Perempuan dalam Kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 ..	111



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya



dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

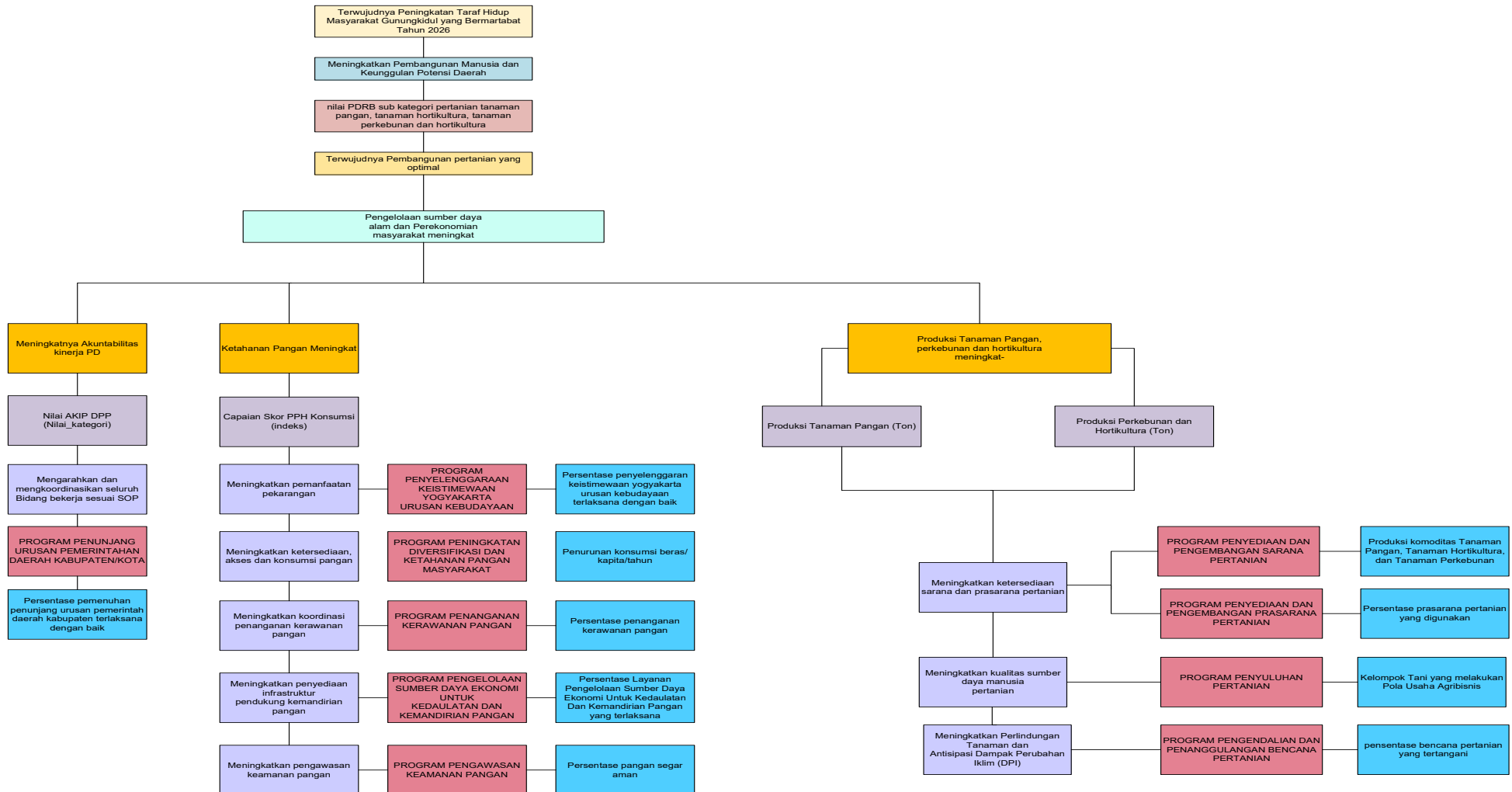
LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut.

LAPORAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

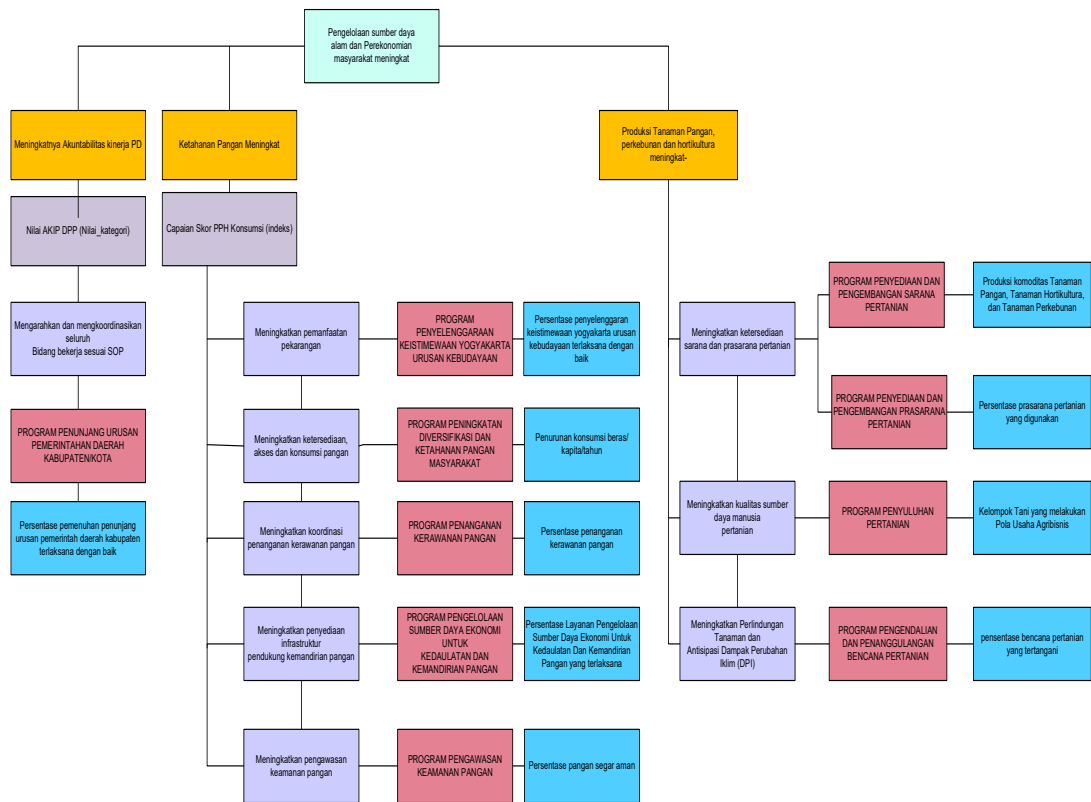


Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan

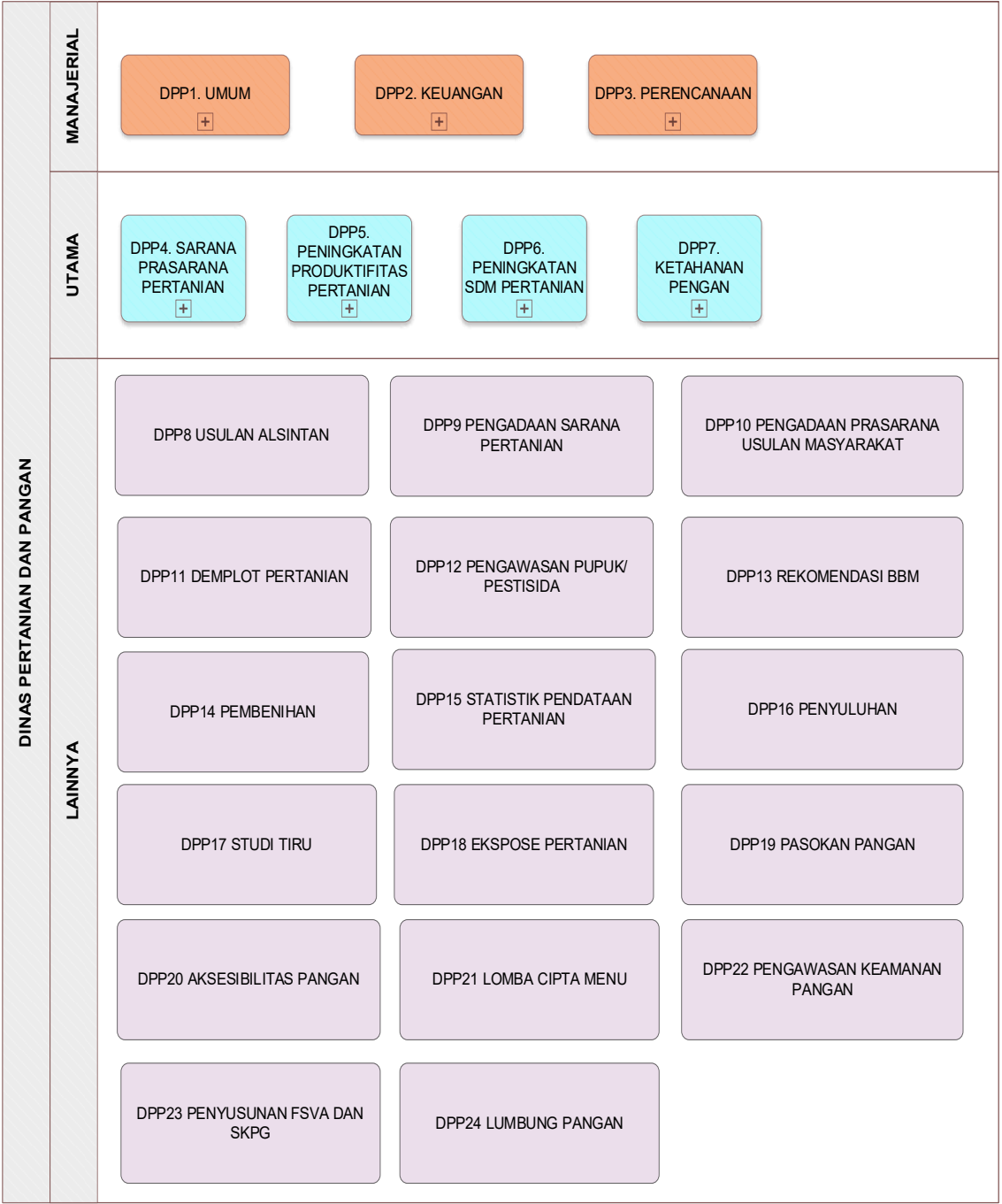


C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

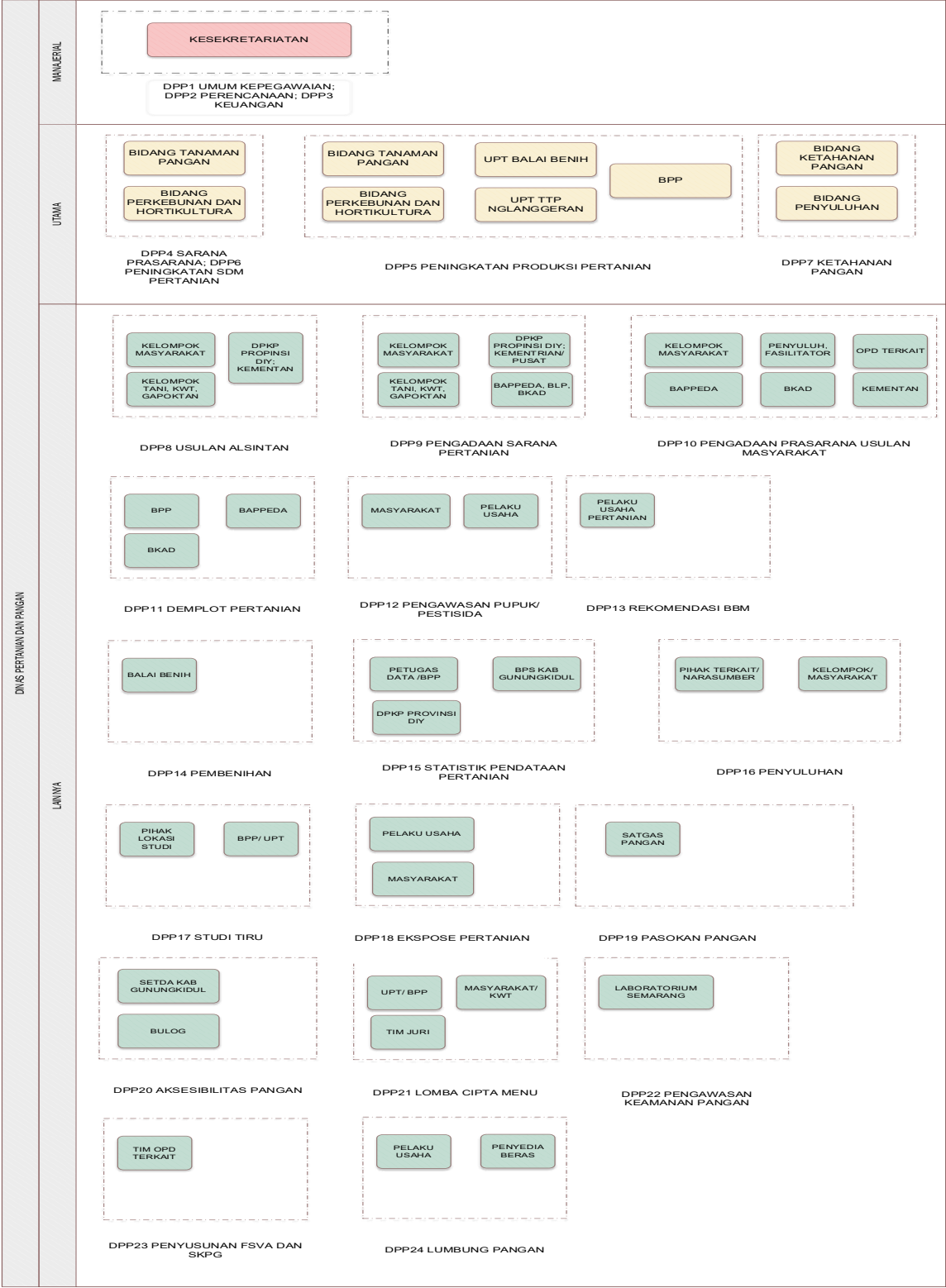
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



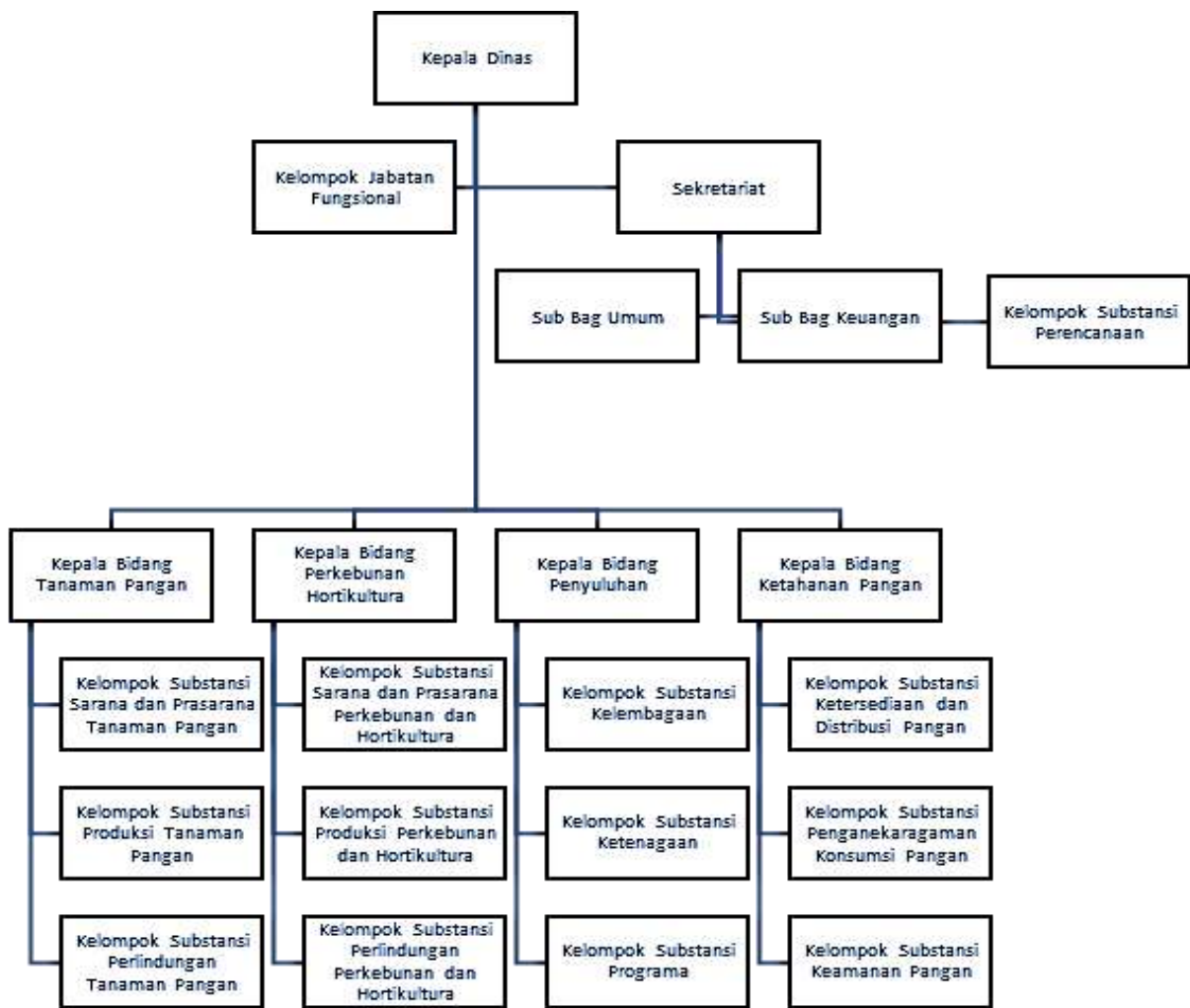
Gambar 1. 2 Mandat Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan



Gambar 1. 3 Peta Proses Bisnis Manajemen, Proses Utama Dan Proses Lainnya Dinas Pertanian Dan Pangan



Gambar 1. 4 Peta Relasi Dinas Pertanian dan Pangan



Gambar 1. 5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan

D. Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Dinas Pertanian dan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas.



1. Tugas Pokok

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, selain sub bidang peternakan dan sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan urusan pemerintahan bidang pangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pertanian dan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pertanian dan pangan;
- d. pembinaan di bidang pertanian dan pangan;
- e. pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. pembinaan dan fasilitasi pascapanen, pengolahan, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- g. pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- h. pemberian rekomendasi teknis usaha di bidang pertanian dan pangan;
- i. penataan prasarana pertanian;
- j. pelaksanaan perlindungan tanaman;
- k. pembinaan perbibitan dan perbenihan pertanian;
- l. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman;
- m. pengelolaan sarana dan prasarana pertanian dan pangan;
- n. pengawasan standar mutu alat, mesin, pupuk, pestisida pertanian;
- o. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- p. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketahanan pangan;
- q. pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
- r. pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian dan pangan;
- s. pengelolaan sistem informasi penyuluhan pertanian dan pangan;



- t. pengembangan kerja sama dan kemitraan penyuluhan pertanian dan pangan;
- u. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- v. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pertanian dan pangan;
- w. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan;
- x. pengelolaan UPT; dan
- y. pengelolaan kesekretariatan Dinas.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya. Permasalahan pembangunan di Dinas Pertanian dan Pangan dengan 2 kewenangan yang dimiliki, meliputi urusan ketahanan pangan dan urusan pertanian.

Ketahanan Pangan

1. Belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan.
2. Ketersediaan pangan sudah mencukupi secara agregat, namun masih kurang beragam dan mayoritas tersedia hanya saat musim panen.
Ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan energi mencapai 2.248,65 kkal/kap/hari dari standart sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 64,74 gram/kap/hari dari standart sebesar 63 gram/kap/hari.
3. Keterjangkauan pangan dan belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di tingkat daerah.



Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat. Penguatan system distribusi dilakukan dengan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gappoktan) sebagai pelakunya melalui penumbuhan kegiatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Untuk optimalisasi cadangan pangan masyarakat dilaksanakan kembali gerakan menyimpan hasil panen melalui kelompok lumbung pangan. Dinas Pertanian dan Pangan ikut serta dalam meningkatkan daya beli pangan dengan melaksanakan Gerakan Pangan Murah, Pekan Tani dan Pasar Tani.

4. Konsumsi pangan dan belum optimalnya penerapan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di masyarakat.

Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Gunungkidul adalah protein hewani serta sayur dan buah. Untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak di pekaranganya sebagai sumber pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan keluarga.

5. Masih terdapatnya produk pangan yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Sosialisasi dari stakeholders terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Apalagi Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, dalam rangka menjamin pangan yang beredar di Kabupaten Gunungkidul memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis pangan.

Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) juga dilaksanakan dengan sasaran para pelaku usaha yang



mengedarkan (menjual) pangan segar asal tumbuhan, asal hewan dan asal ikan yang ada di pasar tradisional di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan took swalayan, minimarket yang menjual pangan segar asal tumbuhan yang dikemas dan masa simpannya lebih dari 7 (tujuh) hari.

6. Kerawanan pangan adalah kondisi masyarakat, daerah atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat bersifat kronis (*cronical*) dan mendadak/ sementara (*transien*). Kerawanan pangan kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan kemiskinan. Sedangkan, kerawanan *transien* adalah kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya.
7. Ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras masih sekitar 84,2 kg/kapita/tahun. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, diversifikasi pangan masih perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, gembili, suweg, ganyong dan garut, karena capaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

Pertanian

1. Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani.



2. Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi.
3. Program kegiatan untuk meningkatkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian belum terencana optimal.
4. Alih Fungsi Lahan. Secara umum, produksi komoditas pertanian khususnya dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sangat bergantung pada kondisi iklim/cuaca karena mayoritas lahan pertanian merupakan lahan kering yang tidak beririgasi. Selain itu, laju alih fungsi lahan pertanian juga cukup berperan terhadap capaian produksi pertanian. Berdasarkan data BPS selama periode 2009-2019 (10 tahun), terdapat pengurangan jumlah lahan sawah sebanyak 2 hektar dan lahan tegalan/ kebun sebanyak 2.663 hektar. Berdasar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul nomor 388/KPTS/2021 tentang Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan tanggal 6 Desember 2021 ditetapkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2021 dengan luasan 22.234,17 (dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma tujuh belas) hektare terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 21.576,24 (dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam koma dua puluh empat) hektare, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 657,92 (enam ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh dua) hektare.
5. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini membutuhkan upaya keras untuk mempertahankannya, mengingat mayoritas berada di lahan kering serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor lainnya.
6. Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjaga agar KP2B tersebut tidak beralih fungsi dan dapat berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani
7. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten Gunungkidul, jumlah rumah tangga usaha



pertanian menurut kelompok umur kepala rumah tangga menunjukkan bahwa RTUP di Kabupaten Gunungkidul dengan kategori rentang umur ≥ 65 tahun sebanyak 44.517 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) atau 30,93%; umur 55–64 tahun sebanyak 40.867 RTUP (28,39%), umur 45-54 tahun sebanyak 35.784 RTUP (22,86%); umur 35-44 tahun sebanyak 18.102 RTUP (12,58%); disusul kelompok umur 25-34 tahun sebanyak 4.495 RTUP (3,12%) dan terakhir kelompok umur 15-24 tahun sebanyak 178 RTUP (0,12%). Artinya 30,93% RTUP di Kabupaten Gunungkidul memiliki kepala rumah tangga dengan umur ≥ 65 tahun ke atas (usia tua). Dari total petani 143.943 orang di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023, sebanyak 60.266 petani merupakan petani milenial.

8. Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan belum sepenuhnya untuk menekuni, sehingga diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru
9. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu kunci dari perubahan sektor pertanian di era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani. Penggunaan teknologi digital mencakup penggunaan internet/ telepon pintar/ teknologi informasi, penggunaan drone, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk kegiatan usaha pertanian. Jumlah petani milenial yang menggunakan Internet menurut data Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Gunungkidul tahap I berdasar data BPS, dari 60.266 petani milenial sekitar 53.970 menggunakan teknologi. Sedangkan jumlah petani milenial berumur 19-39 tahun yang tidak menggunakan teknologi sebanyak 6.296 orang.
10. Dari data terlihat bahwa aplikasi teknologi tepat guna telah banyak dimanfaatkan oleh petani di sektor pertanian oleh sekitar 90% yang memanfaatkannya. Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal 2G, 3G dan 4G. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya



menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian.

11.Kelembagaan dan sumber daya manusia. Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 memiliki penyuluh PNS 48 orang, Penyuluh P3K sebanyak 49 orang dan penyuluh swadaya sebanyak 144 orang. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran BPP (Balai penyuluh Pertanian) berkembang tidak hanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi diupayakan sebagai tempat untuk mengenalkan model-model usahatani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitas informasi, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi musyawarah, dll) dan pelaksanaan programa penyuluhan. Oleh sebab itu, guna menghasilkan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat mencapai target pembangunan pertanian, penyelenggara penyuluhan di lapangan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana terstandarisasi dan tepat guna.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					pegawai yang ada						Laki-laki	Perempuan
		jml	Kualifikasi				jml	Kualifikasi						
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1	
B	Jabatan Administrasi													
	Administrator						5	2	3				3	2
	Pengawas						6	2	4				2	4
	Pelaksana						19		9	2	7	1	12	7
C	Jabatan Fungsional						107	5	66	14	22		46	61
	Jumlah						138	10	82	16	29	1	64	74

Sumber: Data Kepegawaian Sub Bagian Umum Desember 2025

Berdasarkan data pada table 1.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1



sebanyak 82 orang (59,42%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 29 orang (21,01%), D3 16 orang (11,59%), SLTP 1 orang (0,72%). Komposisi pegawai laki-laki (46,37%) sedikit lebih banyak dibanding pegawai Perempuan (53,63%); tetapi untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Total aset yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 3.783 Unit dengan nilai aset Rp42.832.767.616,08 Sarana prasarana sebagaimana pada table 1.2 di bawah ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul beserta 18 Balai Penyuluh Pertanian di 18 Kapanewon dan 2 Unit Pelaksana Teknis.

Tabel 1. 2 Sarana-Prasarana

No	Nama Barang	Saldo Akhir	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	Aset	3.783	42.832.767.816,08
2	Aset Tetap	3.517	41.035.761.318,67
3	Tanah	8	1.496.267.000,00
4	Tanah	8	1.496.267.000,00
5	Peralatan Dan Mesin	3.111	12.468.530.908,21
6	Alat Besar	31	133.896.500,00
7	Alat Angkutan	164	3.278.235.951,33
8	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	65	368.214.357,16
9	Alat Pertanian	135	1.484.167.366,00
10	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.222	3.624.916.834,72
11	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	137	531.346.993,00
12	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1	35.640.000,00
13	Alat Laboratorium	67	337.890.019,00
14	Alat Persenjataan	0	0
15	Komputer	289	2.674.222.887,00
16	Alat Eksplorasi	0	0
17	Alat Pengeboran	0	0
18	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	0
19	Alat Bantu Eksplorasi	0	0
20	Alat Keselamatan Kerja	0	0
21	Alat Peraga	0	0
22	Peralatan Proses/Produksi	0	0
23	Rambu - Rambu	0	0
24	Peralatan Olah Raga	0	0



No	Nama Barang	Saldo Akhir	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
25	Gedung Dan Bangunan	165	24.701.850.544,33
26	Bangunan Gedung	128	21.319.570.510,33
27	Monumen	0	0
28	Bangunan Menara	1	10.822.500,00
29	Tugu Titik Kontrol/Pasti	36	3.371.457.534,00
30	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	35	2.150.496.508,63
31	Jalan Dan Jembatan	5	690.993.625,43
32	Bangunan Air	15	1.285.530.368,70
33	Instalasi	4	6.296.522,00
34	Jaringan	11	167.675.992,50
35	Aset Tetap Lainnya	198	218.616.357,50
36	Bahan Perpustakaan	1	156.100,00
37	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	0	0
38	Hewan	55	190.850.000,00
39	Biota Perairan	0	0
40	Tanaman	142	27.610.257,50
41	Barang Koleksi Non Budaya	0	0
42	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
45	Aset Lainnya	266	1.797.006.497,41
46	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
47	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0
48	Aset Tidak Berwujud	15	932.872.000,00
49	Aset Tidak Berwujud	15	932.872.000,00
50	Aset Lain-Lain	251	864.134.497,41
51	Aset Lain-Lain	251	864.134.497,41
TOTAL		3.783	42.832.767.816,08

Sumber: Data Aset Sub Bagian Umum Desember 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni kendaraan roda 2, kendaraan roda 3 dan roda 4 dan roda 4 pick up. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang tamu, ruang gudang, kantin, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam



kondisi baik. Alat pertanian dan labortorium juga tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel 1.3, Anggaran Belanja daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan DPPA-SKPD Nomor DPPA/A.3/3.27.2.09.0.00.01.0000/001/2025 Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul semula Rp25.951.710.308,90 dan mengalami perubahan menjadi Rp23.621.006.804,00 atau berkurang Rp2.330.703.504,90.

Tabel 1. 3 Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
3	Pajak Daerah	-	-	-
4	Retribusi Daerah	180.029.000,00	161.013.500,00	19.015.500,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.029.000,00	180.029.000,00	19.015.500,00
8	JUMLAH PENDAPATAN	180.029.000,00	180.029.000,00	19.015.500,00
9	BELANJA DAERAH			
10	BELANJA OPERASI			
11	Belanja Pegawai	9.239.635.038,90	9.239.635.034,00	4.90
12	Belanja Barang dan Jasa	14.304.535.145,00	11.976.255.070,00	2.328.280.075
13	Belanja Bunga	-	-	-
14	Belanja Subsidi	-	-	-
15	Belanja Hibah	1.699.042.200,00	2.019.931.200,00	320.889.000,00
16	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
17	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.412.978.271,00	19.959.257.119,00	1.546.278.848,00
18	BELANJA MODAL			
19	Belanja Modal Tanah	-	-	-
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	468.497.925,00	155.185.500,00	313.312.425,00
21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	140.000.000,00	-
22	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-
23	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
24	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00
25	JUMLAH BELANJA MODAL	708.497.925,00	385.185.500	323.312.425,00
26	JUMLAH BELANJA	25.951.710.308,90	23.621.006.804,00	2.330.703.504,90



No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
27	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.771.681.308,90)	(23.459.993.304,00)	(2.349.719.004,90)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 sebelum perubahan berupa Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp180.029.000,00 yang terdiri dari Penjualan benih padi Rp104.013.000,00, Penjualan Produksi BPP Rp72.816.000,00 dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa pemakaian ruang di Taman Teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran Rp3.200.000,00. Setelah perubahan Rp161.013.500,00 berkurang pada PAD untuk Penjualan Produksi BPP.

Belanja Operasional sebelum perubahan Rp25.243.212.383,90 menjadi Rp23.235.821.304,00 setelah perubahan, atau ada pengurangan sebesar Rp2.007.391.079,90. Pengurangan pagu anggaran tersebut dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, serta pengurangan pagu kegiatan DAK Fisik.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang Optimal”

Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Produksi tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.490.023,44	1.519.823,91	1.550.220,39	1.581.224,78	1.612.849,29	1.645.106,28	1.645.106,28
		Produksi perkebunan dan horti kultura	Ton	34.110,53	33.842,34	33.949,10	34.056,68	37.400,00	34.272,84	34.272,84
2	Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian skor PPH Konsumsi	Indeks	89,7	89,8	89,9	90	90,1	90,2	90,2



Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2021-2026 yang digunakan sebagai target kinerja per tahun, dalam perjalanannya mengalami perubahan target. Hal ini berdasarkan catatan hasil pelaporan kinerja tahun 2024 bahwa informasi dalam laporan kinerja di Dinas Pertanian dan Pangan belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Bentuk tindak lanjut yang dilaksanakan di Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, maka Dinas Pertanian dan Pangan memanfaatkan hasil laporan kinerja (LKjIP 2025) untuk penetapan target pada perjanjian kinerja 2025.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKA TOR KINERJA	Satuan	TARGET TAHUNAN			Target Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
1.	Produksi tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.581.224,78	1.612.849,29	1.645.106,28	1.645.106,28
		Produksi perkebunan dan hortikultura	Ton	34.056,68	37.400,00	34.272,84	34.272,84
2	Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian skor PPH Konsumsi	Indeks	90	90,1	90,2	90,2

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Produksi tanaman Pangan, perkebunan, dan hortikultura meningkat	Penguatan kelembagaan petani dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian
			Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
			Meningkatkan Perlindungan Tanaman dan Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI)



NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPP	Peningkatan koordinasi perencanaan pada internal DPP	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh Bidang bekerja sesuai SOP
	Ketahanan Pangan Meningkat	Peningkatan ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan bagi masyarakat	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan
			Meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan
			Meningkatkan koordinasi penanganan kerawanan pangan
			Meningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
			Meningkatkan pengawasan keamanan pangan

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 4 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.194.010.000,00	2.317.110.000,00	123.100.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.194.010.000,00	2.317.110.000,00	123.100.000,00
Ketahanan Pangan Meningkat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.169.470.000,00	2.296.240.000,00	126.770.000,00
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	374.330.000,00	359.630.000,00	(14.700.000,00)
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	365.400.000,00	350.700.000,00	(14.700.000,00)
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	4.280.000,00	4.280.000,00	0
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4.650.000,00	4.050.000	0



Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.733.310.000,00	1.747.270.000,00	13.960.000,00
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5.420.000,00	4.020.000,00	(1.400.000,00)
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.727.890.000,00	1.743.250.000,00	15.360.000,00
Ketahanan Pangan Meningkat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.920.000,00	1.250.000,00	(3.670.000,00)
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.920.000,00	1.250.000,00	(3.670.000,00)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	4.920.000,00	1.250.000,00	(3.670.000,00)
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	19.620.000,00	19.620.000,00	0
Ketahanan Pangan Meningkat	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	19.620.000,00	19.620.000,00	0
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8.420.000,00	8.420.000,00	0
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.200.000,00	11.200.000,00	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	300.000.000	299.545.000	(455.000)
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	300.000.000	299.545.000	(455.000)
	Pengembangan Lumbung Mataraman	300.000.000	299.545.000	(455.000)
Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Hortikultura Meningkat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.321.527.250,00	1.229.102.250,00	(92.425.000,00)
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	903.045.000,00	813.860.000,00	(89.185.000,00)
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	179.550.000,00	180.750.000,00	1.200.000,00



Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	723.495.000,00	633.110.000,00	(90.385.000,00)
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	418.482.250,00	415.242.250,00	(3.240.000,00)
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	418.482.250,00	415.242.250,00	(3.240.000,00)
Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Hortikultura Meningkat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.867.378.600,00	1.955.175.700,00	(1.912.202.900,00)
	Pengembangan Prasarana Pertanian	658.669.600,00	663.951.700,00	5.282.100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	522.679.600,00	540.391.700,00	17.712.100,00
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	135.990.000,00	123.560.000,00	(12.430.000,00)
	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.208.709.000,00	1.291.224.000,00	(1.917.485.000,00)
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	500.000.000	500.000.000	-
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.800.000.000	200.000.000	(3.600.000.000)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.208.709.000,00	1.291.224.000,00	(1.917.485.000,00)
Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Hortikultura Meningkat	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	128.170.000,00	128.370.000,00	200.000,00
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	128.170.000,00	128.170.000,00	200.000,00
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	128.170.000,00	128.170.000,00 0	200.000,00
Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Hortikultura Meningkat	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6.743.369.500,00	6.353.221.000,00	(390.148.500,00)



Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	6.743.369.500,00	6.353.221.000,00	(390.148.500,00)
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2.442.491.000,000	2.861.771.000,00	419.280.000,00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.783.780.000,00	2.747.780.000,00	(36.000.000,00)
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.517.098.500	743.670.000,00	(773.428.500,00)
		19.489.328.271	21.174.357.279	1.685.029.008

Sumber: DPA dan DPPA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025

Tabel 2. 5 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	23.757.700.308,90	21.303.896.804,00	(2.453.803.504,90)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.697.254.958,90	11.638.027.854,00	(59.227.104,90)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.255.447.871	12.804.761.879	1.549.314.008
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.395.500,00	93.025.300,00	1.629.800,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.440.500,00	78.070.300,00	1.629.800,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.498.000,00	1.498.000,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.249.000,00	1.249.000,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	748.000,00	748.000,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.900.000,00	7.900.000,00	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.560.000,00	2.560.000,00	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.319.519.038,90	9.307.319.034,00	(12.200.004,90)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.239.635.038,90	9.239.635.304,00	(4,90)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.599.000,00	3.599.000,00	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	76.285.000,00	64.085.000,00	(12.200.000,00)



Sasaran	Kebijakan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.744.700,00	189.744.700,00	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	67.469.700,00	67.469.700,00	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.538.400,00	83.681.500,00	(46.856.900,00)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.952.500,00	3.952.500,00	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.910.000,00	21.910.000,00	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.326.000,00	2.326.000,00	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.050.000,00	5.050.000,00	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0
	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.900.000,00	3.900.000,00	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.199.900,00	45.343.000,00	(46.856.900,00)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.585.500,00	152.185.500,00	5600.000,00
	Pengadaan Mebel	88.802.000,00	88.802.000,00	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.783.500,00	63.383.500,00	5.600.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.858.848,00	1.139.458.848,00	(7.400.000,00)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000,00	1.700.000,00	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.144.558.848,00	1.137.158.848,00	(7.400.000,00)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	600.000,00	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.612.972,00	672.612.972,00	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.300.000,00	238.300.000,00	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	422.812.972,00	422.812.972,00	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0
		359.746.500	414.491.500	54.745.000

Sumber: DPA dan DPPA Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Produksi Tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.612.849,00
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Ton	37.400,00
2	Ketahanan Pangan Meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	91,80
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP DPP	nilai	A (81,40)

Tabel 2. 7 Anggaran Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.196.440.000,00	DAU
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.920.000,00	DAU
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	19.620.000,00	DAU
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.321.527.250,00	DAU
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.867.378.600,00	DAU, DAK F, DBH-CHT
6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana	128.170.00,00	DAU



No	Program	Anggaran	Keterangan
	Pertanian		
7	Program Penyuluhan Pertanian	6.743.369.500,00	DAU, DAK F DAK NF
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.697.254.958,00	DAU
JUMLAH		25.951.710.308,00	

Pada tahun 2025, sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan tidak mengalami perubahan dari Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan. Namun demikian, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/ perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Sehingga yang berubah hanya ada pada tabel anggaran. Perbedaan yang ada pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.296.240.000,00	DAU
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.250.000,00	DAU
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	19.620.000,00	DAU
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.229.102.250,00	DAU
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.955.175.700,00	DAU, DAK F, DBH-CHT
6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	128.370.00,00	DAU
7	Program Penyuluhan Pertanian	6.353.221.000,00	DAU, DAK F DAK NF
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.638.027.854,00	DAU
JUMLAH		23.621.006.804,00	

Keterangan Tambahan:

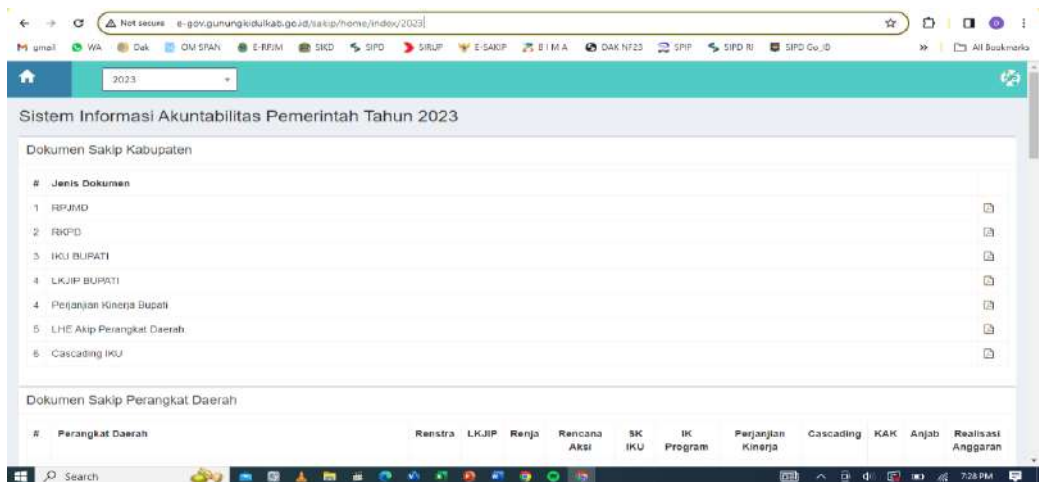
1. Perubahan pagu anggaran sebesar Rp2.330.703.504,90.



2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Mengelola Dana Bagi Hasil cukai Hasil tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp540.391.700,00 melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung Pertanian Lainnya.
4. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp0,00.
5. Mengelola Dana Alokasi Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Urusan Pangan sebesar Rp300.000.000,00 melalui Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
 - b. Urusan Pangan sebesar Rp1.500.000.000,00 melalui Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun.
 - c. Urusan Pertanian sebesar Rp2.246.880.000,00 melalui Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
 - d. Urusan Pertanian sebesar Rp2.497.005.000,00 melalui Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.
 - e. Urusan Pertanian sebesar Rp720.000.000,00 melalui Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
6. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
7. Tidak Mengelola anggaran dekonsentrasi.
8. Tidak mengelola dana APBN Tugas Pembantuan

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

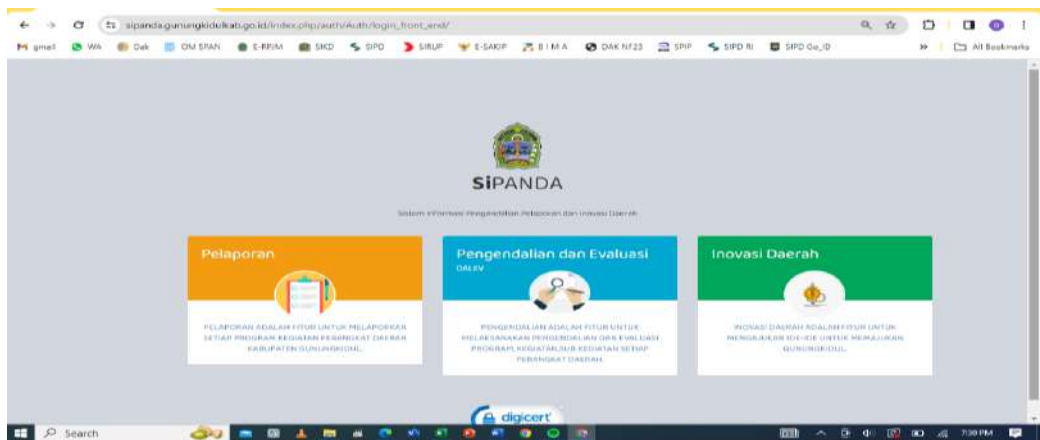
Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Sumber : <http://e-gov.gunungkidulkab.go.id/sakip/home/index/2023>

Gambar 2. 1 Tampilan Beranda E-SAKIP

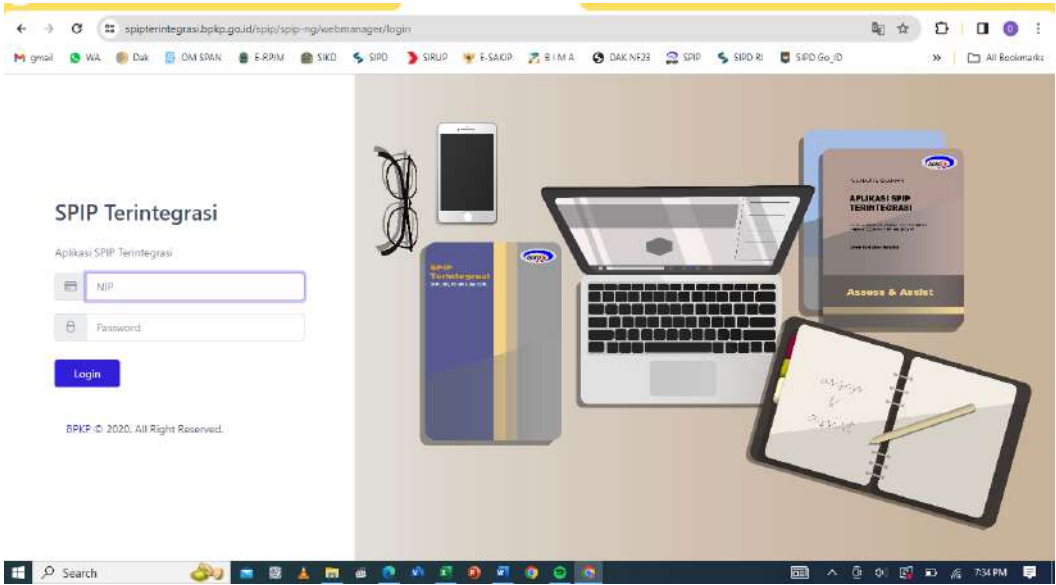
Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (sipanda).



Sumber : https://sipanda.gunungkidulkab.go.id/index.php/auth/Auth/login_front_end/

Gambar 2. 2 Tampilan Beranda Aplikasi SIPANDA

Instrumen penilaian kemajuan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi SPIP Terintegrasi yang mengintegrasikan data tindak lanjut hasil pengawasan.



Gambar 2. 3 Tampilan Beranda SPIP Terintegrasi



BAB III berisi:

- A. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
- B. *Capaian Kinerja Lainnya Tahun 2025*
- C. *Realisasi Anggaran*
- D. *Inovasi*

BAB III

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disajikan melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator pada tahun berjalan, menggunakan satuan dan metodologi pengukuran sebagaimana tercantum dalam meta indikator, sebagai berikut.



Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Base Line 2021	Capaian 2024	Tahun 2025				Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	%	Kriteria / Kode	
1	Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkat	Indikator: Produksi tanaman pangan Meta Indikator: Angka kumulatif produksi laporan statistik tanaman pangan pada tahun ke n Yang dimaksud dengan tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu	Ton	1.490.023,40	1.184.277,54	1.612.849,29	1.662.666,05	103,09	Sangat Tinggi	1.645.106,28
		Indikator: Produksi perkebunan dan hortikultura Meta Indikator: Agregat produksi laporan statistik perkebunan dan hortikultura pada tahun ke n Yang dimaksud dengan: tanaman Perkebunan: kakao, mete, tembakau, kelapa tanaman hortikultura meliputi cabai, bawang merah, pisang, alpukat dan durian	Ton	34.110,53	37.303,13	37.400,00	36.865,61	98,57	Sangat Tinggi	38.272,84



No	Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Base Line 2021	Capaian 2024	Tahun 2025				Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	%	Kriteria / Kode	
2	Ketahanan Pangan Meningkat	Indikator: Capaian Skor PPH Konsumsi Meta Indikator: Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (%AKG x bobot masing-masing kelompok pangan)	Indeks	89,70	91,4	91,8	98,4	107,19	Sangat Tinggi	90,2
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Indikator: Nilai AKIP DPP Meta Indikator: Menunjukkan nilai laporan hasil Evaluasi SAKIP DPP pada t-1	Nilai	BB (77,21)	A (81,33)	A (80,40)	A (81,54)	101,44	Sangat Tinggi	A (80,50)

Tabel 3.2 menyajikan capaian kinerja atas sasaran strategis perangkat daerah yang diukur melalui indikator kinerja utama, dengan perbandingan antara kondisi dasar (baseline) tahun 2021, capaian tahun 2024, serta target dan realisasi tahun 2025. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan kinerja secara bertahap serta tingkat pencapaian target pada tahun berjalan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, seluruh indikator yang ditampilkan pada tabel menunjukkan tingkat capaian yang berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini tercermin dari persentase realisasi terhadap target yang telah melampaui atau berada di atas batas kriteria yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis telah berjalan secara efektif dan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2025 memperlihatkan konsistensi peningkatan yang positif. Capaian



ini tidak terlepas dari perbaikan dalam perencanaan kegiatan, penguatan koordinasi lintas bidang, serta optimalisasi pelaksanaan program yang berbasis kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, indikator yang diukur tidak hanya mencapai target secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang semakin baik.

Untuk memberikan gambaran capaian kinerja secara komprehensif dan terukur, disajikan capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis bidang pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi realisasi kinerja Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025, serta perbandingannya dengan target akhir Rencana Strategis, sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkatkan	Produksi Tanaman Pangan	1.585.700,01	1.516.969,88	1.184.277,54	1.662.666,05	1.645.106,28	90,41
	Produksi Perkebunan dan Hortikultura	24.814,92	40.314,73	34.303,13	36.865,61	34.272,84	99,42
Ketahanan Pangan Meningkatkan	Capaian Skor PPH Konsumsi	91,30	93,01	91,40	98,40	90,2	103,69
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP DPP	A (80,10)	A (80,90)	A (81,33)	A (81,54)	A (80,50)	100,58

Capaian kinerja sasaran Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Meningkatkan pada periode 2022–2025 sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 3.3 menunjukkan dinamika kinerja yang bersifat fluktuatif namun tetap berada dalam arah pencapaian target perencanaan. Perubahan capaian kinerja dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi iklim, pola tanam, luas panen efektif, serta dinamika teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pengukuran kinerja pada sasaran ini dilakukan melalui dua indikator kinerja utama, yaitu produksi tanaman pangan serta produksi perkebunan dan hortikultura, yang disajikan dalam bentuk angka agregat produksi.

Pada indikator produksi tanaman pangan, realisasi kinerja pada Tahun 2022 tercatat sebesar 1.585.700,01 ton dan mengalami penurunan pada



Tahun 2023 menjadi 1.516.969,88 ton. Penurunan tersebut berlanjut pada Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 1.184.277,54 ton, yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi iklim yang kurang mendukung pada sebagian periode tanam, penyesuaian pola tanam, serta berkurangnya luas panen efektif di beberapa wilayah. Namun demikian, pada Tahun 2025 realisasi produksi tanaman pangan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan menjadi 1.662.666,05 ton. Peningkatan tersebut didorong oleh perbaikan kondisi produksi, stabilisasi pola tanam, serta meningkatnya hasil panen pada sebagian besar wilayah sentra produksi. Capaian ini telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 1.645.106,28 ton, dengan capaian sebesar 90,41 persen terhadap target akhir Renstra.

Sementara itu, indikator produksi perkebunan dan hortikultura menunjukkan kinerja yang relatif lebih stabil meskipun tetap mengalami fluktuasi antar tahun. Realisasi kinerja pada Tahun 2022 sebesar 24.814,92 ton meningkat cukup signifikan pada Tahun 2023 menjadi 40.314,73 ton, yang dipengaruhi oleh peningkatan luas panen dan hasil produksi pada sebagian komoditas unggulan. Pada Tahun 2024 dan 2025, realisasi tercatat masing-masing sebesar 34.303,13 ton dan 36.865,61 ton. Hingga Tahun 2025 capaian indikator ini telah mencapai 89,03 persen terhadap target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 34.272,84 ton.

Adapun pada sasaran Ketahanan Pangan Meningkat, indikator capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Perubahan capaian skor PPH dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang, serta dukungan program dan kegiatan yang mendorong diversifikasi konsumsi pangan. Pada Tahun 2025, capaian skor PPH sebesar 98,40 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 90,20 dengan capaian sebesar 103,69 persen. sekaligus berada di atas Skor PPH nasional sebesar 95,1.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian dan Pangan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, AKIP merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP diambil dari hasil



laporan evaluasi SAKIP pada t-1. Tahun 2025, sesuai dengan surat Inspektorat Daerah nomor 700.1.2.7/Ev-LKJ/27 tanggal 26 Maret 2025 mengenai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Dinas Pertanian dan Pangan telah memperoleh nilai AKIP sebesar A (81,54). Nilai ini terlihat mengalami meningkat dari tahun 2024. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, nilai AKIP 2025 memiliki nilai yang lebih besar dengan capaian terhadap target akhir Renstra tersebut sebesar 100,58%.

Secara keseluruhan, fluktuasi capaian kinerja yang terjadi pada masing-masing indikator merupakan kondisi yang wajar dalam pengelolaan sektor pertanian dan pangan yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan teknis. Namun demikian, capaian hingga Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dan adaptif, serta tetap mendukung pencapaian sasaran strategis dan target akhir perencanaan daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Dalam rangka menggambarkan keterkaitan antara sasaran strategis, program, indikator, dan meta indikator dalam pencapaian indikator kinerja utama, disusun pemetaan dukungan program terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Pemetaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian indikator kinerja pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkatkan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan	Agregat produktivitas Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu), Tanaman Hortikultura (cabai, bawang merah, alpukat, durian, pisang), Tanaman Perkebunan (kakao, mete, tembakau, kelapa)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	(Jumlah prasarana yang aktif digunakan/ Jumlah prasarana yang dibangun (sejak tahun 2017 dari APBD) x 100%
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase bencana pertanian yang tertangani	(Jumlah bencana pertanian /jumlah bencana pertanian yang tertangani) x 100%
	Program Penyuluhan Pertanian	Kelompok tani yang melakukan pola usaha agribis	Jumlah Kelompok Tani kelas utama tahun ke n



SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
Ketahanan Pangan meningkat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan konsumsi beras/ kapita/ tahun	Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (% AKG x bobot masing-masing kelompok pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	(Jumlah penanganan kerawanan pangan yang terlaksana / jumlah seluruh layanan) x 100%
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman	(Jumlah sampel pangan yang aman tahun ke n dibagi jumlah total sampel tahun ke n) x 100%
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Menunjukkan nilai laporan hasil Evaluasi SAKIP DPP pada t-1

Tabel 3.4 menggambarkan hubungan antara sasaran strategis dengan program-program yang dilaksanakan, indikator kinerja yang diukur, serta meta indikator sebagai dasar pengukuran kinerja. Setiap program dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis melalui indikator yang terukur dan dapat dievaluasi secara periodik, sehingga ketercapaian indikator kinerja utama dapat ditelusuri secara sistematis dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Sasaran strategis Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Meningkatkan didukung oleh beberapa program yang berfokus pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian serta penanggulangan bencana pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Program-program tersebut saling melengkapi dalam mendukung peningkatan kinerja produksi secara agregat, baik melalui peningkatan ketersediaan sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan prasarana pertanian, maupun penguatan kemampuan pelaku usaha pertanian.

Indikator produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan diukur melalui meta indikator berupa jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada tahun berjalan. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik, tingkat pemanfaatan prasarana yang optimal, serta kemampuan mitigasi dan penanganan bencana pertanian. Selain itu, pelaksanaan penyuluhan pertanian turut berperan dalam mendorong



penerapan praktik usaha tani yang lebih baik dan berkelanjutan, sehingga secara tidak langsung mendukung peningkatan capaian produksi.

Sasaran strategis Ketahanan Pangan Meningkat didukung oleh Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, yang diukur melalui indikator penurunan konsumsi beras per kapita per tahun dan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi. Pelaksanaan program tersebut berkontribusi terhadap perbaikan pola konsumsi masyarakat yang lebih beragam dan seimbang.

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Nilai AKIP sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan tabel 3.3 bahwa nilai ini didapat dari laporan hasil evaluasi SAKIP pada tahun-1.

Dengan adanya pemetaan dukungan program terhadap sasaran strategis tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian dan ketahanan pangan dapat dievaluasi secara lebih terstruktur. Hal ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

Sebagai bagian dari upaya pengukuran kinerja perangkat daerah, capaian kinerja tahun 2025 disajikan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengukuran capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, serta disajikan dalam bentuk persentase capaian kinerja. Adapun ringkasan capaian kinerja program dan indikator kinerja tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Capaian Kinerja Dinas
Pertanian dan Pangan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura /Tanaman Perkebunan Meningkatkan	Produksi Tanaman Pangan Produksi Perkebunan dan Hortikultura	103,09 98,57	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan (ton)	Ton	1.347.371,93	1.699.531,66	126,14	Sangat Tinggi
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase bencana pertanian yang tertangani	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Program Penyuluhan Pertanian	Kelompok tani yang melakukan pola usaha agribisnis (poktan)	Kelompok	124	125	100,81	Sangat Tinggi
Ketahanan Pangan meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	107,19	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penurunan konsumsi beras/ kapita/ tahun	Kg	74,00	84,20	113,78	Sangat Tinggi
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman	Persen	100	108,70	108,70	Sangat Tinggi



Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP DPP	101,44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang sangat optimal. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang berada pada kisaran 100 persen hingga di atas 100 persen, dengan seluruh indikator kinerja berada pada kategori Sangat Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan pada awal tahun dapat dipenuhi, bahkan pada beberapa indikator berhasil dilampaui.

Capaian kinerja yang mencapai dan melebihi 100 persen ini menunjukkan bahwa perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta dukungan sumber daya telah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, capaian tersebut juga mengindikasikan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, capaian yang melampaui target tetap menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa penetapan target ke depan dapat disusun secara lebih proporsional dan mencerminkan tantangan kinerja yang realistis.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi dasar yang positif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

1. Sasaran Stategis Produksi Tanaman Pangan

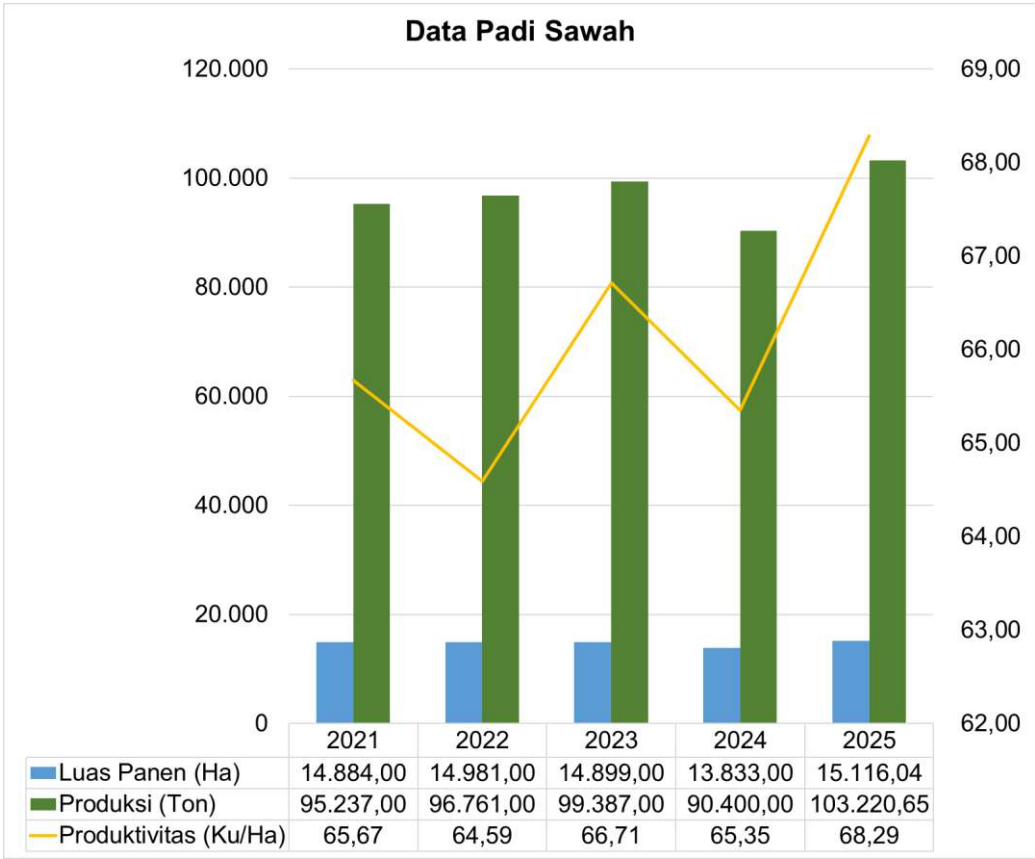
Komoditas strategis pertanian merupakan komoditas pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi. Komoditas strategis dari tanaman pangan



yang juga menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Gunungkidul diantaranya padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu.

Data tanaman pangan yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil kompilasi data lapangan hingga periode pelaporan tahun 2025. Seiring masih berlangsungnya proses pemutakhiran dan verifikasi data produksi di tingkat wilayah, data yang disajikan bersifat dinamis dan mencerminkan kondisi terkini berdasarkan laporan lapangan yang tersedia.

Produksi padi sawah merupakan salah satu komoditas strategis yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk melihat perkembangan kinerja produksi padi sawah secara lebih rinci, disajikan data luas panen, produksi, dan produktivitas selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dinamika produksi padi sawah dari tahun ke tahun, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi capaian produksi di Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana disajikan pada grafik dan tabel sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Sawah Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, kinerja produksi padi sawah di Kabupaten Gunungkidul selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan



fluktuasi yang relatif wajar, dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2025. Perubahan capaian produksi dipengaruhi oleh dinamika luas panen dan tingkat produktivitas, yang erat kaitannya dengan kondisi agroklimat, ketersediaan air irigasi, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian.

Secara umum, luas panen padi sawah berada pada kisaran 13.800 hingga 15.100 hektare, sementara produksi berkisar antara 90 ribu hingga lebih dari 103 ribu ton. Produktivitas padi sawah juga menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam praktik budidaya dan pengelolaan usaha tani oleh petani.

Pada tahun 2025, kinerja produksi padi sawah menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Luas panen tercatat sebesar 15.116,04 hektare, produksi mencapai 103.220,65 ton, dengan produktivitas sebesar 68,29 kuintal per hektare. Produksi tertinggi tercatat pada triwulan I tahun 2025, yang didukung oleh kondisi curah hujan yang relatif memadai dengan rerata hari hujan sekitar 19,85 hari dan rerata curah hujan sebesar 354,01 mm pada periode tersebut, sehingga mendukung fase pertumbuhan awal tanaman padi.

Peningkatan produksi pada tahun 2025 terutama didorong oleh bertambahnya luas panen dan meningkatnya produktivitas. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, luas panen mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya optimalisasi pemanfaatan lahan sawah serta intensitas tanam yang lebih baik. Kondisi ini turut didukung oleh ketersediaan air yang relatif lebih terjaga pada sebagian wilayah sawah beririgasi, sehingga proses budidaya dapat berlangsung lebih optimal.

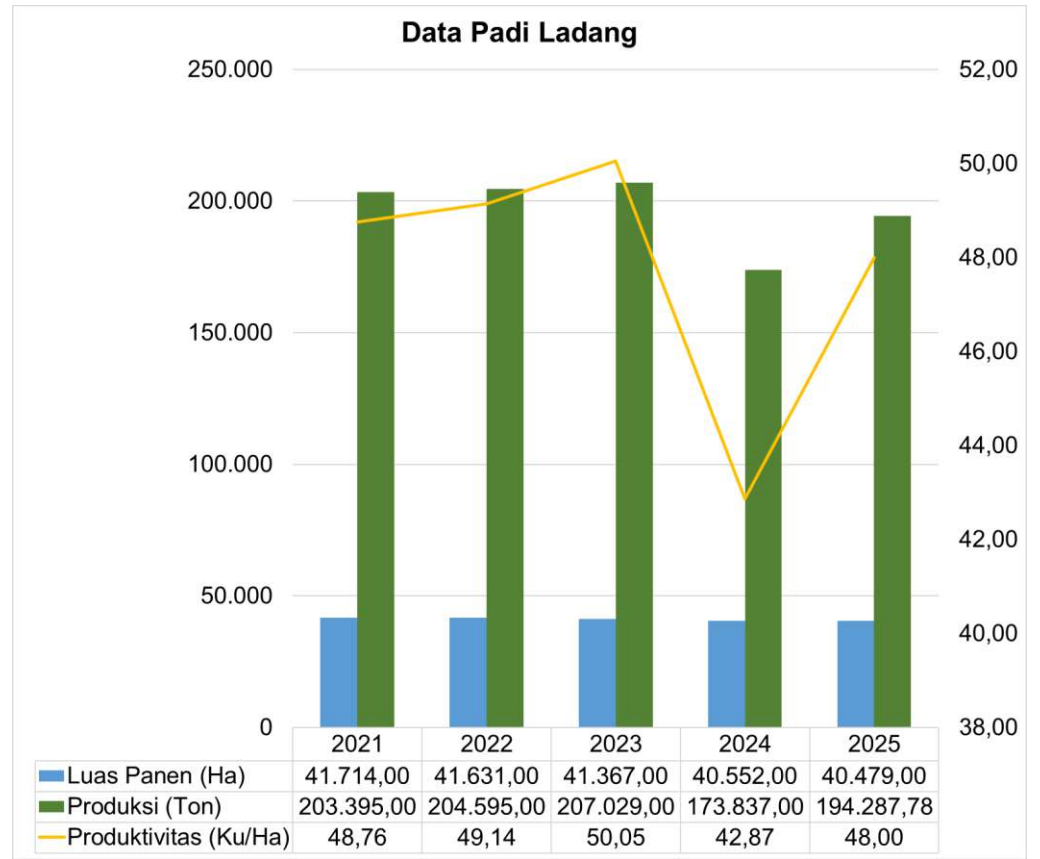
Dari sisi produktivitas, capaian sebesar 68,29 kuintal per hektare merupakan yang tertinggi selama periode 2021–2025. Hal ini mencerminkan membaiknya hasil panen per satuan luas lahan yang dipengaruhi oleh penerapan praktik budidaya yang lebih baik, penggunaan benih unggul, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman yang relatif efektif. Pendampingan teknis kepada petani juga berperan dalam menjaga stabilitas hasil panen di tengah dinamika kondisi iklim.

Berdasarkan capaian tersebut, kinerja produksi padi sawah tahun 2025 memberikan gambaran yang positif terhadap upaya peningkatan



produksi tanaman pangan di Kabupaten Gunungkidul. Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan budidaya, pengelolaan air, serta dukungan teknis kepada petani telah memberikan kontribusi nyata dan dapat menjadi dasar dalam mempertahankan serta meningkatkan kinerja produksi pada tahun-tahun berikutnya.

Selain padi sawah yang dibudidayakan pada lahan beririgasi, produksi padi di Kabupaten Gunungkidul juga didukung oleh padi ladang yang umumnya diusahakan pada lahan kering dan tadah hujan. Karakteristik budidaya padi ladang yang sangat bergantung pada kondisi iklim menjadikan komoditas ini memiliki dinamika produksi yang berbeda dengan padi sawah. Untuk melihat perkembangan kinerja produksi padi ladang secara lebih rinci, disajikan data luas panen, produksi, dan produktivitas selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana ditampilkan pada grafik dan tabel sebagai berikut.



Gambar 3. 2 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi Ladang Tahun 2021-2025

Gambar 3.2 di atas memperlihatkan pada tahun 2025, kinerja produksi padi ladang di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi padi ladang tercatat sebesar 194.287,78 ton dengan luas panen mencapai 40.479,00 hektare dan



produktivitas sebesar 48,00 kuintal per hektare. Capaian ini mencerminkan adanya pemulihan kinerja produksi padi ladang setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya.

Peningkatan produksi padi ladang pada tahun 2025 terutama didorong oleh membaiknya produktivitas tanaman, meskipun luas panen relatif stabil dan cenderung menurun secara bertahap. Produktivitas yang mencapai 48,00 kuintal per hektare menunjukkan hasil panen yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa kondisi pertumbuhan tanaman pada tahun 2025 relatif lebih mendukung.

Perbaikan produktivitas padi ladang pada tahun 2025 tidak terlepas dari kondisi iklim yang lebih mendukung dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya distribusi curah hujan yang relatif lebih baik pada fase pertumbuhan tanaman. Selain itu, kemampuan petani dalam menyesuaikan waktu tanam dengan pola hujan serta penggunaan varietas yang lebih adaptif terhadap lahan kering turut berkontribusi terhadap peningkatan hasil panen.

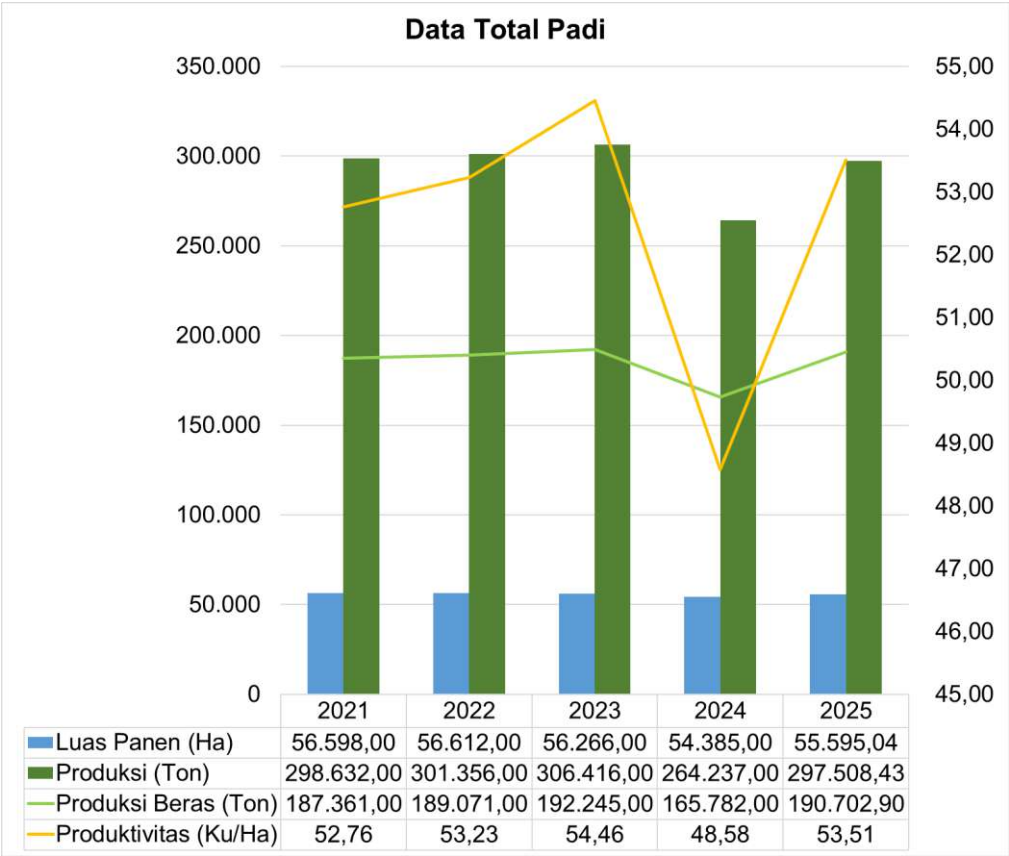
Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, capaian produksi padi ladang pada tahun 2025 menunjukkan tren pemulihan yang positif meskipun belum sepenuhnya menyamai capaian tertinggi pada periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa produksi padi ladang sangat dipengaruhi oleh faktor alam, sehingga fluktuasi kinerja merupakan dinamika yang wajar pada sistem pertanian lahan kering.

Secara keseluruhan, kinerja produksi padi ladang tahun 2025 memberikan gambaran bahwa upaya adaptasi budidaya pada lahan kering mulai menunjukkan hasil yang baik. Capaian ini menjadi dasar penting dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitas padi ladang ke depan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pengembangan tanaman pangan yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Setelah menguraikan perkembangan produksi padi sawah dan padi ladang secara terpisah, selanjutnya disajikan gambaran kinerja total produksi padi di Kabupaten Gunungkidul. Data total padi ini merupakan akumulasi dari produksi padi sawah dan padi ladang, yang digunakan untuk melihat capaian produksi padi secara menyeluruh sebagai salah satu komoditas utama tanaman pangan. Penyajian data total padi meliputi



luas panen, produksi, produktivitas, serta produksi beras selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana ditampilkan pada grafik dan tabel berikut.



Gambar 3. 3 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Total Padi Tahun 2021-2025

Sesuai dengan gambar 3.3 di atas, pada tahun 2025, total produksi padi di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan capaian yang relatif baik. Luas panen tercatat sebesar 55.595,04 hektare dengan total produksi mencapai 297.508,43 ton dan produktivitas sebesar 53,51 kuintal per hektare. Dari total produksi gabah tersebut, produksi beras tercatat sebesar 190.702,90 ton. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja produksi padi pada tahun 2025 berada pada tingkat yang cukup optimal dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, kinerja produksi padi pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari sisi luas panen, produksi, maupun produktivitas. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kondisi produksi padi secara umum, yang merupakan hasil dari kontribusi padi sawah dan padi ladang, meskipun keduanya memiliki karakteristik dan dinamika budidaya yang berbeda.



Dari sisi waktu panen, produksi padi pada tahun 2025 menunjukkan kontribusi terbesar pada Subround I (Januari–April). Pada periode ini, kondisi curah hujan relatif mendukung fase pertumbuhan tanaman padi, khususnya pada lahan sawah beririgasi maupun lahan tadah hujan. Konsentrasi panen pada Subround I memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total produksi padi tahunan, sehingga menjadi periode penting dalam pencapaian kinerja produksi padi di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan sebaran wilayah produksi, Kapanewon Semin tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap total produksi padi pada tahun 2025. Tingginya kontribusi Kapanewon Semin tidak terlepas dari karakteristik wilayah yang memiliki luasan lahan pertanian yang relatif lebih besar dibandingkan wilayah lain, serta kondisi agroklimat yang lebih mendukung untuk budidaya padi. Ketersediaan lahan sawah dan lahan kering yang produktif, ditunjang oleh pola curah hujan yang relatif lebih stabil, menjadikan Kapanewon Semin sebagai salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Gunungkidul.

Selain faktor alam, pengalaman petani dalam mengelola usaha tani padi serta penyesuaian pola tanam terhadap kondisi musim turut berperan dalam menjaga tingkat produksi di wilayah tersebut. Kondisi ini memperkuat peran Kapanewon Semin sebagai kontributor utama dalam mendukung capaian total produksi padi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025.



Gambar 3. 4 Panen dan ubinan padi kegiatan DAK NF di KT Sumber Mulyo, Klepu, Rejosari, Semin pada Selasa, 10 Juni 2025



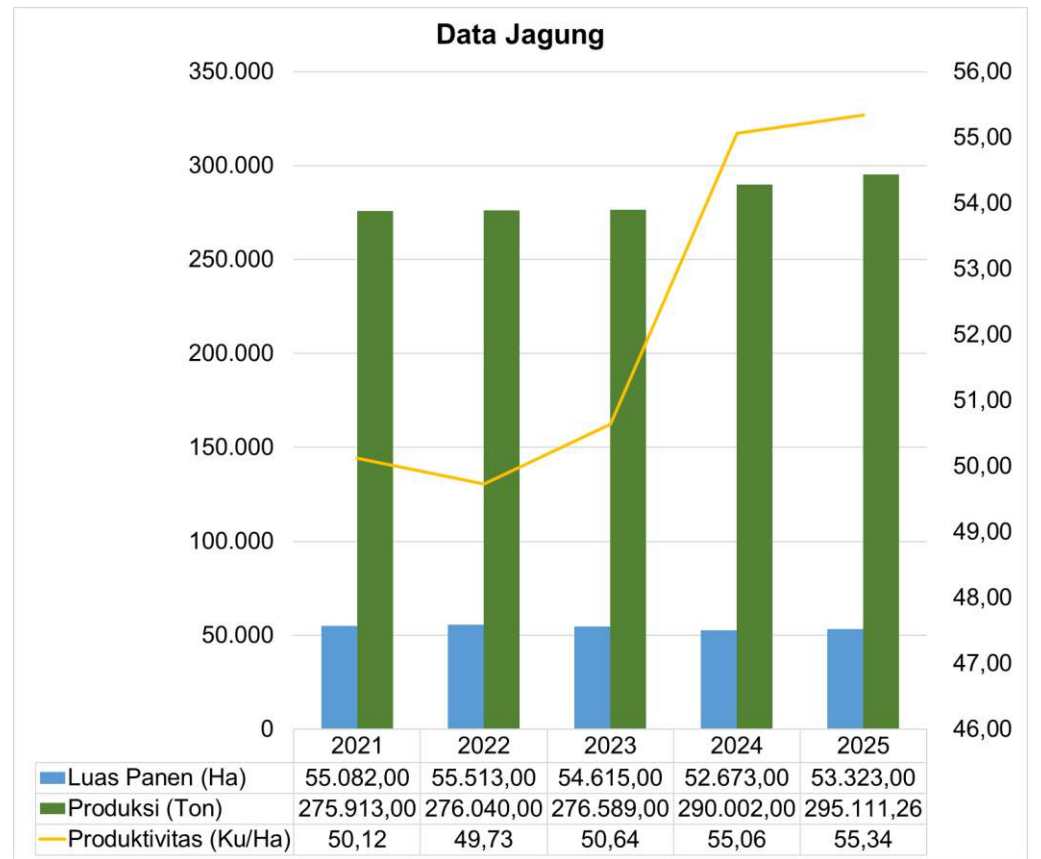
Gambar 3. 5 Panen Padi Lahan KT. Ngudi Subur, Bulu (Kalurahan Hargomulyo) pada Rabu, 4 Juni 2025

Dokumentasi kegiatan panen dan ubinan padi pada tahun 2025 sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.4 dan gambar 3.5 di atas memperlihatkan aktivitas panen yang dilakukan petani di beberapa



wilayah sentra produksi padi di Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan panen di masing-masing lokasi berlangsung dengan pendampingan penyuluh pertanian dari BPP kapanewon setempat, yang turut mendampingi petani sejak proses budidaya hingga pelaksanaan panen dan ubinan. Pendampingan tersebut membantu memastikan penerapan teknis budidaya berjalan sesuai kondisi lapangan sekaligus mendukung ketepatan pencatatan data produksi padi tahun 2025.

Sejalan dengan capaian subsektor tanaman pangan sebelumnya, komoditas jagung juga menunjukkan peran penting dalam menopang kinerja produksi tanaman pangan di Kabupaten Gunungkidul. Jagung menjadi salah satu komoditas strategis yang berkembang cukup konsisten, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan kering yang dominan, sehingga tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap total produksi daerah. Selanjutnya, untuk melengkapi uraian capaian subsektor tanaman pangan, komoditas jagung dianalisis melalui penyajian data luas panen, produksi, dan produktivitas pada periode tahun 2021–2025, sebagai berikut.



Gambar 3. 6 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Jagung Tahun 2021-2025



Terlihat pada gambar 3.6 di atas, pada tahun 2025, jagung di Kabupaten Gunungkidul mencatatkan luas panen sebesar 53.323,00 hektare dengan total produksi mencapai 295.111,26 ton. Tingkat produktivitas yang dicapai sebesar 55,34 ku/ha menunjukkan bahwa kinerja budidaya jagung pada tahun tersebut berada pada kondisi yang relatif baik. Capaian ini mencerminkan kemampuan petani dalam mempertahankan produktivitas meskipun dihadapkan pada dinamika iklim dan keterbatasan sumber daya air yang menjadi karakteristik wilayah Gunungkidul.

Kondisi alam Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 secara umum mendukung pengembangan tanaman jagung, terutama pada wilayah lahan kering. Pola curah hujan yang masih mencukupi pada fase awal pertumbuhan tanaman memberikan kondisi yang baik bagi proses tanam dan pembentukan tongkol. Selain itu, struktur tanah yang relatif ringan serta tingkat drainase yang baik di sebagian besar wilayah turut mendukung pertumbuhan jagung, yang dikenal memiliki toleransi lebih tinggi terhadap kondisi kering dibandingkan komoditas tanaman pangan lainnya.

Di sisi lain, pengalaman petani dalam mengelola pola tanam jagung yang menyesuaikan musim hujan dan ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi. Pemanfaatan varietas jagung yang adaptif terhadap lahan kering serta penerapan teknik budidaya yang telah berkembang secara lokal berkontribusi pada capaian produktivitas tahun 2025. Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa jagung tetap menjadi pilihan komoditas yang relevan dan andal bagi petani Gunungkidul dalam menghadapi tantangan iklim.



Gambar 3. 7 Panen Raya Jagung MH II di Gapoktan Maju Makmur, Bendung, Semin



Gambar 3. 8 Panen Bantuan Pemerintah Jagung di Girijati, Purwosari

Kegiatan panen raya jagung pada Gambar 3.7 dan Gambar 3.8 menunjukkan pelaksanaan panen di tingkat lapangan yang berlangsung dengan pendampingan penyuluh pertanian dari BPP setempat. Pendampingan dilakukan sebagai bagian dari pembinaan teknis serta pemantauan hasil produksi jagung petani. Kegiatan ini mencerminkan keterlibatan aktif penyuluh dalam mendukung proses produksi hingga tahap panen.

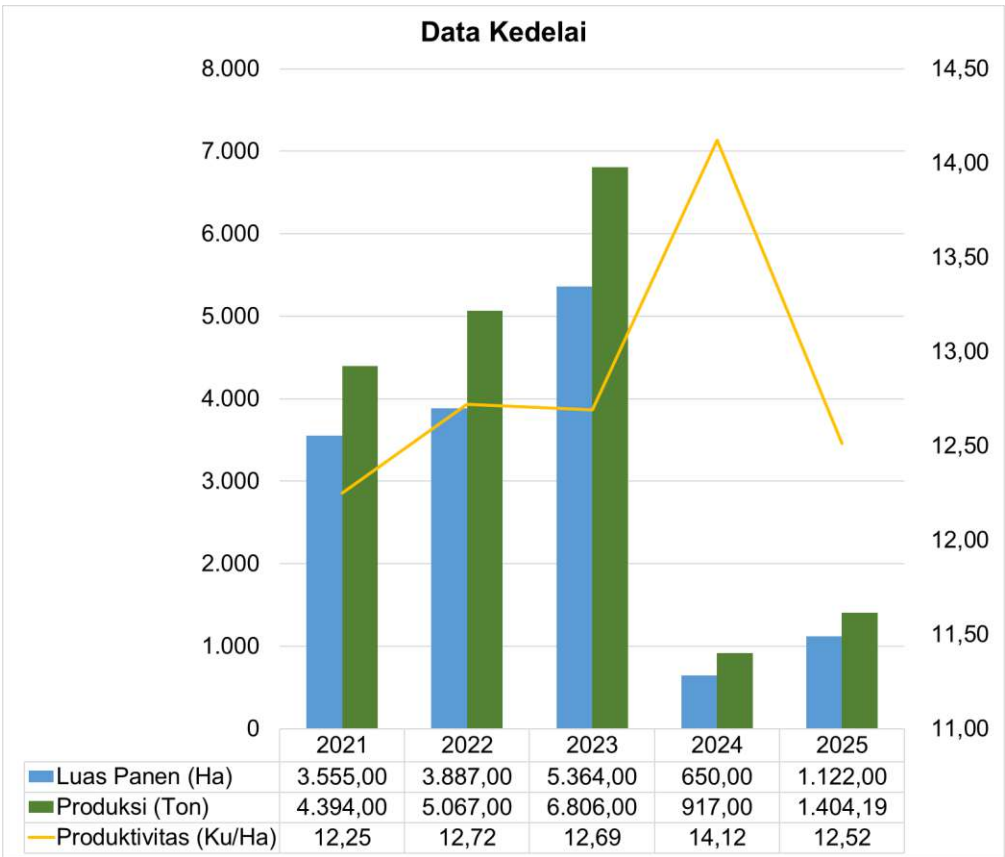
Produksi jagung terbanyak ada pada triwulan 1 tahun 2025 kurang lebih 259,4 ribu ton dengan besaran luasan panen terbesar pada bulan Februari 2025 dengan luasan kurang lebih 44,3 ribu hektare. Pola panen dan akumulasi produksi jagung pada triwulan I tahun 2025 selaras dengan tahapan fase pertumbuhan tanaman serta kondisi curah hujan yang terjadi pada periode sebelumnya. Pada bulan Januari 2025, curah hujan yang relatif tinggi dengan rata-rata 23,33 hari hujan dan curah hujan sebesar 452,51 mm berperan penting dalam mendukung fase vegetatif awal tanaman jagung, meskipun luas panen yang terjadi masih terbatas, yaitu sekitar 2 ribu hektare. Memasuki bulan Februari hingga Maret 2025, kondisi curah hujan menjadi lebih moderat dengan rata-rata hari hujan masing-masing sebesar 17,06 dan 19,17 hari serta curah hujan sebesar 220,77 mm dan 388,76 mm, yang lebih mendukung fase generatif hingga pengisian biji. Kondisi tersebut mendorong peningkatan luas panen secara signifikan pada bulan Februari.

Dengan capaian produksi dan produktivitas pada tahun 2025 tersebut, jagung tetap berperan sebagai salah satu penopang utama subsektor tanaman pangan di Kabupaten Gunungkidul. Konsistensi kinerja jagung pada wilayah lahan kering memperkuat posisinya sebagai komoditas strategis yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan daerah, tetapi



juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas produksi tanaman pangan secara keseluruhan.

Komoditas kedelai sebagai bagian dari subsektor tanaman pangan memiliki karakteristik budidaya yang berbeda dibandingkan komoditas lainnya. Oleh karena itu, perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas kedelai di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2021–2025 disajikan sebagai berikut.



Gambar 3. 9 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Kedelai Tahun 2021-2025

Berdasarkan data tahun 2025 pada gambar 3.9 di atas, komoditas kedelai di Kabupaten Gunungkidul tercatat memiliki luas panen sebesar 1.122,00 hektare dengan total produksi mencapai 1.404,19 ton dan produktivitas sebesar 12,52 ku/ha. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kedelai masih dibudidayakan secara terbatas dan bersifat spesifik lokasi, namun tetap berkontribusi dalam mendukung diversifikasi tanaman pangan, terutama pada lahan kering dan lahan tadah hujan yang tidak optimal untuk komoditas padi.

Secara agroklimat, kondisi alam Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 relatif mendukung budidaya kedelai, khususnya pada periode peralihan musim dan musim kemarau basah. Curah hujan yang mulai

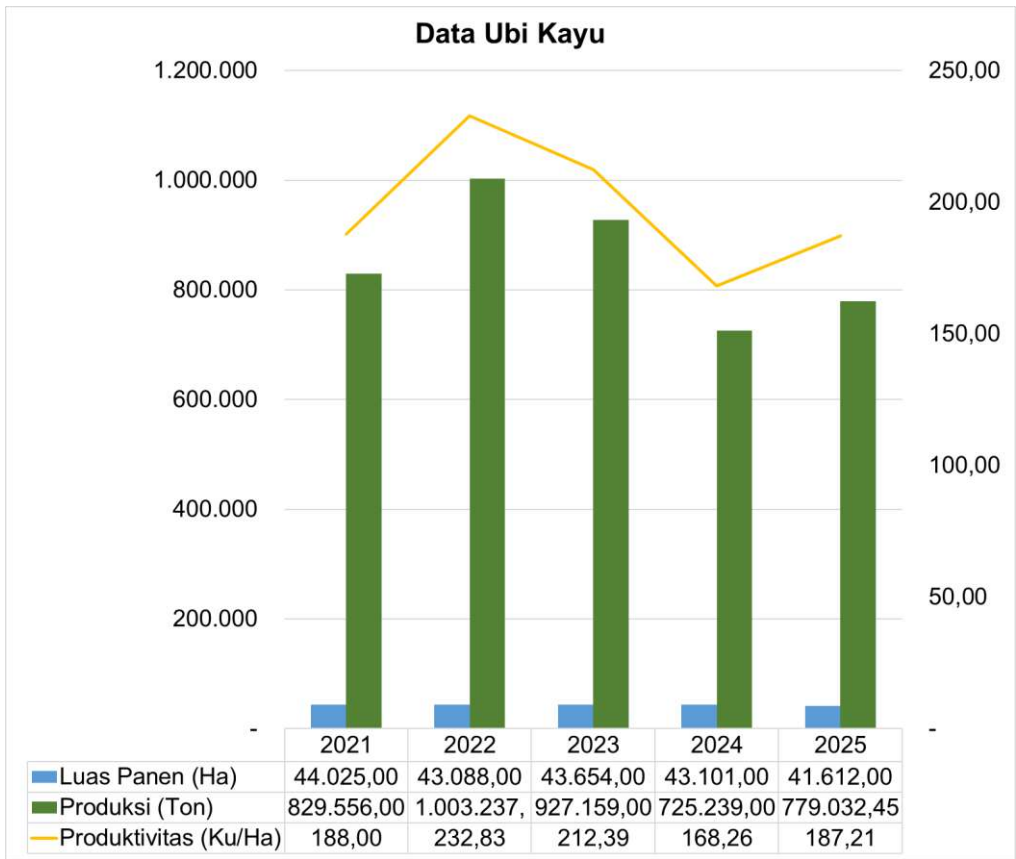


menurun sejak pertengahan tahun menciptakan kondisi lahan yang sesuai bagi pertumbuhan kedelai, mengingat komoditas ini tidak memerlukan genangan air dan justru lebih optimal pada kondisi tanah yang cukup lembap dengan drainase baik. Karakteristik lahan kering bertekstur ringan hingga sedang yang banyak dijumpai di Gunungkidul menjadi faktor pendukung utama keberlangsungan budidaya kedelai pada tahun berjalan.

Perbedaan capaian produksi kedelai antar tahun, termasuk penurunan luas panen pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun tertentu sebelumnya, dipengaruhi oleh penyesuaian pola tanam petani terhadap kondisi iklim dan pertimbangan ekonomi. Pada tahun-tahun dengan curah hujan yang lebih panjang, sebagian lahan dialihkan untuk komoditas lain yang dinilai lebih aman terhadap risiko iklim. Sementara pada tahun 2025, penanaman kedelai lebih selektif dan difokuskan pada lahan-lahan yang secara agroekologi dinilai paling sesuai, sehingga meskipun luas panen relatif terbatas, produktivitas masih dapat dipertahankan pada tingkat yang stabil.

Produksi kedelai tertinggi pada tahun 2025 tercatat terjadi pada bulan September. Kondisi tersebut sejalan dengan pola tanam kedelai di Kabupaten Gunungkidul yang umumnya dilakukan setelah berakhirnya musim hujan utama. Ketersediaan kelembapan tanah sisa hujan, intensitas cahaya matahari yang optimal, serta rendahnya gangguan penyakit akibat kelembapan berlebih menjadi faktor pendukung utama tercapainya produksi optimal pada periode tersebut. Pola ini mencerminkan kemampuan petani dalam menyesuaikan waktu tanam kedelai dengan kondisi iklim setempat secara adaptif.

Sebagai salah satu komoditas pangan penting yang berperan dalam menopang ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat perdesaan, ubi kayu masih menjadi tanaman yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Gunungkidul. Untuk menggambarkan perkembangan kinerja komoditas tersebut, berikut disajikan data luas panen, produksi, dan produktivitas ubi kayu di Kabupaten Gunungkidul selama periode tahun 2021–2025, sebagai berikut.



Gambar 3. 10 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2021-2025

Gambar 3.10 menunjukkan pada tahun 2025, luas panen ubi kayu di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 41.612,00 hektare, relatif stabil dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ubi kayu masih dipertahankan oleh petani sebagai komoditas utama, khususnya di lahan kering dan tegalan. Karakteristik wilayah Gunungkidul yang didominasi lahan berlereng, tanah bertekstur ringan hingga berbatu, serta keterbatasan sumber air menjadikan ubi kayu sebagai tanaman yang sesuai karena memiliki toleransi tinggi terhadap kondisi agroklimat tersebut.

Total produksi ubi kayu pada tahun 2025 mencapai 779.032,45 ton. Dalam distribusi waktu panen, produksi panen bersih tertinggi tercatat pada Triwulan III tahun 2025, dengan puncak panen terjadi pada bulan Mei 2025. Kondisi ini sejalan dengan pola tanam ubi kayu yang umumnya dilakukan pada akhir musim hujan, sehingga fase pembentukan umbi berlangsung pada kondisi kelembapan tanah yang masih mencukupi, namun tidak berlebih. Pola ini secara teknis mendukung pembesaran umbi dan meminimalkan risiko pembusukan.



Secara spasial, Kapanewon Saptosari menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap produksi ubi kayu Kabupaten Gunungkidul tahun 2025. Wilayah ini memiliki hamparan lahan kering yang luas dengan struktur tanah yang sesuai untuk pengembangan ubi kayu. Selain itu, kebiasaan petani di Kapanewon Saptosari yang menjadikan ubi kayu sebagai tanaman utama serta pengalaman dalam pengelolaan budidaya turut berperan dalam menjaga volume produksi yang relatif tinggi.

Produktivitas ubi kayu pada tahun 2025 tercatat sebesar 187,21 kuintal per hektare. Meskipun lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2022 dan 2023, kondisi tersebut masih tergolong wajar mengingat adanya variasi curah hujan sepanjang tahun. Pada beberapa periode, curah hujan yang tidak merata serta fase kering yang lebih panjang memengaruhi optimalisasi pembentukan umbi. Namun demikian, sifat ubi kayu yang adaptif terhadap kondisi kekeringan membuat penurunan produktivitas tidak bersifat ekstrem.



Gambar 3. 11 Ubinan Ubi Kayu di Padukuhan Pudak, Tepus

Pelaksanaan panen ubi kayu seperti yang terlihat pada Gambar 3.11 menunjukkan aktivitas panen di lahan kering yang menjadi karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan panen didampingi oleh penyuluh pertanian dari BPP setempat guna memastikan proses panen berjalan dengan baik serta sebagai bagian dari evaluasi hasil produksi. Dokumentasi ini mencerminkan peran ubi kayu sebagai komoditas yang adaptif dan penting bagi petani di wilayah lahan kering.

Kinerja ubi kayu tahun 2025 mencerminkan peran penting komoditas ini sebagai penopang produksi pangan di wilayah lahan kering Kabupaten Gunungkidul. Dukungan kondisi agroklimat, pola tanam yang telah



beradaptasi, serta kontribusi wilayah sentra seperti Kapanewon Saptosari memperkuat posisi ubi kayu sebagai komoditas strategis yang tetap relevan untuk dikembangkan ke depan.

Secara keseluruhan, kinerja tanaman pangan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan adaptif terhadap karakteristik wilayah. Capaian produksi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu mencerminkan kemampuan sistem usaha tani dalam menyesuaikan pola tanam dengan dinamika iklim serta keterbatasan sumber daya lahan, khususnya pada wilayah lahan kering. Selain faktor agroklimat dan kesesuaian lahan, upaya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) melalui pemantauan lapangan, pendampingan teknis, dan tindakan pengendalian secara terpadu turut berkontribusi dalam menjaga tingkat serangan hama dan penyakit agar tetap terkendali. Sinergi antara pengalaman petani, dukungan penyuluhan, serta pelaksanaan pengendalian OPT secara berkelanjutan menjadi faktor pendukung dalam mempertahankan stabilitas produksi tanaman pangan. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor tanaman pangan tetap berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan menjadi dasar penguatan kebijakan pengelolaan produksi pada tahun-tahun berikutnya.

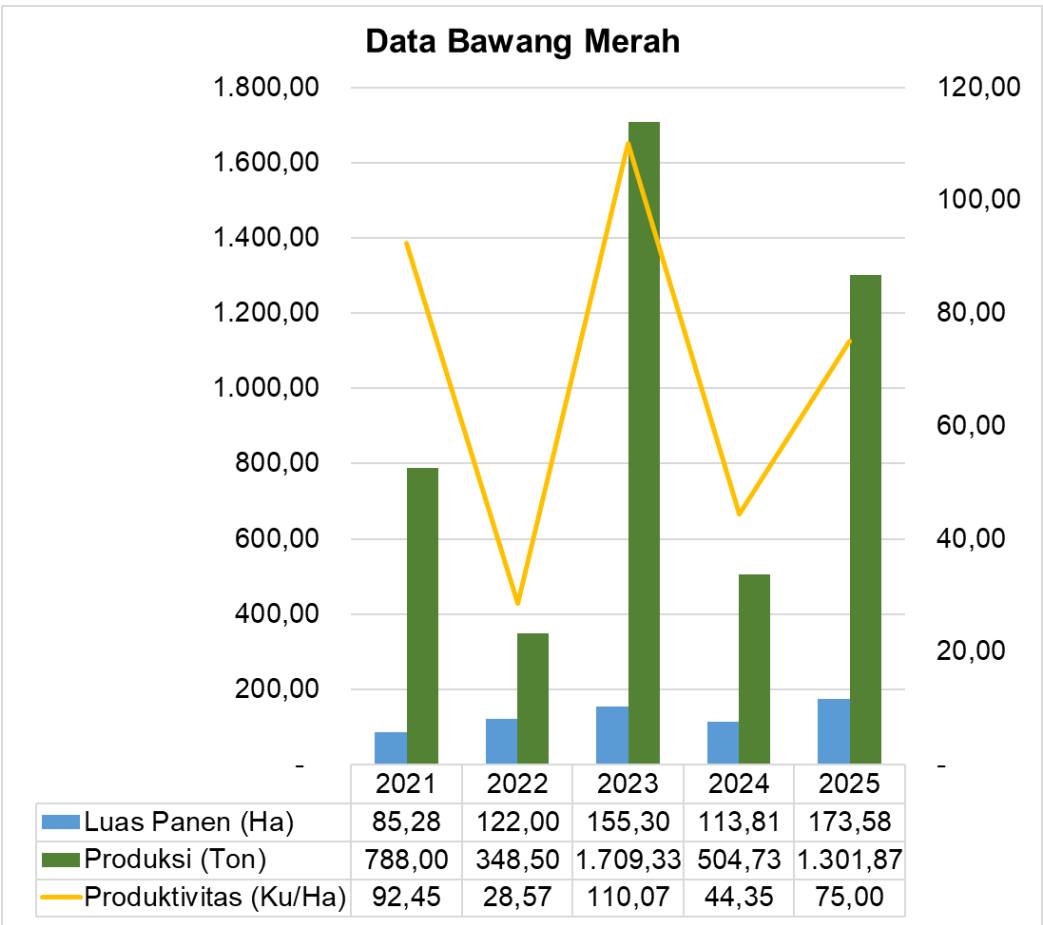
2. Sasaran Strategis Produksi Hortikultura dan Perkebunan

Komoditas hortikultura dan perkebunan merupakan bagian penting dari sektor pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di daerah. Di Kabupaten Gunungkidul, komoditas hortikultura dan perkebunan yang menjadi perhatian utama, antara lain bawang merah, cabai, pisang, durian, alpukat, kakao, tembakau, jambu mete, dan kelapa, yang berkembang sesuai dengan karakteristik agroekologi wilayah.

Data produksi hortikultura dan perkebunan yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil kompilasi data lapangan hingga periode pelaporan tahun 2025. Seiring masih berlangsungnya proses pemutakhiran dan verifikasi data di tingkat wilayah, data yang disajikan bersifat dinamis dan mencerminkan kondisi terkini berdasarkan laporan lapangan yang tersedia.



Sejalan dengan uraian kinerja komoditas hortikultura dan perkebunan sebelumnya, bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura strategis yang memiliki peran penting baik dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan maupun stabilitas harga di tingkat daerah. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas bawang merah di Kabupaten Gunungkidul selama periode tahun 2021–2025 memberikan gambaran dinamika produksi yang dipengaruhi oleh kondisi agroklimat, pola tanam, serta pengelolaan budidaya di tingkat petani, sebagaimana disajikan pada grafik dan tabel berikut.



Gambar 3. 12 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Ubi Kayu Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 3.12 yang merupakan grafik kinerja bawang merah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021–2025, capaian tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang cukup nyata dibandingkan tahun 2024, meskipun belum melampaui capaian tertinggi pada tahun 2023. Pada tahun 2025, luas panen tercatat sebesar 173,58 ha, dengan produksi mencapai 1.301,87 ton dan produktivitas 75,00 kuintal/ha. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja bawang merah mulai kembali menguat setelah fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya, terutama dari sisi



produksi yang tumbuh seiring bertambahnya luas panen dan perbaikan hasil per satuan luas.

Capaian tersebut tidak terlepas dari pengaruh kondisi agroklimat sepanjang tahun 2025. Pada awal tahun, curah hujan relatif tinggi dengan rerata Januari sebesar 452,51 mm dan Februari 220,77 mm, yang kurang ideal bagi bawang merah pada fase awal pertumbuhan karena meningkatkan risiko gangguan penyakit. Namun, memasuki periode berikutnya, curah hujan cenderung lebih moderat dan tidak ekstrem, sehingga mendukung fase pembentukan dan pembesaran umbi. Kondisi ini mendorong peningkatan produksi pada bulan-bulan tertentu, yang kemudian terakumulasi menjadi capaian produksi tahunan yang cukup baik.

Dalam kondisi agroklimat tahun 2025 yang ditandai dengan curah hujan relatif tinggi pada awal tahun, beberapa organisme pengganggu tanaman (OPT) yang berpotensi menyerang bawang merah di Kabupaten Gunungkidul antara lain penyakit busuk umbi (*Fusarium sp.*), bercak daun (*Alternaria sp.*), serta antraknosa (patek). OPT tersebut umumnya berkembang pada kondisi kelembapan tinggi dan drainase lahan yang kurang baik, terutama pada fase vegetatif awal hingga pembentukan daun, sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan tanaman dan kualitas umbi apabila tidak dikendalikan sejak dini.

Selain penyakit, hama ulat grayak dan trips juga berpotensi muncul pada fase vegetatif hingga awal generatif. Serangan trips umumnya meningkat pada kondisi peralihan dari musim hujan ke kemarau, dan dapat menyebabkan daun mengering, terpelintir, serta menghambat proses fotosintesis. Dampaknya, pembentukan dan pembesaran umbi menjadi kurang optimal, yang selanjutnya berpengaruh terhadap produktivitas akhir.

Untuk meminimalkan dampak OPT tersebut, upaya pengendalian dilakukan melalui penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), meliputi pengaturan waktu tanam yang disesuaikan dengan pola hujan, penggunaan varietas yang relatif toleran, perbaikan drainase lahan, serta pemantauan rutin oleh petani dan petugas lapangan. Pendampingan teknis dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul turut berperan dalam mendorong pengendalian OPT yang lebih efektif dan



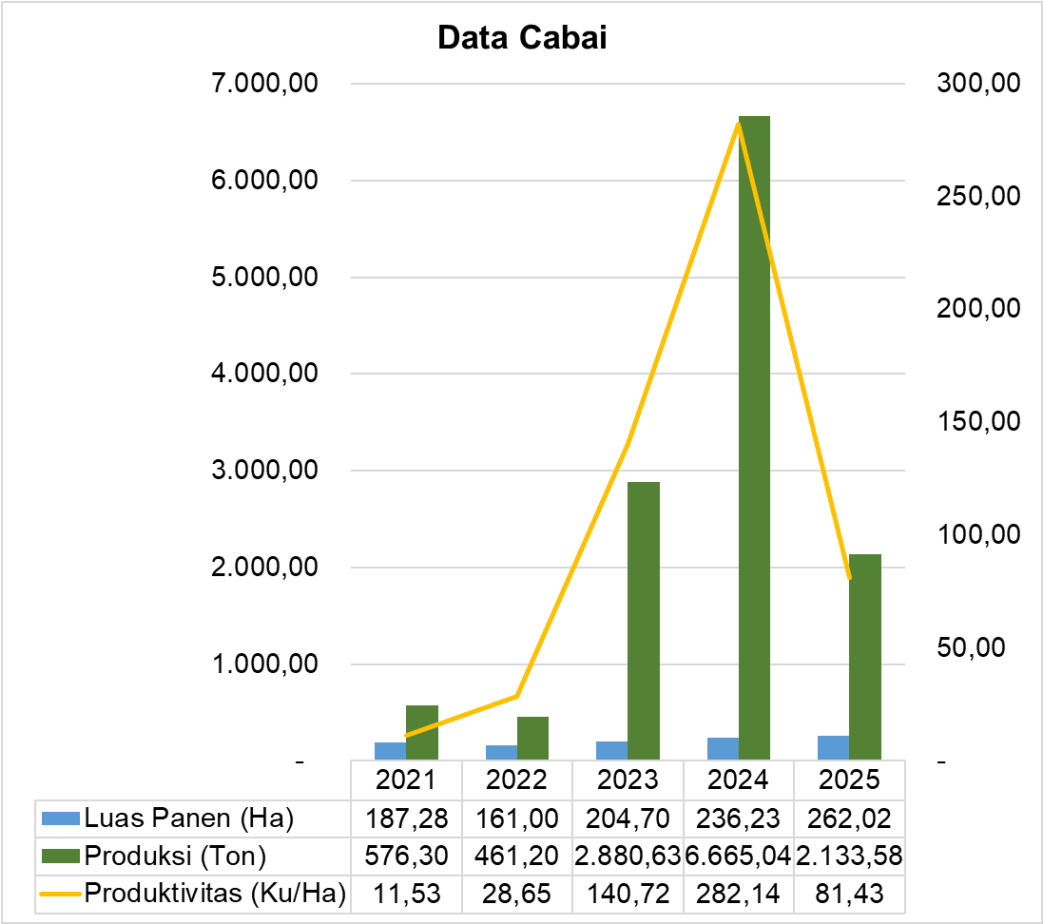
berkelanjutan, sehingga risiko kehilangan hasil dapat ditekan dan kinerja produksi bawang merah tahun 2025 tetap terjaga. Berikut foto salah satu kesempatan panen bawang merah dengan pendampingan dari penyuluh pertanian selama masa penanaman hingga panen, sebagai berikut.



Gambar 3. 13 Ubinan Bawang Merah Demplot DAK NF KT Gatakrejo, Gatak, Karangmojo

Pada gambar 3.13 terlihat dilakukannya ubinan bawang merah pada kegiatan demplot DAK NF yang ada di KT Gatakrejo, Gatak, Karangmojo. Tujuan utama dilakukannya ubinan pada tanaman bawang merah adalah untuk memperkirakan potensi hasil produksi tanaman dalam luasan satu hektar melalui pengambilan sampel di area kecil berukuran 2,5 x 2,5 meter.

Komoditas selanjutnya adalah cabai yang merupakan salah satu komoditas hortikultura strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Gunungkidul. Cabai merupakan komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim dan gangguan organisme pengganggu tanaman, sehingga dinamika produksinya menjadi indikator penting dalam menilai ketahanan sektor hortikultura. Data produksi cabai ini mencerminkan kondisi riil hasil pemantauan lapangan hingga tahun 2025 yang disajikan pada gambar grafik, sebagai berikut.



Gambar 3. 14 Grafik Luas Panen, Produksi, Produktivitas Cabai Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar 3.14, perkembangan produksi cabai di Kabupaten Gunungkidul tahun 2021–2025, terlihat bahwa kinerja produksi cabai mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan penyesuaian kembali pada tahun 2025. Pada tahun 2025, luas panen tercatat sebesar 262,02 hektare dengan produksi mencapai 2.133,58 ton dan produktivitas sebesar 81,43 kuintal per hektare. Meskipun secara agregat masih berada di bawah capaian puncak tahun sebelumnya, kinerja tahun 2025 tetap menunjukkan kondisi produksi yang relatif baik dan mencerminkan kemampuan adaptasi petani terhadap dinamika iklim dan kondisi lapangan.

Dari sisi komposisi produksi, cabai rawit dan cabai keriting menjadi kontributor utama produksi cabai di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025. Pola produksi yang terbentuk menunjukkan bahwa peningkatan hasil tidak semata-mata ditentukan oleh perluasan areal tanam, tetapi lebih dipengaruhi oleh keberhasilan fase pertumbuhan tanaman, khususnya pada fase generatif. Hal ini tercermin dari produktivitas yang masih terjaga meskipun luas panen mengalami penurunan dibandingkan



tahun 2024, yang mengindikasikan pengelolaan budidaya yang relatif efektif.

Kondisi iklim tahun 2025 turut berperan penting dalam mendukung pertumbuhan cabai. Pada awal tahun, khususnya triwulan I, curah hujan yang relatif tinggi dengan rerata bulanan berkisar antara 220–450 mm dan jumlah hari hujan yang masih cukup merata memberikan kelembapan tanah yang mendukung fase vegetatif tanaman cabai. Memasuki pertengahan tahun, curah hujan mulai menurun dan cenderung lebih terkendali, kondisi ini menjadi faktor yang mendukung pembungaan dan pembentukan buah, karena tanaman cabai pada fase generatif memerlukan intensitas hujan yang tidak terlalu tinggi untuk mencegah kerontokan bunga dan serangan penyakit berbasis kelembapan.

Namun demikian, dinamika iklim tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya potensi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), terutama pada periode peralihan musim. Beberapa OPT yang umum dijumpai pada tanaman cabai di Kabupaten Gunungkidul antara lain trips, antraknosa (patek), dan lalat buah, yang berpotensi menyerang sejak fase vegetatif hingga fase pembentukan buah. Untuk menekan dampak serangan OPT, dilakukan pengendalian terpadu melalui pendampingan penyuluh, penerapan sanitasi lahan, penggunaan varietas adaptif, serta pengendalian kimiawi secara selektif sesuai rekomendasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.



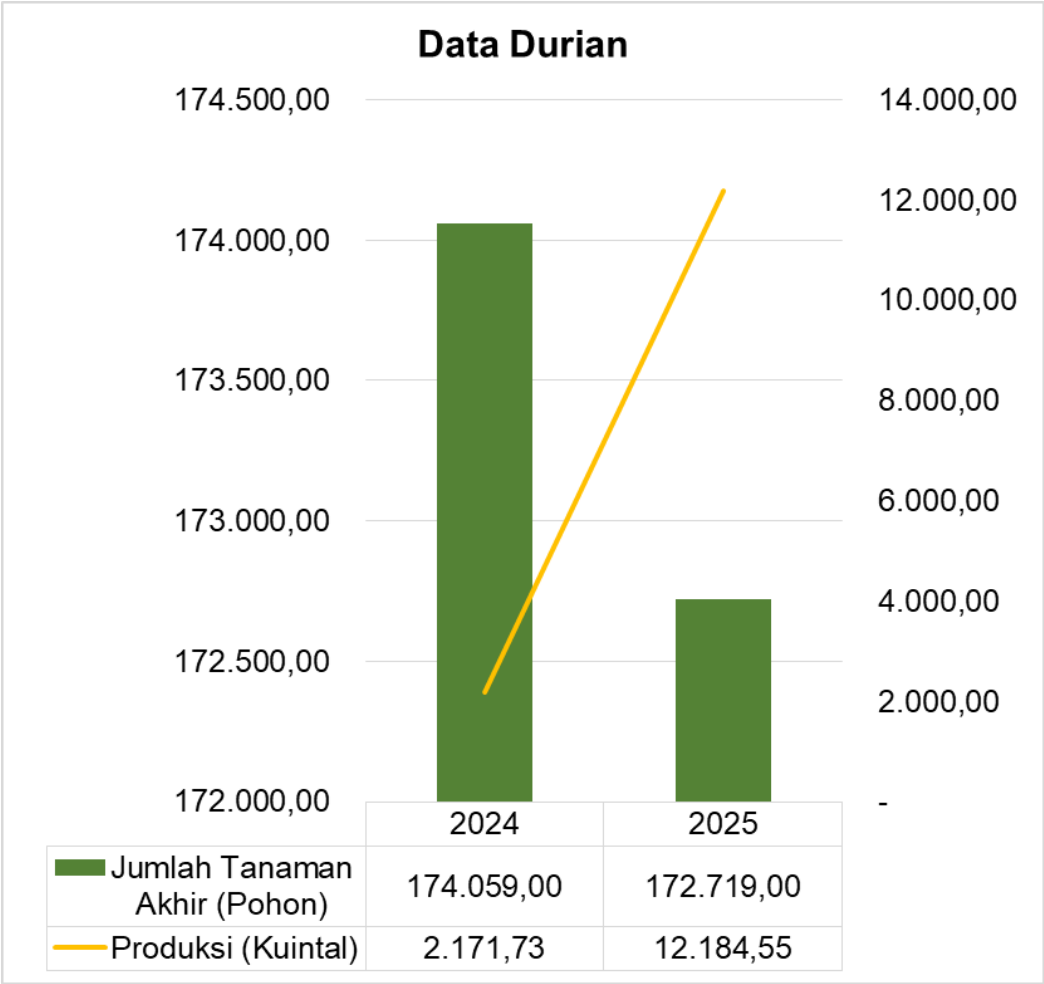
Gambar 3. 15 Panen Cabai Demplot DAK NF KT Dadi Subur, Ngeposari, Semanu



Gambar 3.15 di atas menunjukkan dokumentasi panen cabai pada demplot kegiatan DAK NF yang dilakukan di KT Dadi Subur, Ngeposari, Semanu. Cabai yang ditanam merupakan cabai keriting. Pendampingan terhadap demplot tanaman cabai dilakukan oleh penyuluh pertanian secara intensif.

Secara umum, kinerja produksi cabai tahun 2025 mencerminkan hasil interaksi antara kondisi agroklimat, kecocokan komoditas cabai dengan karakteristik lahan kering Gunungkidul, serta dukungan teknis pengelolaan budidaya dan pengendalian OPT. Meskipun belum mencapai capaian tertinggi dalam periode pengamatan, produksi cabai tahun 2025 tetap menunjukkan stabilitas yang cukup baik dan menjadi dasar yang kuat untuk menjaga kesinambungan produksi hortikultura strategis di Kabupaten Gunungkidul.

Setelah membahas kinerja dua komoditas hortikultura semusim, yaitu bawang merah dan cabai, pembahasan indikator kinerja produksi hortikultura selanjutnya diarahkan pada komoditas tanaman buah tahunan. Tanaman buah tahunan memiliki karakteristik produksi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi agroklimat lintas musim serta fase fisiologis tanaman yang berlangsung lebih dari satu tahun. Salah satu komoditas buah unggulan Kabupaten Gunungkidul yang menunjukkan dinamika produksi signifikan pada tahun 2025 adalah durian, sebagaimana disajikan pada data produksi sebagai berikut.



Gambar 3. 16 Grafik Jumlah Tanaman Akhir dan Produksi Durian Tahun 2024-2025

Gambar 3.16 menunjukkan produksi durian Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 mengalami lonjakan yang sangat tajam dibandingkan tahun 2024, meskipun jumlah tanaman tercatat menurun sekitar 1.340 pohon. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak bersumber dari perluasan jumlah tanaman, melainkan dari peningkatan hasil per pohon. Dengan kata lain, tanaman durian yang masih bertahan pada tahun 2025 berada pada fase produktif optimal dan mampu menghasilkan buah dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara fisiologis, durian dikenal memiliki siklus berbuah tidak stabil setiap tahun (*on year-off year*). Pada tahun 2024, sebagian tanaman durian di Gunungkidul diduga berada pada fase produksi rendah (*off year*), sehingga hasil panen relatif terbatas. Memasuki tahun 2025, tanaman yang sama memasuki fase *on year*, ditandai dengan pembungaan serempak dan pembentukan buah dalam jumlah besar. Fenomena panen



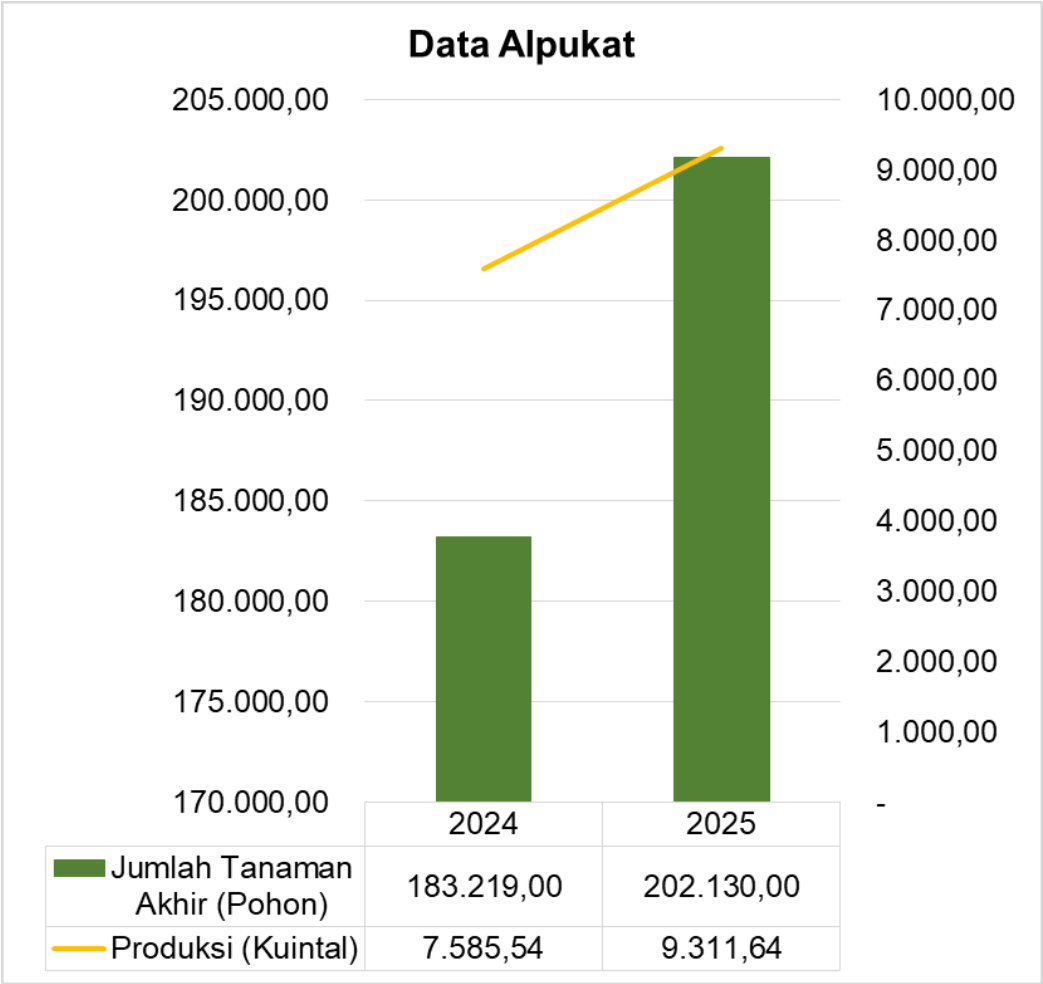
raya ini lazim terjadi pada tanaman durian dan menjadi faktor utama lonjakan produksi meskipun populasi tanaman menurun.

Kondisi iklim tahun 2025 sangat mendukung siklus produksi durian. Curah hujan tinggi pada awal tahun (Januari–Maret berkisar 388–452 mm/bulan) mendukung pemulihan tanaman dan pembentukan cadangan makanan. Penurunan curah hujan yang cukup tajam pada pertengahan tahun (Juni–Agustus <100 mm/bulan) memicu pembungaan secara optimal. Selanjutnya, peningkatan kembali curah hujan pada September–November (± 280 –368 mm/bulan) mendukung pembesaran buah dan mengurangi risiko gugur buah. Pola hujan seperti ini tergolong ideal bagi durian dan jarang terjadi secara seimbang setiap tahun.

Selain tanaman mati dan penebangan tanaman tua, penurunan jumlah tanaman durian pada tahun 2025 kemungkinan terjadi karena tanaman tidak produktif dan terdampak kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuat tanaman yang tersisa justru didominasi oleh pohon pada umur produktif matang dengan sistem perakaran dan tajuk yang sudah optimal. Kondisi ini menyebabkan rata-rata produksi per pohon meningkat signifikan, sehingga secara agregat produksi total tetap melonjak meskipun jumlah tanaman berkurang.

Dengan demikian, lonjakan produksi durian tahun 2025 di Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil kombinasi antara siklus berbuah tanaman, kondisi iklim yang sangat mendukung, serta dominasi tanaman produktif, bukan akibat penambahan luas atau jumlah tanaman.

Setelah pembahasan komoditas durian, analisis kinerja tanaman buah tahunan selanjutnya adalah alpukat. Alpukat merupakan komoditas yang cukup adaptif terhadap kondisi agroklimat Kabupaten Gunungkidul dan menunjukkan perkembangan produksi yang sejalan dengan dinamika jumlah tanaman dan pola iklim, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.



Gambar 3. 17 Grafik Jumlah Tanaman Akhir dan Produksi Alpukat Tahun 2024-2025

Gambar 3.17 menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah tanaman alpukat di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan sebesar 18.911 pohon dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan juga terlihat pada produksi tanaman alpukat.

Meskipun demikian, terlihat bahwa laju peningkatan produksi belum sebanding dengan peningkatan jumlah tanaman akhir. Kondisi yang tidak selaras ini sangat rasional karena tambahan tanaman yang baru masih dalam fase Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) atau baru memasuki fase awal berbuah. Penambahan jumlah produksi alpukat tahun 2025 masih ditopang oleh tanaman yang telah memasuki usia produktif yang umumnya ada pada umur 3-4 tahun.

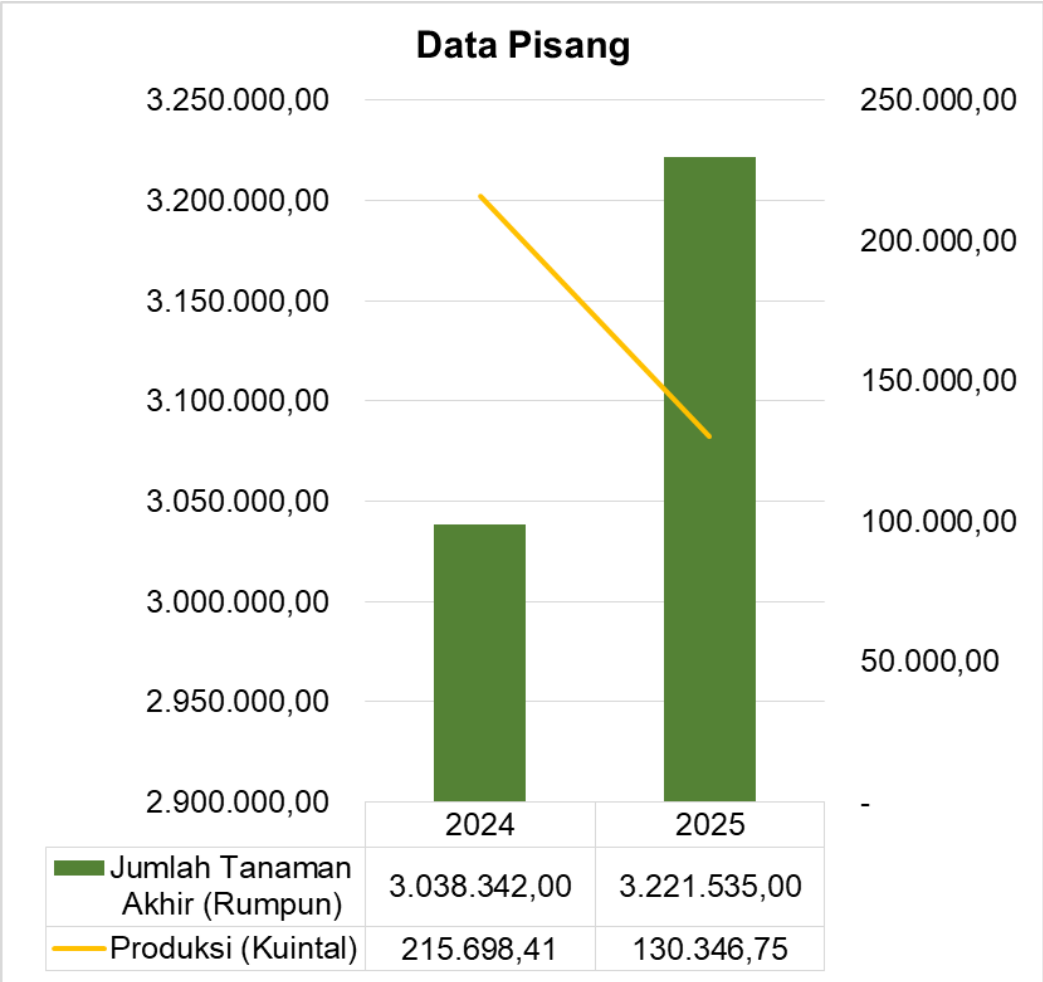
Berbeda dengan durian yang memerlukan periode kering yang jelas untuk merangsang pembungaan, tanaman alpukat justru membutuhkan asupan air yang stabil, terutama pada fase perkembangan buah untuk mencegah buah kerdil atau kerontokan prematur. Pola curah hujan pada



tahun 2025 pun sudah cukup ideal bagi perkembangan tanaman alpukat. Tingginya curah hujan dari bulan Januari-Maret 225 memberikan cadangan air yang cukup bagi tanaman alpukat untuk melakukan pengisian buah sehingga buah dapat dipanen pada triwulan ke 2.

Dengan mempertimbangkan dinamika jumlah tanaman dan capaian produksi alpukat sepanjang tahun 2025, dapat dipahami bahwa peningkatan produksi masih berjalan bertahap seiring proses pematangan tanaman menuju fase produktif penuh. Kondisi ini menegaskan pentingnya kesinambungan pengelolaan tanaman buah tahunan dalam jangka menengah.

Selanjutnya, pembahasan indikator kinerja produksi hortikultura diarahkan pada komoditas pisang sebagai tanaman buah yang bersifat lebih adaptif, berumur relatif pendek dibanding tanaman tahunan lain, serta memiliki peran strategis dalam menjaga kontinuitas pasokan dan stabilitas produksi di Kabupaten Gunungkidul. Data mengenai tanaman pisanag diuraikan pada grafik, sebagai berikut.



Gambar 3. 18 Grafik Jumlah Tanaman Akhir dan Produksi Pisang Tahun 2024-2025



Produksi dan jumlah tanaman akhir tanaman pisang sebagaimana pada Gambar 3.18 menunjukkan adanya kenaikan rumpun pisang yang cukup signifikan dari tahun 2024 ke 2025. Tetapi hal tersebut tidak terjadi pada jumlah produksi pisang. Pada praktik di lapangan, rumpun pisang umumnya memiliki masa 9-12 bulan dari tanam hingga memasuki fase generatif dan menghasilkan tandan. Penurunan angka produksi dari tahun 2024 ke 2025 ini salah satu faktor penyebabnya adalah penambahan jumlah tanaman belum dapat meningkatkan angka produksi karena masih dalam masa pembentukan anakan atau fase vegetatif.

Selain karena banyaknya tanaman yang masih berada dalam masa vegetatif, pola curah hujan juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman pisang pada tahap generatif dan pembentukan buah. Curah hujan pada triwulan 1 tahun 2025 dengan intensitas tinggi kemudian menurun tajam di pertengahan tahun, membuat tatanan yang kurang ideal bagi tanaman pisang yang membutuhkan ketersediaan air stabil. Hujan berlebihan di awal tahun bisa jadi merupakan faktor yang memicu terdorongnya pertumbuhan vegetatif tanaman pisang sehingga tanaman dipaksa untuk berbunga dengan lebatnya. Tetapi di pertengahan tahun terjadi kekeringan yang berpotensi menghambat pertumbuhan buah yang menyebabkan tandan kecil dan panen tidak optimal.

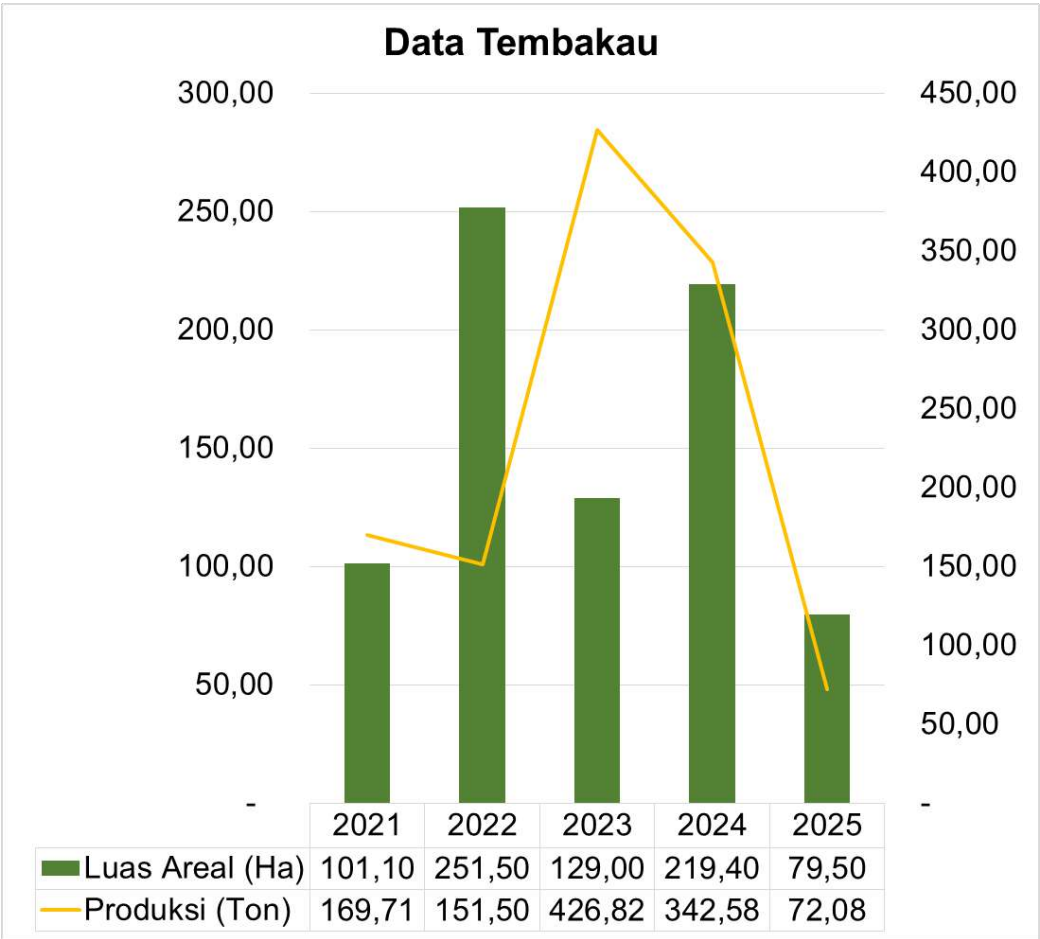
Kelembaban akibat intensitas hujan yang sangat tinggi juga dapat memicu risiko penyakit layu dan busuk batang pada tanaman pisang. Meskipun tidak selalu mematikan tanaman, tetapi tentunya dapat menurunkan kualitas tanaman untuk dapat berbuah.

Penurunan produksi pisang tahun 2025 meskipun jumlah rumpun meningkat merupakan kondisi yang rasional dan sesuai dinamika lapangan. Kenaikan populasi didominasi tanaman belum menghasilkan, sementara produksi dipengaruhi oleh ketidaksesuaian pola hujan pada fase generatif serta penurunan hasil per rumpun. Ini bukan kegagalan, tetapi cerminan fase transisi produksi yang wajar pada komoditas tanaman buah semu tahunan seperti pisang.

Setelah membahas terkait tanaman hortikultura, kini giliran tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang perlu dibahas. Sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, kelompok tanaman perkebunan yang akan



dibahas mencakup tembakau, kakao, kelapa, dan jambu mete. Kelompok tanaman ini memiliki pola budidaya, siklus produksi, serta ketergantungan iklim yang berbeda dibandingkan hortikultura. Analisis pada bagian ini diawali dengan komoditas tembakau, mengingat karakteristiknya sebagai tanaman semusim yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan cukup menentukan dinamika pendapatan petani di Gunungkidul sebagaimana terdapat pada gambar, sebagai berikut.



Gambar 3. 19 Grafik Luas Areal dan Produksi Tembakau Tahun 2021-2025

Berdasarkan Gambar 3.19, penurunan produksi tembakau pada tahun 2025 terjadi meskipun luas areal masih relatif terjaga. Selain faktor beralihnya petani ke komoditas tanam lainnya, salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah ketidaksesuaian pola curah hujan dengan fase kritis pertumbuhan tembakau. Tembakau membutuhkan kondisi relatif kering, terutama pada fase pembentukan daun hingga menjelang panen. Intensitas hujan yang masih cukup tinggi pada awal hingga pertengahan musim tanam berpotensi menyebabkan pertumbuhan vegetatif berlebih,

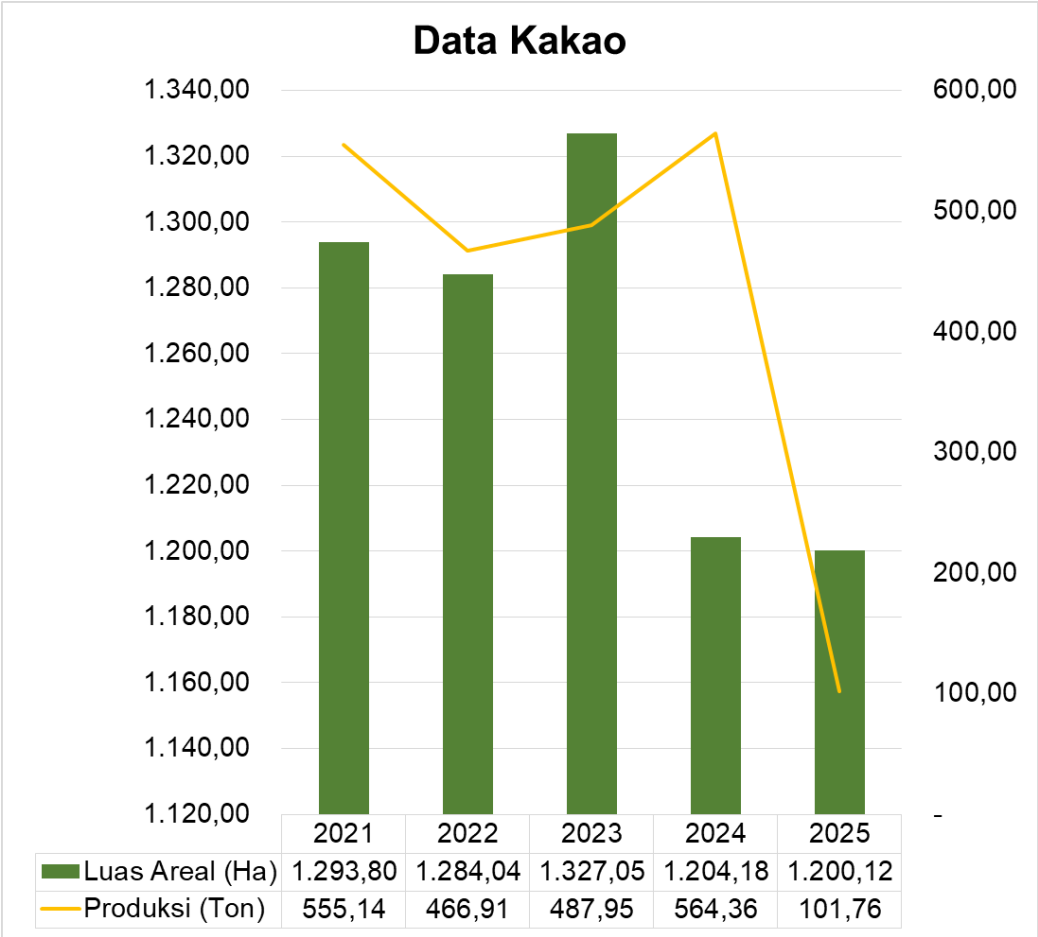


kualitas daun menurun, serta meningkatnya risiko pembusukan daun dan batang, yang pada akhirnya menekan hasil panen efektif.

Selain itu, selama tahun 2025 tercatat ada setidaknya 150,90 hektare tanaman mati atau rusak. Kondisi kelembapan yang tinggi akibat hujan berlebih sangat rentan memicu serangan penyakit, seperti busuk akar dan bercak daun, yang umum terjadi pada tembakau di lahan kering Gunungkidul. Dampak ini tidak selalu mengurangi luas tanam secara drastis, namun menurunkan produktivitas per hektare sehingga produksi total ikut tertekan.

Secara keseluruhan, dinamika produksi tembakau menunjukkan bahwa capaian hasil panen tidak semata ditentukan oleh luasan areal tanam, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kondisi iklim dengan fase pertumbuhan tanaman serta tingkat keberhasilan budidaya di lapangan. Variasi curah hujan dan meningkatnya risiko tanaman rusak berkontribusi terhadap penurunan produksi pada tahun berjalan, sehingga diperlukan penguatan pengelolaan waktu tanam dan adaptasi teknis budidaya agar kinerja komoditas tembakau dapat lebih stabil ke depan.

Komoditas selanjutnya adalah kakao. Produksi kakao dipengaruhi oleh perkembangan jumlah tanaman, kondisi iklim terutama curah hujan, serta tingkat pemeliharaan tanaman produktif di masing-masing wilayah, sebagaimana ditunjukkan pada data perkembangan kakao berikut.



Gambar 3. 20 Grafik Luas Areal dan Produksi Kakao Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik pada Gambar 3.20, luas areal kakao di Kabupaten Gunungkidul relatif stabil pada periode 2021–2023, namun mulai mengalami penurunan pada 2024 dan berlanjut hingga 2025. Penurunan luas areal ini mengindikasikan adanya pengurangan tanaman, baik akibat tanaman tua yang tidak lagi produktif maupun konversi lahan ke komoditas lain yang dianggap lebih menjanjikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara struktural, basis budidaya kakao mulai mengalami tekanan dari sisi keberlanjutan tanaman.

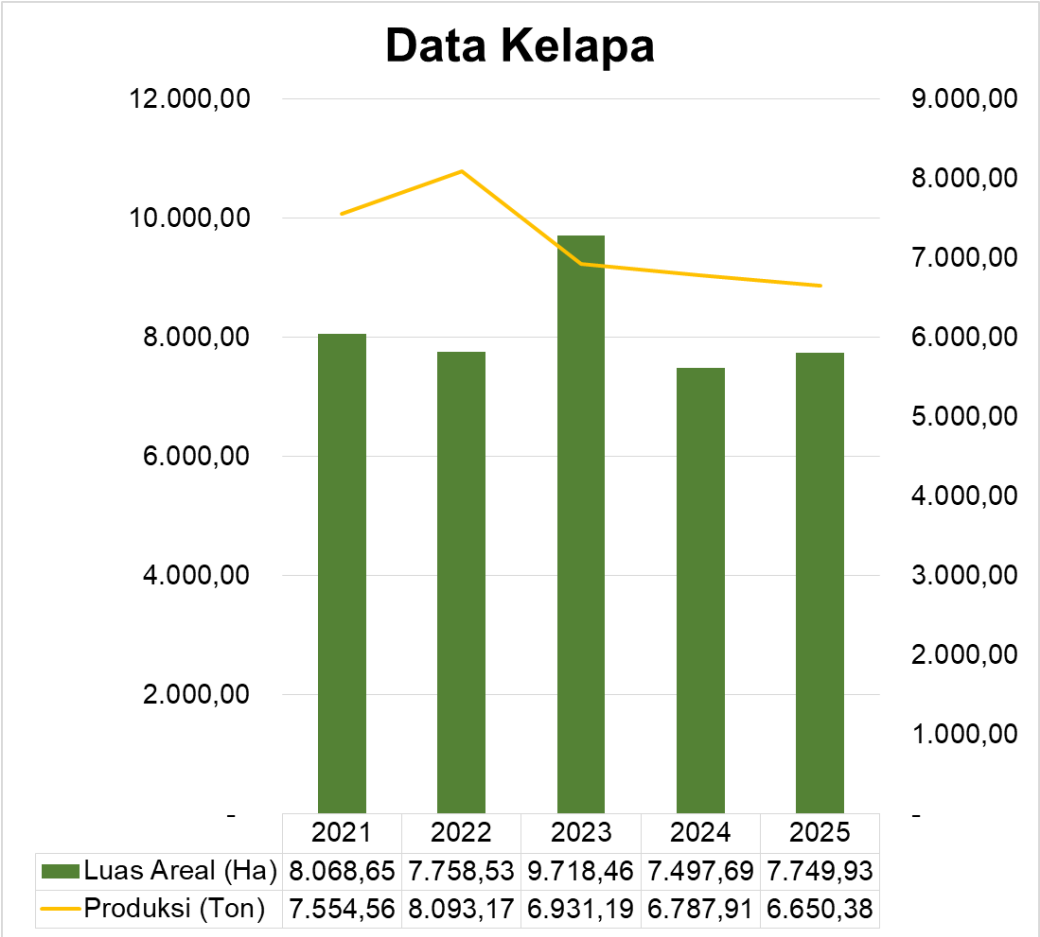
Di sisi produksi, kinerja kakao menunjukkan fluktuasi yang cukup kontras. Produksi sempat meningkat pada 2024 meskipun luas areal menurun, yang mengindikasikan masih optimalnya kontribusi tanaman menghasilkan (TM) pada periode tersebut. Namun pada 2025 terjadi penurunan produksi yang sangat tajam, tidak sebanding dengan penurunan luas areal. Kondisi ini mengarah pada dugaan bahwa sebagian besar tanaman memasuki fase penurunan produktivitas, baik karena umur tanaman, minimnya peremajaan, maupun penurunan intensitas pemeliharaan oleh petani.



Faktor iklim turut memperkuat kondisi tersebut. Pola curah hujan yang relatif tinggi dan tidak merata sepanjang tahun berpotensi mengganggu fase pembungaan dan pembentukan buah kakao, terutama jika terjadi hujan intens pada periode kritis. Kelembapan yang tinggi juga meningkatkan risiko serangan penyakit, seperti busuk buah, yang berdampak langsung pada penurunan hasil panen.

Dengan kombinasi penurunan luas areal, umur tanaman yang menua, serta kondisi iklim yang kurang mendukung, penurunan produksi kakao pada 2025 menjadi kondisi yang cukup logis dan selaras dengan dinamika data yang ada sehingga perlu adanya upaya peningkatan produktivitas ke depan perlu diarahkan pada perbaikan budidaya dan pengelolaan tanaman eksisting. Dengan adanya bantuan berupa bibit tanaman kakao dari Kementerian RI yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul untuk kemudian diserahkan kepada kelompok tani kakao pada akhir tahun 2025, diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi tanaman kakao pada tahun-tahun berikutnya.

Komoditas berikutnya adalah kelapa. Kinerja kelapa pada tahun 2025 disajikan untuk menggambarkan dinamika luas areal dan produksi sebagai dasar evaluasi perkembangan komoditas tersebut, sebagai berikut.



Gambar 3. 21 Grafik Luas Areal dan Produksi Kelapa Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik pada Gambar 3.21 di atas, komoditas kelapa pada tahun 2025 di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren penurunan pada angka produksi secara bertahap dari tahun 2023. Sedangkan untuk luasan area, mengalami peningkatan kurang lebih 300 hektare dari tahun 2024.

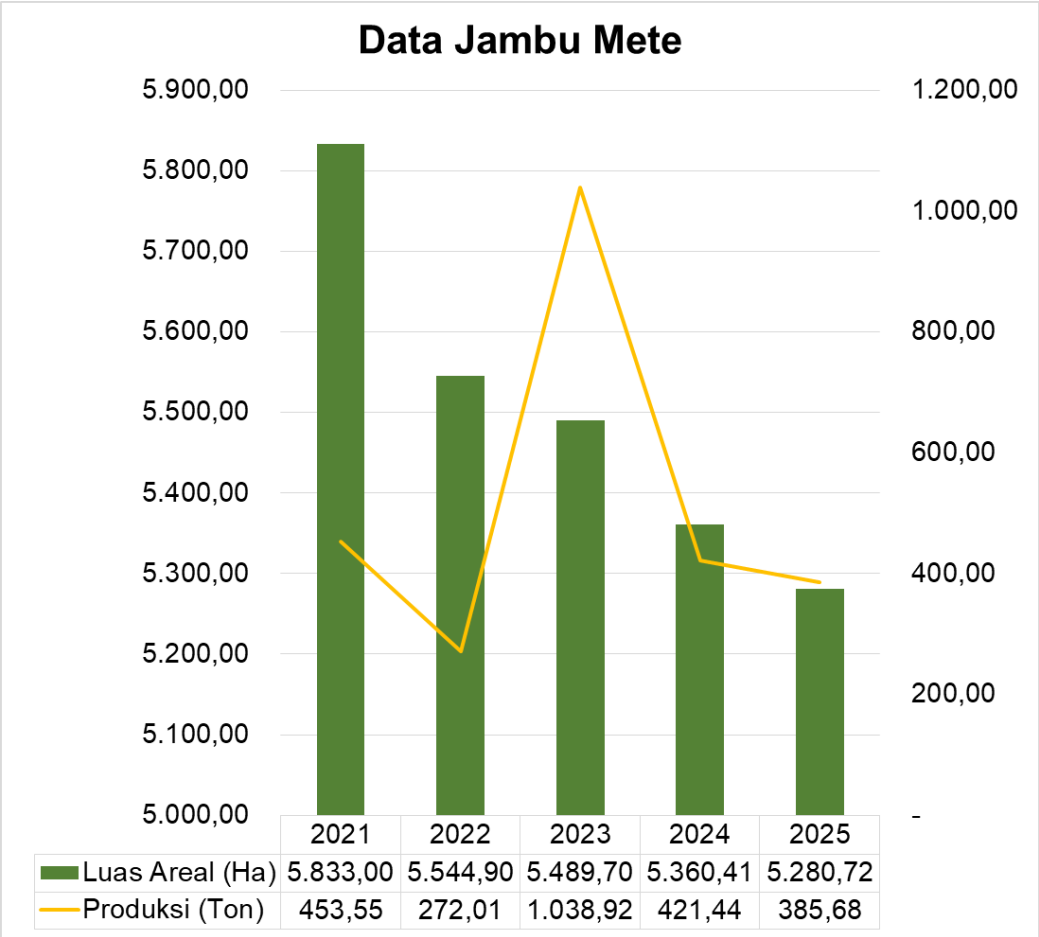
Salah satu faktor yang mungkin menjelaskan penurunan produksi adalah umur tanaman dan struktur populasi kebun kelapa. Banyak tanaman kelapa yang sudah tua dan memasuki fase produktivitas menurun, sehingga meskipun masih tercatat dalam luas areal, kontribusinya terhadap produksi total menjadi kurang optimal. Di sisi lain, penambahan tanaman baru belum memberikan dampak besar terhadap produksi tahun berjalan karena tanaman muda membutuhkan waktu sebelum mencapai fase produktif penuh.

Pada akhir tahun 2025, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul menerima bantuan berupa bibit kelapa genjah entog dari Kementerian RI sebanyak 11.000 batang. Penyaluran bantuan kepada kelompok tani penggarap tanaman kelapa dilakukan pada awal tahun



2026. Dengan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa di Kabupaten Gunungkidul.

Setelah mengulas tiga komoditas perkebunan, komoditas terakhir yang akan diulas adalah jambu mete. Kinerja jambu mete pada tahun 2025 disajikan untuk menggambarkan dinamika luas areal dan produksi sebagai dasar evaluasi perkembangan komoditas tersebut, sebagai berikut.



Gambar 3. 22 Grafik Luas Areal dan Produksi Jambu Mete Tahun 2021-2025

Komoditas jambu mete seperti yang ada pada Gambar 3.22, mencatatkan tren yang memerlukan perhatian khusus akibat adanya penurunan performa produksi. Berdasarkan data evaluasi tahun 2025, total produksi jambu mete berada di angka 385,68 ton, mengalami penyusutan sebesar 8,49% dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 421,44 ton. Penurunan ini tidak terlepas dari dinamika agroklimat yang kurang berpihak pada fase kritis tanaman, serta kondisi struktural lahan yang kian terdegradasi.



Berdasarkan curah hujan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, terdapat anomali cuaca yang mengganggu siklus biologis tanaman. Meskipun pada puncak kemarau di bulan Juli dan Agustus intensitas hujan tergolong rendah, tetapi terjadi lonjakan hari hujan yang sangat ekstrem pada bulan September dan Oktober, di mana rata-rata hari hujan mencapai 23,94 hari per bulan. Kondisi kelembapan yang sangat tinggi pada periode tersebut disinyalir menyebabkan pembusukan malai bunga dan kegagalan penyerbukan, sehingga volume buah yang berhasil terbentuk menjadi sangat terbatas.

Selain faktor iklim, kendala utama yang menghambat produktivitas jambu mete di Kabupaten Gunungkidul adalah masalah penuaan populasi pohon yang masif. Dari total luas areal 5.280,72 Ha, tercatat bahwa lahan yang berstatus Tanaman Tua/Rusak/Tidak Menghasilkan (TTR/TTM) mendominasi secara dominan sebesar 3.728,57 Ha, atau mencakup lebih dari 70% dari total luas lahan yang ada. Sementara itu, luas Tanaman Menghasilkan (TM) hanya tersisa 1.456,65 Ha. Hal ini diperburuk dengan angka kerusakan lahan pada tahun berjalan yang mencapai 80,99 Ha, yang secara langsung menggerus potensi output daerah.

Secara kewilayahan, meskipun sentra produksi seperti Kecamatan Ngawen dan Semin masih mampu memberikan kontribusi terbesar masing-masing sebesar 249,72 ton dan 121,60 ton, namun penurunan di wilayah lain menunjukkan gejala penurunan produktivitas yang sistemik. Dengan rendahnya angka peremajaan tanaman baru (TBM) yang hanya sebesar 95,50 Ha, tantangan ke depan adalah melakukan akselerasi replanting guna mengganti populasi pohon yang sudah tidak produktif. Kesimpulannya, penurunan kinerja produksi jambu mete di tahun 2025 merupakan dampak kombinasi dari gangguan iklim di fase pembungaan serta tingginya rasio tanaman tua yang sudah melewati masa produktif puncaknya.

Secara keseluruhan, fluktuasi kinerja pada subsektor tanaman hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2025 ini menunjukkan bahwa faktor agroklimat masih memegang peranan vital dalam menentukan keberhasilan produksi. Optimalnya masa kering untuk pembungaan pada beberapa komoditas kontras dengan hambatan intensitas hujan tinggi pada komoditas lainnya, yang diperparah dengan



adanya tantangan struktural berupa dominasi populasi tanaman tua. Dinamika ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko iklim serta percepatan program peremajaan tanaman guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan produktivitas pertanian daerah di masa mendatang.

3. **Faktor Pendukung Indikator Kinerja Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

Keberhasilan capaian produksi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari intervensi berbagai faktor pendukung yang menjadi stimulan utama di tingkat petani. Ketersediaan infrastruktur pendukung, kepastian alokasi serta efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, hingga modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas produktivitas lahan. Sebagai upaya untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung target kinerja daerah, bagian ini akan memaparkan secara terperinci mengenai tata kelola distribusi pupuk melalui jaringan distributor dan pengecer resmi, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2025 telah ditetapkan dengan dasar kebijakan nasional yang mengalami penyesuaian signifikan untuk mendukung ketahanan pangan. Adapun besaran alokasi pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Kapanewon	Jenis Pupuk (ton)		
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus
1	Gedangsari	1.127,00	633,00	-
2	Girisubo	669,00	353,00	-
3	Karangmojo	793,00	974,00	-
4	Ngawen	925,00	723,00	-
5	Nglipar	861,00	731,00	-
6	Paliyan	659,00	555,00	-
7	Panggang	611,00	429,00	-
8	Patuk	871,00	853,00	9,00
9	Playen	875,00	971,00	-
10	Ponjong	1.473,00	1.446,00	9,00
11	Purwosari	409,00	317,00	-
12	Rongkop	659,00	377,00	-
13	Saptosari	905,00	794,00	-



No	Kapanewon	Jenis Pupuk (ton)		
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus
14	Semanu	900,00	763,00	-
15	Semin	1.498,00	1.245,00	-
16	Tanjungsari	632,00	386,00	-
17	Tepus	628,00	256,00	-
18	Wonosari	868,00	645,00	-
Jumlah		15.363,00	12.451,00	18,00

Dapat dilihat dari table 3.6 bahwa terdapat 3 macam pupuk yang dialokasikan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025, yaitu urea, NPK, dan NPK dengan formulasi khusus. Urea memiliki alokasi tertinggi dengan 15.363 ton disusul dengan NPK dengan 12.451 ton. Kedua macam pupuk ini dialokasikan di seluruh kapanewon Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk NPK dengan formulasi khusus hanya dialokasikan di Kapanewon Patuk dan Kapanewon Ponjong. Untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh distributor kepada pengecer resmi (F5) di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat melalui tabel, sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor ke Pengecer Resmi (F5)

No	Kapanewon	Jenis Pupuk (ton)		
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus
1	Gedangsari	810,00	600,00	-
2	Girisubo	537,40	329,60	-
3	Karangmojo	527,00	858,00	-
4	Ngawen	773,00	688,50	-
5	Nglipar	609,00	697,00	-
6	Paliyan	500,00	527,00	-
7	Panggung	412,50	391,00	-
8	Patuk	605,00	845,00	-
9	Playen	664,00	886,00	-
10	Ponjong	1.111,00	1.429,00	-
11	Purwosari	282,00	289,00	-
12	Rongkop	602,50	353,00	-
13	Saptosari	753,70	751,40	-
14	Semanu	758,50	735,10	-
15	Semin	1.399,00	1.226,00	-
16	Tanjungsari	513,00	362,00	-
17	Tepus	564,00	241,50	-
18	Wonosari	553,00	598,00	-
Jumlah		11.974,60	11.807,10	0,00



Dari tabel 3.7 dari dilihat bahwa pupuk bersubsidi yang tersalurkan dari distributor ke pengecer resmi antara pupuk urea dengan NPK tidak berbeda jauh. Urea ada di angka 11.974,60 ton sedangkan NPK sebesar 11.807,10 ton. Sedangkan untuk NPK dengan formulasi khusus tidak ada penyaluran dari distributor ke pengecer resmi. Selanjutnya data terkait penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi/ kios ke petani (F6) dapat dicermati, sebagai berikut.

Tabel 3. 8 Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios ke Petani (F6)

No	Kapanewon	Jenis Pupuk (ton)		
		Urea	NPK	NPK Formula Khusus
1	Gedangsari	810,20	598,00	-
2	Girisubo	530,56	327,10	-
3	Karangmojo	522,03	930,15	-
4	Ngawen	716,05	674,80	-
5	Nglipar	589,78	676,94	-
6	Paliyan	488,50	512,25	-
7	Panggung	412,50	392,00	-
8	Patuk	601,45	846,28	-
9	Playen	658,53	886,48	-
10	Ponjong	1.094,04	1.427,38	-
11	Purwosari	264,88	273,92	-
12	Rongkop	601,26	353,80	-
13	Saptosari	753,75	751,40	-
14	Semanu	750,50	728,05	-
15	Semin	1.313,90	1.192,00	-
16	Tanjungsari	511,20	359,58	-
17	Tepus	553,47	229,32	-
18	Wonosari	544,90	596,50	-
Jumlah		11.717,48	11.755,93	0,00

Tabel 3.8 menunjukkan kuantitas penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi/ kios ke petani atau kelompok tani. Urea yang disalurkan sebanyak 11.717,48 ton sedangkan untuk NPK sebanyak 11.755,93 ton.

Distribusi pupuk bersubsidi masih dengan sistem tertutup, yaitu pelaksana pupuk subsidi dalam hal ini adalah PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) sebagai produsen menyalurkan pupuknya ke distributor, selanjutnya distributor menyalurkan pupuknya ke pengecer, terakhir pengecer menyalurkan ke petani baik penibusannya secara kolektif maupun mandiri. Penyaluran pupuk ke petani dengan



menggunakan kartu tani dan KTP (ipubers). Penyaluran dari kios pengecer ke petani mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Pupuk yang telah disalurkan dilakukan mekanisme verifikasi oleh tim verifikasi.

Sebagai bagian dari upaya menjamin keberlanjutan input produksi di tingkat petani, ketersediaan akses terhadap sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi, menjadi instrumen kebijakan yang sangat vital. Pengelolaan distribusi yang tepat sasaran dan tepat waktu didukung oleh jaringan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan koperasi. Untuk memberikan gambaran mengenai jangkauan pelayanan dan titik distribusi sarana produksi di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, berikut disajikan data infrastruktur pendukung yang meliputi daftar distributor resmi serta sebaran kios pengecer di tiap kapanewon sebagai berikut.

Tabel 3. 9 Daftar Distributor dan Pengecer

No	Distributor	Data Pengecer		
		Kapanewon	No	Nama Pengecer
1	CV. Kaneka Tani	Ponjong	1	Toko Tani Maju
			2	Toko Usaha Tani
		Semanu	1	Kios Handayani
			2	Kios Tani Mulyo
			3	KUD Bima
		Playen	1	Kios Alam Tani
			2	Toko Abdi Tani
			3	UD. Murni Rizki
2	KUD. Subur	Semin	1	Toko Bina Tani
			2	Toko Melia
		Ngawen	1	Kios Daniar
			2	Kios Prima Tani
			3	Kios Noto Tani
		Nglipar	1	Kios Moro Seneng
			2	UD. Mitra Kerja
3	KUD. Mekar	Girisubo	1	Kios Ngudi Rejeki
			2	UD. Mitra Tani
			3	UD. Sari Mulyo
		Tepus	1	CV. Dwi Manunggal
			2	Toko Sekar Abadi
		Rongkop	1	Kios Krista
			2	Toko Restu
		Saptosari	1	Toko Hadi Rukun
			2	Toko Purbo Winarto
4		Karangmojo	1	Kios Yayuk
			2	UD. Tani Makmur



No	Distributor	Data Pengecer		
		Kapanewon	No	Nama Pengecer
	CV. Wahyu Bintang Perkasa	Tanjungsari	1	Toko Sang Surya
			2	Kios Tani Wijaya
5	PT. PPI	Wonosari	1	UD. Setia Tani Dua
			2	UD. Mentes
		Panggang	1	Utama Jaya
			2	Sarana Tani
		Paliyan	1	Garuda Emas
			2	KUD Widodo
6	PT. Alam Raya	Gedangsari	1	CV. Galih Mulia
		Patuk	1	Toko Anugerah
		Patuk	2	Kios Konco Tani
		Purwosari	1	Kios " Sarindi "
		Purwosari	2	UD. " Arif "
		Purwosari	3	UD. " Barokah "

Berdasarkan tabel 3.9 di atas, terlihat bahwa rantai pasok sarana produksi di Kabupaten Gunungkidul telah terorganisir melalui pembagian wilayah kerja yang komprehensif oleh 6 distributor utama yang menjangkau seluruh kapanewon. Sinergi antara distributor besar, koperasi (KUD), dan kios pengecer lokal ini memastikan bahwa akses petani terhadap kebutuhan input pertanian, terutama pupuk, tetap terjaga dengan titik distribusi yang dekat dengan lahan garapan. Pola kemitraan yang tersebar merata dari wilayah utara hingga selatan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas indikator kinerja produksi komoditas pangan, hortikultura, dan perkebunan di tengah tantangan fluktuasi iklim tahun 2025.



Gambar 3. 23 Monev Pupuk Bersubsidi KPL Mitra Kerja



Gambar 3. 24 Monev Pupuk Bersubsidi KPL Daniar

Kedua gambar di atas memperlihatkan kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi yang di lakukan di dua kios yang berbeda. Efektivitas pengawasan distribusi pupuk ini merupakan salah



satu pilar pendukung indikator kinerja daerah. Namun, selain pemenuhan kebutuhan pupuk, upaya peningkatan produksi juga didorong melalui penyediaan sarana pendukung lainnya, seperti bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang akan dipaparkan pada bagian berikut.

Tabel 3. 10 Data Sarana Pertanian 2025

No	Jenis Sarana	Jumlah Berdasar Sumber Dana		Satuan
		APBD	APBN	
1	Traktor Roda Dua G3000ng		10	Unit
2	Traktor Roda Empat Iseki		9	Unit
3	Traktor Roda Crawler		1	Unit
4	Traktor R 4 AVR		4	Unit
5	Traktor R 4 ISA		9	Unit
6	Traktor R 4 MAVVI		6	Unit
7	Combain Harvester		3	Unit
8	Power Tresher	2	5	Unit
9	Handsprayer Elektrik	6	101	Unit
10	Pompa Air 3 Inci		13	Unit
11	Rice Transplanter		7	Unit
12	Cultivator	21		Unit
13	Mesin Perajang Tembakau	7		Unit
14	Pengembangan Desa B2SA	15		Desa
15	KRPL	6		kelompok
16	Pengembangan Pekarangan Pangan Sekolah	5		sekolah
17	Magang Usaha Tani	7		kelompok
18	Sekolah Lapang Tematik	18		BPP
19	Layanan Operasional BPP	18		BPP
20	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat	2		LPM
21	Pelatihan Budidaya Bawang Merah	22		kelompok
22	Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	39		kelompok
23	Pelatihan Budidaya Cabai	2		kelompok
24	Pelatihan Budidaya Jagung	3		kelompok
25	Pengendalian Hama Tikud (Tyto alba)	12		kelompok
Jumlah		107	168	278

Berdasarkan tabel 3.10, selama tahun 2025 Dinas Petanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul setidaknya sudah melakukan penyaluran sarana pertanian sebanyak 278 unit kepada kelompok tani baik melalui dana APBN maupun APBD. Tahun 2025, sarana pertanian yang bersumber dana APBN sebanyak 168 unit, sedangkan sarana pertanian bersumber dana APBD sebanyak 107 unit. Berikut salah satu dokumentasi penyerahan sarana pertanian berupa alsintan cultivator yang



dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul bersama dengan Bupati Gunungkidul.



Gambar 3. 25 Penyerahan Cultivator DBHCHT bersama Bupati Gunungkidul

Gambar 3.25 merupakan dokumentasi penyerahan salah satu sarana pertanian berupa cultivator melalui dana DBHCHT. Kehadiran berbagai sarana pertanian ini diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mempercepat proses persiapan lahan, sehingga intensitas tanam serta produktivitas komoditas unggulan daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Selain sarana, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul juga menyalurkan bantuan berupa prasarana kepada kelompok tani. Prasarana yang dimaksud dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut.

Tabel 3. 11 Data Prasarana Pertanian 2025

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Sumur DBHCHT	1	Unit
2	Sumur DAU	12	Unit
Jumlah		13	Unit

Berdasar tabel 3.11, prasarana yang dibangun pada tahun 2025 hanya jenis sumur atau pengembangan sumber air. Tahun 2025 pembangunan sumur terdapat 2 sumber dana, yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan jumlah 13 unit. Berikut dokumentasi pembangunan salah satu sumur.



Gambar 3. 26 Pembangunan Sumur DBHCHT 2025

Gambar 3.26 merupakan pembangunan sumber air atau sumur dengan sumber dana DBHCHT pada tahun 2025. Diharapkan dengan adanya pembangunan prasarana pertanian dapat menunjang pendistribusian sarana pertanian sehingga dapat memicu peningkatan produksi tanaman di kemudian hari.

Selain dari pengembangan sarana dan prasarana pertanian, faktor pendukung keberhasilan dalam pertanian adalah dari sumber daya manusianya. Dinas Pertanian dan Pangan sampai dengan tahun 2025 masih masih menaungi secara penuh para penyuluh pertanian sebagai motor penggerak pendampingan petani di lapangan. Tetapi, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, telah ditetapkan kebijakan strategis mengenai pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.

Proses transisi ini dilakukan secara bertahap mulai pertengahan tahun 2025, dengan ketetapan resmi pengalihan status menjadi ASN Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian) yang diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026. Peralihan ini menandai penerapan kebijakan satu komando yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi pembangunan infrastruktur serta standarisasi kualitas pelayanan penyuluhan secara nasional, meskipun secara operasional di lapangan, para penyuluh tetap bersinergi erat dengan program-program



pembangunan pertanian di Kabupaten Gunungkidul. Namun, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul masih akan berkoordinasi secara intensif dengan penyuluh pertanian untuk menciptakan pertanian Gunungkidul yang maju dan makmur.

Meskipun terjadi transisi status kepegawaian penyuluh pertanian ke Pemerintah Pusat, fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap kelembagaan petani di Kabupaten Gunungkidul tetap menjadi prioritas utama. Salah satu indikator keberhasilan tugas penyuluh adalah melalui pembinaan kelompok tani menuju kemandirian ekonomi. Keberhasilan penambahan jumlah kelompok yang mulai menerapkan sistem agribisnis terpadu, khususnya dengan peningkatan status menjadi Kelas Kelompok Utama, menjadi bukti nyata efektivitas pendampingan tersebut. Capaian ini diharapkan tidak hanya sekadar angka administratif, namun dapat terus berkembang dalam meningkatkan skala usaha serta kesejahteraan seluruh anggota kelompok dan masyarakat di sekitarnya secara berkelanjutan.

Salah satu cara untuk meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani yaitu dengan melakukan pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan klasifikasi kemampuan kelompok tani. Tujuan pembinaan kelas kelompok tani adalah untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan anggota kelompok tani terhadap kemampuan kelompoknya dan meningkatkan klasifikasi kemampuan kelompok tani.

Strategi peningkatan kelas kemampuan kelompok tani yang telah dilakukan melalui pembinaan dari para penyuluh yang ada di 18 BPP di tiap kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui pembinaan berupa pengembangan sumberdaya manusia (SDM), pengembangan modal, pengembangan usaha, dan pengembangan kelembagaan usaha.

Penilaian kelas kemampuan kelompok tani rutin dilaksanakan setiap tahun. Sesuai pedoman pelaksanaannya, penilaian kelas kemampuan kelompok tani akan dilaksanakan di bulan September setiap tahun. Tujuan penilaian kelas kemampuan kelompok tani antara lain adalah, sebagai berikut.

- a. Mengetahui kemampuan kelompok tani yang ditinjau dari berbagai aspek,



- b. Menyediakan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan petani,
- c. Mengetahui metodologi dan pemetaan kebutuhan penyuluhan pada masing-masing kelas kemampuan kelompok tani,
- d. Menyediakan informasi yang lengkap dalam database kelompok tani melalui SIMLUHTAN,
- e. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani, dan
- f. Sebagai dasar pemilihan metode/ strategi pembinaan kelompok tani sesuai kelas kemampuannya.

Jumlah peningkatan kapasitas SDM penyuluh diukur melalui peningkatan kompetensi SDM penyuluh pertanian. Keberhasilan dalam membina kelompok didukung oleh lingkungan strategis dalam pengembangan SDM pertanian meliputi:

- a. Keberadaan lembaga-lembaga penyuluhan pertanian di daerah yang mendukung pelaksanaan pengembangan SDM Pertanian seperti: Bakorluh, Bapelluh, Kelembagaan yang menangani penyuluhan, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan Kelompok tani (Poktan),
- b. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah seperti Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya, dan P3K Penyuluh,
- c. Dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian. Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.



Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (*vocational training*), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru. Oleh sebab itu langkah-langkah konkret perlu dilakukan dengan mengenalkan remaja usia sekolah di mulai dari sekolah menengah tentang dunia pertanian yang menguntungkan dan menyenangkan. Upaya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan generasi muda yang kompeten, yang diharapkan mampu menciptakan peluang kerja di tingkat lapangan, baik sebagai petani maju atau wirausahawan muda pertanian.

Korporasi petani dibangun melalui pemberdayaan petani dengan mengkonsolidasikan petani dalam suatu kelembagaan petani (kelompok/gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) diharapkan meningkatkan skala usaha petani karena tergabung dalam kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 80 mengamanatkan Kelembagaan Ekonomi Petani dapat berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis



Korporasi Petani, menyatakan bahwa korporasi petani merupakan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kepemilikan modal petani yang besar ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, skala ekonomi, daya saing, pendapatan petani dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Keberhasilan dalam mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen untuk membangun sektor pertanian. Adapun kondisi semakin menuanya petani dan semakin menurunnya minat usia muda terjun ke bidang pertanian tentu saja akan menambah persoalan klasik SDM pada bidang pertanian selama ini. Ada beberapa upaya pemerintah dalam melakukan regenerasi petani dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui program-program yang dirumuskan Kementerian Pertanian yang mendorong lahirnya satu juta petani milenial setiap tahunnya (Kementan RI, 2020). Milenial merupakan sebutan untuk generasi muda di era teknologi modern ini. Bentuk komitmen pemerintah dalam melahirkan jutaan petani milenial tersebut mendorong BPPSDMP menetapkan tiga ciri generasi petani milenial dimana petani milenial berusia 19-39 tahun, memiliki jiwa milenial, bersifat adaptif terhadap teknologi digital, dan tentunya memiliki jaringan kerjasama usaha

Sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas sebagai pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun sistem pertanian. Pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui pelaksanaan kegiatan tersebut didukung Sumber Daya Pertanian sebagai berikut.

Tabel 3. 12 Sumber Daya Pertanian 2025

No	Jenis Data	Jumlah
1	Penyuluh PNS	48 orang
2	Penyuluh Pertanian (P3K)	49 orang
3	Penyuluh Pertanian Swadaya	144 orang
4	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	144 kelompok
5	Kelompok Tani (Poktan)	3.467 kelompok
6	Petani	175.501 orang



Tabel 3.12 merupakan rincian data dais umber daya manusia pertanian yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Untuk angka kelompok tani mengalami penambahan setidaknya 37 kelompok dari tahun 2024. Hal ini tentunya seiring dengan bertambahnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani yang meningkat sebanyak 1.016 individu dari tahun 2024.

Selain dukungan melalui pendampingan penyuluh, terdapat instrumen strategis yang memiliki andil besar dalam pengembangan komoditas sekaligus penguatan kapasitas SDM di Kabupaten Gunungkidul, yaitu melalui pemanfaatan DAK Non Fisik. Berbeda dengan bantuan fisik, alokasi ini difokuskan pada penguatan ekosistem pertanian dari sisi manajerial dan teknis lapangan, yang terbagi ke dalam Urusan Pangan dan Urusan Pertanian. Melalui program ini, pemerintah daerah melakukan intervensi mulai dari penguatan stok pangan di tingkat lumbung, edukasi konsumsi pangan berkualitas (B2SA), hingga modernisasi metode penyuluhan di 18 BPP melalui Sekolah Lapang dan program Magang Usaha Tani. Rincian aktivitas dan sasaran penerima manfaat dari kegiatan DAK Non Fisik tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 13 Kegiatan dan Aktivitas DAK Non Fisik 2025

No	Kegiatan	Aktivitas	Penerima Manfaat
Urusan Pangan			
1	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat	Pelatihan Manajemen Stok	Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Manunggal, Karangmojo Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Sahabat, Ponjong
		Pelatihan Pemasaran dan Keuangan	
		Studi Tiru LPM	
2	Pengembangan Desa B2SA	Kebun B2SA	15 TP PKK di 3 Kapanewon (Karangmojo, Ponjong, Saptosari)
		Bantuan Sarana Pengolahan Pangan	
		Sosialisasi B2SA	
		Bimtek B2SA	
Urusan Pertanian			
3	Layanan Operasional BPP	Pengumpulan dan pengelolaan data informasi	Penyuluh dan petani binaan 18 BPP
		Koordinasi dan penyusunan rencana kerja	



No	Kegiatan	Aktivitas	Penerima Manfaat
		Supervisi Gerakan Pembangunan Pertanian	
		Klinik Konsultasi Agribisnis	
		Temu Usaha	
4	Sekolah Lapang Tematik	Sosialisasi	Penyuluh dan petani binaan 18 BPP
		Rembug tani	
		kursus tani	
		Farm Field day (FFD)	
		Pengawalan dan Pendampingan	
5	Magang Usaha Tani bagi Petani di P4S	Pelatihan di P4S	Penyuluh dan petani binaan BPP Tepus, BPP Karangmojo, BPP Wonosari, BPP Semanu, BPP Ponjong, BPP Tanjungsari, dan BPP Playen
		Studi Tiru	

Pada tabel 3.13, terlihat bahwa implementasi DAK Non Fisik di Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 diarahkan secara terpadu untuk menyentuh dua aspek utama, yaitu urusan pangan dan urusan pertanian sebagai berikut.

Secara struktural, kegiatan DAK Non Fisik ini mencakup intervensi hulu hingga hilir yang berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada urusan pangan, program difokuskan pada penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Karangmojo dan Ponjong melalui pelatihan manajemen stok dan keuangan, serta pengembangan Desa B2SA di 3 Kapanewon (Karangmojo, Ponjong, Saptosari) untuk mendorong kemandirian pangan tingkat rumah tangga. Sementara itu, pada urusan pertanian, anggaran dialokasikan secara intensif untuk optimalisasi layanan operasional di 18 BPP, penyelenggaraan Sekolah Lapang Tematik, serta program Magang Usaha Tani bagi petani di P4S yang tersebar di wilayah Tepus, Karangmojo, Wonosari, Semanu, Ponjong, Tanjungsari, hingga Playen. Serangkaian aktivitas ini, mulai dari bimbingan teknis hingga *Farm Field Day* (FFD), menjadi instrumen krusial dalam memastikan terjadinya transfer teknologi dan peningkatan kompetensi manajerial petani guna mendukung keberlanjutan produksi pertanian daerah. Untuk melihat lebih



jelas bagaimana situasi di lapangan, berikut adalah dokumentasi dari beberapa kegiatan DAK Non Fisik yang sudah terlaksana, mulai dari pelatihan di lumbung pangan sampai praktek langsung para petani di lapangan.



Gambar 3. 27 Rangkaian Aktivitas dalam Kegiatan DAK NF 2025

Serangkaian foto pada gambar 3.27 merupakan aktivitas yang ada dalam kegiatan DAK NF. Berbagai aktivitas itu antara lain, temu usaha tani, rembug tani, studi tiru manajemen stok dan kemasan, panen kebun B2SA, *Farm Field Day* (FFD), dan pelatihan magang usaha P4S.

Selain dukungan dari dana pusat melalui DAK Non Fisik, faktor pendukung lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Gunungkidul adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD di sektor ini bukan sekadar mengejar angka, melainkan menjadi indikator bahwa aset-aset pertanian daerah telah dikelola secara optimal dan memberikan nilai tambah. Penopang utama



capaian PAD ini bersumber dari optimalisasi layanan dan unit produksi yang dikelola oleh UPT Balai Benih, UPT Taman Teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran, serta pemanfaatan sarana prasarana di tingkat BPP. Melalui penyediaan benih berkualitas, layanan jasa teknologi pertanian, hingga penyewaan alat dan lahan, unit-unit ini berperan ganda: sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus penyedia sarana produksi yang terjangkau bagi petani lokal.

Sebagai salah satu dari pengelola sumber PAD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, UPT Balai Benih Pertanian memiliki lokasi penangkaran benih padi seluas 0,8 hektare. Pada musim hujan pertama tahun 2024/2025, UPT Balai Benih Pertanian menangkarkan benih padi varietas inpari 32 dan segreng handayani dengan jumlah benih sumber (label kuning) sebanyak 5 kg hasil pembinaan dan pendampingan dari Pemulia Tanaman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada musim tanam musim hujan (MH) 2 dan musim kemarau (MK) UPT Balai Benih Pertanian menangkarkan benih padi varietas segreng handayani dengan memproduksi dua kelas benih yaitu benih dasar (label putih) dan benih pokok (label ungu). Pada musim kemarau, terjadi keterbatasan air untuk irigasi, tetapi dengan adanya subur bor, lahan yang dapat dikelola untuk menangkarkan benih kurang lebih seluas 0,6 hektare. Pada musim hujan pertama tahun 2025/2026 menangkarkan padi varietas inpari 32 dan segreng handayani.

UPT Balai Benih Pertanian pada tahun 2025 ini dapat merealisasikan PAD dengan besaran mencapai Rp130.842.000,00. Dengan pagu PAD sebesar Rp104.013.000,00, UPT Balai Benih Pertanian sudah melampaui target PAD sebesar 125,79%.

Penyokong PAD lainnya adalah UPT Taman Teknologi Petanian (TTP) Nglanggeran. Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran pada awalnya merupakan salah satu Taman Sains Pertanian / Taman Teknologi Pertanian yang dibangun oleh Badan Litbang Pertanian, hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Nawa Cita yang diusung oleh pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran maka Unit Kerja TTP Nglanggeran menjadi UPT Taman Teknologi Pertanian



Nglanggeran di bawah garis komando Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Kakao menjadi salah satu komoditas utama yang ada di daerah Nglanggeran, maka dari itu UPT TTP Nglanggeran hadir untuk menjadi wadah bagi para warga dalam mengoptimalkan pemanfaatan kakao. Dengan adanya UPT TTP Nglanggeran, maka warga melakukan proses fermentasi coklat. Banyaknya tanaman kakao yang tumbuh disekitar wilayah Nglanggeran, dan adanya ternak Kambing PE menjadi wadah bagi masyarakat Nglanggeran untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkannya, dengan memproduksi produk-produk yang berbasis coklat dan susu Kambing PE, termasuk di dalamnya terdapat pabrik kecil yang menjadi tempat produksi bagi kedua komoditas tersebut.

Dukungan fasilitas yang ada di UPT TTP Nglanggeran antara lain gedung TTP dan fasilitas pendukungnya (taman, menara pandang), pabrik pengolahan (coklat dan susu), gerai coklat, alsintan dan mesin olahan coklat, lahan usaha kakao, lahan pembibitan kakao, ruang pelatihan pengolahan dan produksi, pusat desain, demplot dan kantor bersama, percontohan produksi, pusat layanan bisnis pertanian dan wisata.

Optimalisasi peran UPT TTP Nglanggeran sebagai pusat keunggulan teknologi kakao dan ternak Kambing PE telah memberikan kontribusi nyata terhadap nilai tambah produk serta pendapatan daerah. Namun demikian, keberhasilan di tingkat unit pelaksana teknis ini tetap perlu disandingkan dengan evaluasi komprehensif terhadap kondisi makro pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam upaya mencapai target kinerja pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi beberapa kendala fundamental di lapangan. Faktor penghambat utama meliputi dominasi pola pertanian konvensional yang belum memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan petani, serta belum maksimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada daya saing produk. Selain itu, tantangan regenerasi petani akibat belum optimalnya rencana penumbuhan minat generasi muda, tingginya laju alih fungsi lahan, serta karakteristik tenaga kerja yang didominasi usia non-produktif dengan tingkat pendidikan



rendah menjadi hambatan yang secara langsung memengaruhi capaian produksi daerah.

Menyikapi berbagai hambatan tersebut, telah disusun langkah-langkah strategis untuk memastikan sasaran tetap tercapai. Fokus utama dilakukan melalui transformasi sistem pertanian tradisional menuju pertanian modern berbasis mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi usaha tani. Strategi ini dibarengi dengan pendampingan intensif penerapan teknologi tepat guna, penggunaan bibit unggul, serta penerapan sistem pemupukan berimbang. Selain itu, penguatan kelembagaan dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan terus ditingkatkan, dengan tetap mempertimbangkan aspek perubahan iklim dalam setiap perencanaan program.

Di sisi lain, keberhasilan pencapaian sasaran didukung oleh kolaborasi yang solid dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Faktor pendukung krusial dalam pelaksanaan program tahun ini adalah adanya sinergi anggaran yang kuat melalui integrasi dana APBD, Dana Keistimewaan, maupun APBN. Dukungan ini semakin optimal berkat koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan serta kapasitas SDM aparatur pelaksana yang kompeten di bidangnya.

Selain aspek manajerial, keberhasilan teknis di lapangan juga didorong oleh penyediaan benih bersertifikat dan sarana prasarana yang memadai. Penerapan *Good Agriculture Practice* (GAP) yang konsisten, kesiapsiagaan dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta penanganan pascapanen yang terstandarisasi menjadi kunci terjaganya kualitas produksi. Pendampingan berkelanjutan dari petugas lapangan serta pelayanan manajemen kesekretariatan yang berkualitas memastikan seluruh rangkaian kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Gunungkidul berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

4. Sasaran Strategis Ketahanan Pangan Meningkat

Berdasarkan sajian data capaian kinerja yang telah dipaparkan pada Tabel 3.2 hingga Tabel 3.5 di bagian sebelumnya, terlihat adanya korelasi positif antara alokasi sumber daya dengan progres capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih



komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program kerja tersebut, bagian ini akan mengulas secara mendalam mengenai analisis capaian kinerja pada sasaran meningkatnya ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul selama tahun anggaran 2025. Guna memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai keberhasilan capaian pada sasaran ini, berikut disajikan tabel ringkasan realisasi indikator kinerja utama Ketahanan Pangan tahun 2025.

Tabel 3. 14 Ringkasan Capaian Indikator Ketahanan Pangan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Skor PPH Konsumsi	Indeks	90,10	98,40	109,21%	Sangat Tinggi
Penurunan Konsumsi Beras	Kg/Kap/Th	74,00	84,20	113,78%	Sangat Tinggi
Penanganan Kerawanan Pangan	Persen	100,00	100,00	100%	Sangat Tinggi
Persentase Pangan Segar Aman	Persen	100,00	108,70	108,70%	Sangat Tinggi

Secara umum, realisasi kinerja pada sasaran meningkatnya ketahanan pangan menunjukkan hasil yang sangat signifikan dengan seluruh indikator kinerja masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Capaian utama terlihat pada Skor PPH Konsumsi yang berhasil menyentuh angka 98,4, melampaui target yang ditetapkan sebesar 90,10. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 91,4, lonjakan ini merefleksikan keberhasilan daerah dalam meningkatkan kualitas keragaman konsumsi pangan masyarakat secara konsisten.

Sejalan dengan hal tersebut, keberhasilan juga terlihat pada indikator Penurunan Konsumsi Beras yang terealisasi sebesar 84,20 kg/kapita/tahun, mencapai 113,78% dari target awal. Capaian ini menunjukkan efektivitas program diversifikasi pangan dalam mengubah pola konsumsi masyarakat menuju sumber pangan yang lebih bervariasi.

Selain itu, dua indikator program lainnya yakni Persentase Penanganan Kerawanan Pangan dan Persentase Pangan Segar Aman juga memberikan kontribusi yang maksimal. Keduanya berhasil mencapai target dengan realisasi masing-masing sebesar 100% dan 108,70%. Secara keseluruhan, integrasi antara pemenuhan standar keamanan



pangan dan stabilitas penanganan kerawanan telah menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2025.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkesinambungan, berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, maka implementasi pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Ketersediaan pangan yang cukup dan merata;
- b. Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta
- c. Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Skor PPH menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, dimana semakin beragam, semakin tinggi pula skor PPH nya. Nilai maksimal untuk skor PPH ideal adalah 100. Berikut rincian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

Tabel 3. 15 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			AKE Kkal/ Kapita	% AKE Ideal	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor PPH Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	277,94	1102,86	50,0	52,52	0,5	25,0	26,26	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	62,13	78,07	6,0	3,72	0,5	3,0	1,86	2,5	1,86
3	Pangan Hewani	110,72	242,31	12,0	11,54	2,0	24,0	23,08	24,0	23,08
4	Minyak dan Lemak	33,22	299,06	10,0	14,24	0,5	5,0	7,12	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	7,53	40,90	3,0	1,95	0,5	1,5	0,97	1,0	0,97
6	Kacang-kacangan	43,79	123,04	5,0	5,86	2,0	10,0	11,72	10,0	10,0
7	Gula	40,30	145,81	5,0	6,94	0,5	2,5	3,47	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	298,40	168,73	6,0	8,03	5,0	30,0	40,15	30,0	30,0
9	Lain-lain	81,31	47,86	3,0	2,28	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Total	955,34	2.248,65	100,0	107,08		101,0	114,63	100,0	98,41

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 berdasarkan hasil analisis data Susenas BPS 2025 sebesar 98,41 seperti terlihat dalam Tabel 3.15. Skor PPH tahun 2025 ini naik cukup signifikan



dibandingkan skor PPH tahun 2024, yaitu 91,4. Capaian skor PPH konsumsi Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan, kemungkinan dipengaruhi antara lain karena inflasi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 relatif terkendali, ketersediaan pangan dan distribusi baik/lancar, tingkat kemiskinan turun (tahun 2024 angka kemiskinan Gunungkidul 15,18%, tahun 2025 turun menjadi 14,15%). Selain itu skor PPH juga dipengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat, dimana pola konsumsi ini sangat ditentukan oleh faktor sosial ekonomi, seperti tingkat pendapatan, harga pangan, selera dan kebiasaan makan.

Untuk menilai kuantitas konsumsi pangan masyarakat digunakan parameter tingkat kecukupan gizi, atau bisa dilihat dari %AKE dan %AKP, dimana tingkat kecukupannya apakah sudah melebihi standar atau masih dibawah standar kecukupan yang diharapkan. Rincian konsumsi energy per hari dan konsumsi protein per hari dapat dilihat ada tabel, sebagai berikut.

Tabel 3. 16 Tingkat Kecukupan Gizi Konsumsi Pangan Penduduk Gunungkidul Tahun 2025

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Gram/ Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	1102,86	50,0	52,52	24,48	44,1	42,9
2	Umbi-umbian	78,07	6,0	3,72	,83	0,9	1,5
3	Pangan Hewani	242,31	12,0	11,54	19,42	27,2	34,1
4	Minyak dan Lemak	299,06	10,0	14,24	,01	0,0	0,0
5	Buah/Biji Berminyak	40,90	3,0	1,95	,47	0,8	0,8
6	Kacang-kacangan	123,04	5,0	5,86	10,09	14,3	17,7
7	Gula	145,81	5,0	6,94	,99	0,6	1,7
8	Sayur dan Buah	168,73	6,0	8,03	5,97	8,6	10,5
9	Lain-lain	47,86	3,0	2,28	2,47	3,6	4,3
	Total	2.248,65	100,0	107,08	64,74	100,0	113,5

Tingkat kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk Gunungkidul tahun 2025 terlihat pada Tabel 3.16. Total konsumsi energi Kabupaten Gunungkidul sebesar 2.248 kkal/kap/hari dengan tingkat kecukupan energi (%AKE) sebesar 107,08%, melebihi standar AKE rata-rata yang dianjurkan (2.100 kkal/kap/hari), tetapi masih dalam kategori normal (90-119% dari AKE standar). Sedangkan total konsumsi protein penduduk Gunungkidul sebesar 64,7 gram/kap/hari dengan tingkat kecukupan protein (%AKP) sebesar 113,5%, melebihi dari standar AKP rata-rata yang dianjurkan (57 gram/kap/hari), tetapi masih dalam kategori normal (90-119% dari AKP standar). Konsumsi energi didominasi dari kelompok padi-



padian sebesar 1.102,86 kkal/kapita/hari dengan angka kecukupan energi (AKE) sebesar 52,52%, kemudian minyak dan lemak sebesar 299,06 kkal/kapita/hari dengan AKE 14,24%. Sedangkan kontribusi konsumsi protein terbesar juga berasal dari kelompok pangan padi-padian sebesar 24,48 gram/kapita/hari dengan angka kecukupan protein (AKP) sebesar 42,9%, kemudian baru kelompok pangan hewani sebesar 19,42 gram/kapita atau AKP 34,1%. Pada tabel terlihat bahwa mayoritas protein berasal dari sumber nabati, menunjukkan ketergantungan pada bahan pangan nabati. Tingkat konsumsi pangan hewani (protein hewani) masyarakat Gunungkidul relatif masih kurang.

Berdasarkan hasil analisis konsumsi energi, protein, dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), struktur konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Gunungkidul masih menunjukkan dominasi kelompok padi-padian, sementara kontribusi kelompok sayur, buah, dan umbi-umbian belum sepenuhnya mencapai proporsi ideal. Kondisi ini menjadi dasar perumusan arah intervensi program diversifikasi pangan di tingkat rumah tangga.

Dalam konteks tersebut, Neraca Bahan Makanan (NBM) digunakan sebagai instrumen perencanaan untuk memastikan ketersediaan pangan daerah secara agregat. Analisis skor PPH dan NBM dibaca secara komplementer, di mana NBM memberikan gambaran kecukupan pasokan pangan, sedangkan skor PPH menilai kualitas pola konsumsi. Pada laporan ini, NBM tidak disajikan secara rinci karena fokus pembahasan diarahkan pada capaian kinerja dan pelaksanaan program.

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan situasi ketersediaan pangan individu.



Dalam rangka mendukung perbaikan pola konsumsi tersebut, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebanyak 6 paket dengan sasaran 6 Kelompok Wanita Tani (KWT). Bantuan yang diberikan berupa hibah barang berupa rumah bibit dan sarana pertanian pendukung, antara lain pupuk, bibit tanaman sayuran, serta alat pertanian sederhana. Pelaksanaan KRPL tahun 2025 difokuskan pada penguatan ketersediaan pangan nabati, khususnya sayur dan tanaman pekarangan, sebagai langkah awal diversifikasi pangan berbasis rumah tangga.



Gambar 3. 28 Kegiatan Kawasan Pekarangan Pangan Lestari (KRPL) 2025

Gambar 3.28 di atas merupakan dokumentasi kegiatan KRPL. Pada tahap ini, kegiatan KRPL belum mencakup pengembangan sumber protein hewani. Oleh karena itu, kontribusi KRPL terhadap peningkatan konsumsi protein hewani dan perbaikan skor PPH pada kelompok pangan hewani belum dapat terlihat secara langsung pada tahun berjalan. Namun demikian, pelaksanaan KRPL Tahun 2025 diharapkan menjadi fondasi awal bagi pengembangan kawasan pangan rumah tangga yang lebih terpadu pada tahun berikutnya, termasuk potensi pengembangan ke arah sumber protein hewani skala rumah tangga, sehingga secara bertahap dapat mendukung peningkatan kualitas pola konsumsi pangan masyarakat.

Selain skor PPH, keamanan dan mutu pangan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Selain menjamin ketersediaan dan akses pangan, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pangan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kelayakan. Hal ini menjadi penting mengingat pangan segar dan pangan siap konsumsi banyak



diperoleh masyarakat melalui berbagai saluran distribusi, terutama pasar tradisional dan pelaku usaha pangan lokal.

Pengambilan sampel pangan dilakukan pada seluruh rantai peredaran pangan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, meliputi pasar tradisional (Pasar Playen dan Pasar Nglipar), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Wonosari 2 dan SPPG Tepus), kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT), serta lokasi produksi dan distribusi pangan lainnya. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena merupakan titik utama peredaran dan penyediaan pangan segar yang banyak diakses oleh masyarakat sehari-hari, terutama untuk SPPG yang menasar pada sasaran tertentu, seperti anak-anak dan ibu hamil, yang memerlukan perhatian lebih terhadap keamanan dan mutu pangan.

Jenis sampel yang diuji mencakup berbagai sayuran dan buah-buahan hortikultura, antara lain sayuran daun seperti bayam, kangkung, sawi, dan selada; sayuran buah seperti cabai, tomat, terong, dan mentimun; serta komoditas buah-buahan yang umum dikonsumsi masyarakat. Sampel tersebut mewakili pangan segar asal tumbuhan yang diproduksi dan dipasarkan secara lokal, baik dari hasil pertanian masyarakat maupun dari pelaku usaha pangan.

Pelaksanaan pengujian dan pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa pangan segar yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, sekaligus sebagai sarana pembinaan bagi pelaku usaha dan kelompok pengelola pangan. Secara umum, kegiatan ini mendukung upaya perlindungan konsumen dan menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan pangan daerah agar ketersediaan pangan yang ada dapat dimanfaatkan masyarakat secara aman dan layak konsumsi.

Uji laboratorium bahan pangan segar dilakukan untuk mengetahui cemaran kandungan pestisida yang ada sayuran dan buah-buahan. Uji kandungan cemaran yang dilakukan dengan menggunakan metode spesifikasi kromatografis lapis tipis digunakan untuk mengetahui ada tidaknya cemaran karbamat, organoklorin dan organofosfat pada sayur atau buah. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama buah dan sayur. Apabila masuk ke dalam tubuh bersama dengan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang melebihi batas maksimal, pestisida ini dapat menimbulkan



keracunan karena bersifat sebagai racun saraf. Oleh sebab itu, penggunaan pestisida ini dalam sektor pertanian diawasi dengan ketat agar keracunan akibat penggunaan pestisida ini dapat ditekan. Dampak penggunaan terhadap lingkungan tidak terlalu bahaya karena pestisida ini persistensi dalam tanah. Dalam tanah residu pestisida ini hilang atau terurai. Berbagai faktor yang menyebabkan residu pestisida ini hilang atau terurai meliputi pencucian, pelapukan, penguapan, dan enzimatis.

Upaya lain dalam mendukung keamanan pangan dilakukan melalui penerapan dan penguatan regulasi daerah dan nasional di bidang keamanan pangan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Regulasi ini menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penjaminan keamanan pangan di daerah, meskipun pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan kegiatan sosialisasi secara khusus.

Dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan, Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Peraturan ini mengatur berbagai aspek penjaminan keamanan PSAT, termasuk mekanisme pendaftaran pangan segar asal tumbuhan sebagai salah satu instrumen untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi produsen.

Permentan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan segar asal tumbuhan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, serta mendorong pelaku usaha agar menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT diwajibkan memenuhi persyaratan keamanan pangan, antara lain memastikan bahwa pangan segar tidak mengandung cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang melebihi ambang batas, serta tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya. Berikut adalah contoh Dokumen NIB dan Registrasi PSAT.



Gambar 3. 29 Contoh Dokumen NIB dan Registrasi PSAT

Sampai dengan tahun 2025, terdata baru 14 izin edar sudah diterbitkan untuk pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan baik milik perorangan atau milik poktan/gapoktan. Angka ini sudah mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang tadinya hanya 10 izin edar. Untuk mendapatkan perizinan berusaha registrasi PSAT-PDUK, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) seperti yang ada pada Gambar 3.29. Pelaku usaha PSAT mikro kecil dapat mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi OSS: <https://oss.go.id> dengan memilih kelompok usaha yang dimiliki disesuaikan dengan Kriteria Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk Registrasi PSAT-PDUK. Berikut uraian Klasifikasi Lapangan Usaha Baku Indonesia (KBLI).

No KBLI	Uraian
01630	Jasa Pasca Panen
47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/ supermarket/ hypermarket
47211	Perdagangan eceran padi dan palawija
47212	Perdagangan eceran buah-buahan
47213	Perdagangan eceran sayuran
47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
47241	Perdagangan eceran beras
10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran
10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras
10632	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung)
10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan



Elemen-elemen penanganan yang baik pangan segar asal tumbuhan terdiri dari unsur lokasi (5 persyaratan), Bangunan dan Fasilitas Bangunan Penyimpanan (27), Fasilitas Sanitasi (18), Mesin dan Peralatan dan Sarana Pendukung (7), Bahan (3), Pengawasan Proses (2), produk akhir (3), Karyawan (7), Pengemas (2), Label dan Keterangan Produk (4), Penyimpanan (6), Pemeliharaan dan Program Sanitasi (9), Pengangkutan (5), Dokumen dan Pencatatan (4), Pelatihan (1), dan Pemenuhan persyaratan ekspor untuk izin rumah pengemasan (1) dengan total 104 jumlah persyaratan.

Upaya penguatan keamanan dan mutu pangan menjadi fondasi penting dalam mencegah terjadinya kerawanan pangan. Pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, penerapan standar keamanan pangan, serta pembinaan pelaku usaha diarahkan untuk memastikan pangan yang beredar aman, layak konsumsi, dan bermutu. Namun demikian, terpenuhinya aspek keamanan pangan saja belum sepenuhnya menjamin kondisi ketahanan pangan masyarakat, karena kerawanan pangan juga dipengaruhi oleh faktor ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.

Keamanan dan mutu pangan merupakan prasyarat penting dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian, terpenuhinya aspek keamanan pangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ketahanan pangan wilayah, karena kerawanan pangan juga dipengaruhi oleh faktor ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Oleh karena itu, selain pengawasan keamanan pangan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan pemantauan kerawanan pangan secara komprehensif melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

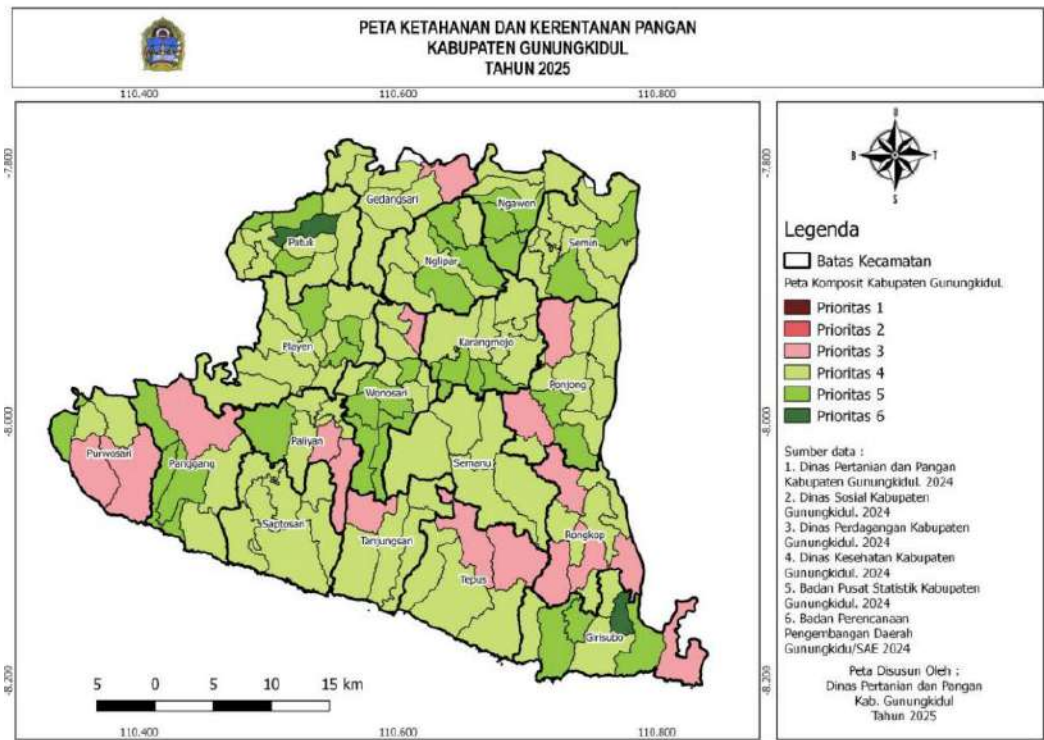
Berdasarkan hasil SKPG Tahun 2025, penilaian kerawanan pangan dilakukan dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu aspek ketersediaan pangan, akses pangan, serta pemanfaatan pangan dan gizi. Hasil penghitungan skor menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul secara umum berada pada kondisi relatif aman. Sebanyak 128 kalurahan memperoleh skor 3–4 dan masuk dalam kategori aman, yang menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut berada pada kondisi yang relatif baik dan mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat.



Meskipun demikian, SKPG 2025 masih mengidentifikasi adanya wilayah yang memerlukan kewaspadaan lebih lanjut. Terdapat 15 kalurahan dengan skor 5–6 yang dikategorikan sebagai waspada, yaitu Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang; Giripurwo Kapanewon Purwosari; Monggol dan Kepek Kapanewon Saptosari; Tepus dan Purwodadi Kapanewon Tepus; Banjarejo Kapanewon Tanjungsari; Botodayaan dan Pucanganom Kapanewon Rongkop; Mertelu dan Ngalang Kapanewon Gedangsari; Plombutan Kapanewon Playen; Natah Kapanewon Nglipar; serta Tancep Kapanewon Ngawen. Kalurahan-kalurahan tersebut memerlukan perhatian karena masih terdapat keterbatasan pada aspek akses dan pemanfaatan pangan, meskipun ketersediaan pangan secara umum masih mencukupi.

Selain kategori waspada, SKPG 2025 juga menetapkan 1 kalurahan dengan skor 7–9 yang masuk dalam kategori rawan, yaitu Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari. Kategori rawan diberikan apabila salah satu indikator memperoleh nilai tertinggi, yang menunjukkan adanya permasalahan serius pada aspek tertentu, terutama terkait akses pangan dan kondisi gizi masyarakat, sehingga memerlukan intervensi yang lebih intensif dan terarah.

Untuk melengkapi analisis tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menyusun Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2025, yang mengklasifikasikan desa/kalurahan ke dalam enam kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat keparahan dan penyebab kerentanan. Desa/kalurahan Prioritas 1, 2, dan 3 merupakan wilayah rentan pangan, sedangkan Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan tingkat ketahanan yang berbeda. Berikut peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.



Gambar 3. 30 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Hasil analisis FSVA 2025 dan peta ketahanan dan kerentanan pangan pada Gambar menunjukkan bahwa terdapat 17 kalurahan (12%) yang masuk dalam kategori rentan pangan Prioritas 3, sedangkan Prioritas 1 dan Prioritas 2 tidak ditemukan. Kalurahan Prioritas 3 tersebut meliputi Karangtengah Kapanewon Wonosari; Mulusan dan Giring Kapanewon Paliyan; Girisuko Kapanewon Panggang; Giripanggung dan Sumberwungu Kapanewon Tepus; Umbulrejo dan Sidorejo Kapanewon Ponjong; Pringombo, Botodayaan, Pucanganom, dan Melikan Kapanewon Rongkop; Tegalrejo Kapanewon Gedangsari; Songbanyu Kapanewon GiriSubo; Kemiri Kapanewon Tanjungsari; serta Giripurwo dan Giricahyo Kapanewon Purwosari. Wilayah-wilayah tersebut dikategorikan rentan pangan rendah karena masih memiliki keterbatasan pada indikator akses dan pemanfaatan pangan, meskipun belum masuk pada tingkat kerentanan tinggi.

Sementara itu, wilayah yang tergolong tahan pangan berdasarkan FSVA 2025 didominasi oleh Prioritas 4 sebanyak 90 kalurahan (63%), Prioritas 5 sebanyak 35 kalurahan, dan Prioritas 6 sebanyak 2 kalurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum ketahanan pangan Kabupaten Gunungkidul berada pada tingkat yang cukup baik, namun masih terdapat kantong-kantong kerentanan yang bersifat spasial dan spesifik wilayah.



Dengan demikian, integrasi hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan, analisis SKPG, dan pemetaan FSVA menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan daerah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk tidak hanya menjamin pangan yang aman dan bermutu, tetapi juga mengarahkan intervensi secara lebih tepat sasaran pada kalurahan waspada dan rawan pangan, guna menurunkan tingkat kerentanan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu faktor penghambat utama adalah belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan, yang berpengaruh terhadap keterjangkauan pangan oleh masyarakat. Meskipun ketersediaan pangan secara agregat telah mencukupi, jenis pangan yang tersedia masih kurang beragam dan sebagian besar bersifat musiman, sehingga belum sepenuhnya mendukung pola konsumsi yang berkelanjutan sepanjang tahun.

Selain itu, keterjangkauan pangan masih menjadi persoalan, terutama terkait dengan belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di tingkat daerah. Kondisi ini berdampak pada kemampuan daerah dalam mengantisipasi fluktuasi pasokan dan harga pangan, khususnya pada saat terjadi gangguan distribusi atau kondisi darurat. Di sisi lain, pola konsumsi masyarakat juga belum sepenuhnya mencerminkan penerapan pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), sehingga kualitas konsumsi pangan belum optimal.

Faktor penghambat lainnya adalah masih ditemukannya produk pangan yang belum memenuhi standar keamanan pangan, baik dari aspek penanganan maupun peredaran. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas pemanfaatan pangan. Dalam konteks tersebut, kerawanan pangan dipahami sebagai kondisi ketika masyarakat, wilayah, atau rumah tangga memiliki tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan, sehingga memerlukan penanganan yang terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai respon terhadap berbagai faktor penghambat tersebut, strategi yang dilakukan diarahkan pada penguatan ketahanan pangan berbasis



rumah tangga dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Salah satu upaya utama adalah pemberdayaan pemanfaatan pekarangan, yang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan bergizi secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, kampanye dan sosialisasi panganekaragaman pangan terus dilakukan untuk mendorong masyarakat agar tidak bergantung pada satu jenis pangan pokok.

Upaya lainnya dilakukan melalui sosialisasi khusus kepada penyedia jasa boga, terutama yang melayani konsumsi pada kegiatan rapat dan pertemuan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini bertujuan untuk mendorong penerapan menu yang lebih beragam, bergizi, dan aman, sehingga prinsip B2SA dapat diterapkan secara lebih luas, tidak hanya di tingkat rumah tangga tetapi juga pada konsumsi kolektif.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian sasaran. Salah satunya adalah tercapainya indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pola konsumsi pangan masyarakat. Capaian ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kualitas hidup.

Faktor pendukung lainnya adalah kampanye dan sosialisasi B2SA yang terus digalakkan, antara lain melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga sebagai sumber pangan dan gizi keluarga menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro.

Selain itu, aspek distribusi dan akses pangan terus diperkuat seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pemerataan ketersediaan pangan antarwilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi umbi-umbian juga menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun masih berada di bawah target ideal. Peningkatan ini merupakan langkah positif dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras dan terigu, serta mendukung panganekaragaman pangan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan daerah.



5. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD ini merupakan sasaran dan indikator kinerja pendukung pencapaian IKU. Evaluasi pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator sasaran Nilai AKIP PD adalah berdasarkan LHE AKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Tabel 3. 17 Ringkasan Capaian Indikator Akuntabilitas Kinerja PD Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Utama	Program Pendukung	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP DPP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	A (80,40)	A (81,54)	101,44	Sangat Tinggi

Seperti yang sudah dibahas di awal bab, berdasarkan surat Inspektorat Daerah nomor 700.1.2.7/Ev-LKJ/27 tanggal 26 Maret 2025 mengenai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, nilai AKIP yang diperoleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul sebesar A (81,54) seperti yang terlihat pada tabel 3.17. Capaian nilai AKIP terhadap target akhir Renstra sebesar 101,29% dengan interpretasi Dinas Pertanian dan Pangan menunjukkan predikat memuaskan yang ditandai dengan terdapat gambaran bahwa instansi/ pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ pengawas/ sub koordinator. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian pembobotan, sebagai berikut.

Tabel 3. 18 Hasil Evaluasi AKIP Internal Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,40
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,20
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,84
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,10
Nilai Hasil Evaluasi		100%	19,85



No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 pada kondisi pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal membutuhkan beberapa hal untuk ditindaklanjuti sesuai hasil rekomendasi dari Tim Evaluator. Untuk saran/ rekomendasi dan tindak lanjut dari Dinas Pertanian dan Pangan telah disampaikan pada tanggal 10 April 2025 Nomor B/700.1.2.1/90/2025 perihal Tindak lanjut LHE AKIP pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024, seperti yang tertera di tabel 3. 19 di bawah ini.

Tabel 3. 19 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	KONDISI	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA		
a	Dokumen Perencanaan Kinerja yang mencakup dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra, DPA, PK, IKU, SKP dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja telah disusun	---	NIHIL
2	PENGUKURAN KINERJA		
a	Pengukuran kinerja telah dilakukan namun hasil pengukuran kinerja belum seluruhnya menjadi dasar perubahan/penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja	Agar melakukan pengukuran kinerja secara tepat, sebagai alat untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Pengukuran kinerja telah disusun secara berkala, telah diverifikasi dan dipublikasikan. Tindak lanjut akan dilaksanakan pada pengukuran indikator kinerja secara lebih spesifik dan akan digunakan sebagai dasar pencapaian target kinerja
3	PELAPORAN KINERJA		



No	KONDISI	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja. Namun hal yang masih perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain:		
a	Laporan kinerja belum menyajikan seluruh informasi yang mendukung pencapaian kinerja	Agar menyajikan informasi dan data dukung yang lengkap pada pelaporan kinerja di masa yang akan datang	Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai standar dengan menyajikan informasi realisasi kinerja dengan target tahunan serta akan menyajikan seluruh informasi yang mendukung pencapaian kinerja
			Tindak lanjut akan dilaksanakan pada penyampaian informasi atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, didukung tabel-tabel yang lebih informatif



No	KONDISI	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
b	Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai	Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada lini pimpinan dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja dan negosiasi target kinerja yang akan diperjanjikan pada periode yang akan datang	Pendekatan terstruktur terhadap target kinerja yang akan diperjanjikan pada periode yang akan datang telah dilakukan. Tindak lanjut akan dilaksanakan pada pendekatan yang lebih konsisten melalui sosialisasi tujuan, dan brainstorming untuk kinerja yang lebih berkualitas
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
a	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang	----	NIHIL

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Keberhasilan capaian indikator program pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang berperan dalam memastikan dukungan administratif, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, perencanaan, serta tata kelola internal organisasi berjalan secara efektif. Program ini menjadi faktor kunci dalam



mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi sejumlah permasalahan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan kinerja. Salah satu permasalahan utama adalah berkurangnya jumlah pegawai atau personel akibat mutasi, alih tugas, dan pensiun, yang berdampak pada distribusi beban kerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas. Selain itu, ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga memerlukan penguatan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya pendukung.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui pemutakhiran basis data kepegawaian guna mendukung perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih akurat dan responsif. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur terus dilakukan melalui pelatihan di bidang kearsipan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan, sehingga diharapkan mampu memperkuat tata kelola internal dan menjaga keberlanjutan capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

B. Capaian Kinerja Lainnya Tahun 2025

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Dinas Pertanian dan Pangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul terus melakukan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Pelayanan dilaksanakan dengan mengedepankan kemudahan akses, kenyamanan, serta perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Pelaksanaan pelayanan publik tersebut sejalan dengan kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan. Melalui penerapan kebijakan tersebut, pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan diarahkan agar lebih inklusif, responsif, dan memperhatikan kebutuhan khusus masyarakat.



Penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pertanian dan Pangan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang, kondisi fisik, usia, maupun jenis kelamin. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan setiap pengguna layanan memperoleh pelayanan yang layak, manusiawi, dan tidak diskriminatif.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Pertanian dan Pangan menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penyediaan fasilitas tersebut diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, menjaga kenyamanan, serta menciptakan lingkungan pelayanan yang sehat dan ramah. Adapun fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

- a. Ruang laktasi yang disediakan bagi ibu menyusui dengan kondisi bersih, aman, dan nyaman serta dilengkapi sarana pendukung.
- b. Akses bangunan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, berupa jalur masuk yang mudah diakses dan jalur landai.
- c. Area halaman dan parkir yang memadai, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat serta memberikan ruang yang aman bagi pengunjung yang datang bersama anak.
- d. Penerapan area bebas rokok pada ruang pelayanan, dengan pengaturan lokasi khusus merokok di luar area pelayanan utama.
- e. Fasilitas sanitasi yang layak dan terjaga kebersihannya, sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan pengguna layanan.

Melalui penyediaan fasilitas pendukung tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan di sektor pertanian dan pangan. Integrasi



perspektif gender dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program mampu mengakomodasi perbedaan peran, kebutuhan, serta kondisi antara laki-laki dan perempuan sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan.

Berdasarkan hasil Analisis Gender (GAP) pada beberapa subkegiatan tahun 2025, masih ditemukan adanya kesenjangan gender, terutama pada aspek partisipasi dan akses terhadap kegiatan teknis pertanian dan pangan. Kesenjangan tersebut terlihat dari belum optimalnya keterlibatan petani perempuan dalam kegiatan perbenihan, penyuluhan pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, pembagian peran dalam rumah tangga, serta perencanaan kegiatan yang sebelumnya belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan gender secara spesifik.

Menindaklanjuti hasil GAP tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan telah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan dan penerapan *Gender Budget Statement* (GBS). Integrasi tersebut diwujudkan dengan mendorong keterlibatan petani perempuan dan kelompok sasaran lainnya dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis, serta melakukan penyesuaian metode dan waktu pelaksanaan kegiatan agar lebih mudah diakses dan inklusif.

Penerapan pengarusutamaan gender dilaksanakan secara terpadu pada beberapa subkegiatan, antara lain penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik (SDG) tanaman, pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian termasuk pengembangan petani milenial, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman. Melalui pendekatan tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada pencapaian output fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas keterlibatan dan pemerataan manfaat bagi kelompok sasaran.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan responsif gender tersebut diukur dengan hasil berupa meningkatnya partisipasi petani perempuan dalam kegiatan pertanian dan pangan, tersedianya data pilah peserta kegiatan



sebagai dasar pengukuran capaian dan perbaikan perencanaan, serta meningkatnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap pentingnya kesetaraan gender. Selain itu, pada kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan, peran perempuan dalam penerapan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) semakin diperkuat melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan, Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai keterlibatan laki-laki dan perempuan sebagai penerima manfaat, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan hasil analisis gender yang telah disusun dalam GAP dan GBS, serta untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut juga didukung dengan dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan responsif gender sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi perbaikan perencanaan kegiatan pada periode berikutnya. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan yang melibatkan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraannya.



Gambar 3. 31 Dokumentasi Pelibatan Perempuan dalam Kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



Gambar 3.30 menunjukkan adanya partisipasi aktif kaum perempuan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2025. Pada kegiatan pelatihan petani milenial, tercatat sedikitnya 216 orang peserta berusia 19–39 tahun yang terlibat, dengan sekitar 30 persen di antaranya merupakan kaum perempuan. Hal ini menunjukkan meningkatnya keterlibatan perempuan usia produktif dalam pengembangan sektor pertanian.

Partisipasi kaum perempuan juga terlihat dalam kegiatan operasional di UPT Balai Benih Pertanian, khususnya pada aktivitas penanaman dan penyiangan tanaman padi, yang banyak melibatkan tenaga kerja perempuan. Keterlibatan ini mencerminkan peran perempuan yang semakin signifikan dalam mendukung proses produksi pertanian, tidak hanya pada aspek pendukung, tetapi juga pada kegiatan teknis di lapangan.

Selain itu, pada kegiatan pengembangan Desa B2SA, keterlibatan perempuan berlangsung sangat optimal karena pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan TP PKK Desa sebagai mitra utama, yang anggotanya didominasi oleh kaum perempuan. Kondisi ini memperkuat peran perempuan dalam mendorong perubahan pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola konsumsi yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.

Partisipasi perempuan juga tampak pada kegiatan Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Jika sebelumnya kegiatan pengendalian OPT identik dengan peran kaum laki-laki, khususnya dalam penggunaan peralatan seperti *handsprayer* elektrik, kini kaum perempuan juga turut berperan aktif. Hal ini menunjukkan semakin terbukanya peran perempuan dalam berbagai aktivitas pertanian, baik pada aspek teknis maupun penguatan kelembagaan.

3. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2025 Dinas Pertanian dan Pangan mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:



- a. Juara II Kabupaten/Kota Terbaik se-Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Program Kartu Tani Tahun 2025 – Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, atas kinerja dan komitmen dalam optimalisasi pelaksanaan Program Kartu Tani serta peningkatan pelayanan kepada petani.
- b. Peringkat 5 pada Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 dengan predikat A (Memuaskan) dan nilai 82,06 (predikat A - Memuaskan).



C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA-SKPD Nomor DPPA/ A.6/ 3.27.2.09.0.00.01.0000/ 001/ 2025 Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul semula Rp25.951.701.308,90 dan mengalami perubahan menjadi Rp23.621.006.840,00 atau berkurang Rp2.330.03.504,90.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.317.110.000				
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	.296.240.000	2.075.453.513	90,38	20.786.487	9,62
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	59.630.000	359.328.130	99,92	301.870	0,08
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	350.700.000	350.408.296	99,92	291.704	0,08
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	4.280.000	4.273.880	99,86	6.120	0,14
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	4.650.000	4.645.954	99,91	4.046	0,09
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	89.340.000	3.339.935	1,76	186.000.065	98,24
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	189.340.000	3.339.935	1,76	186.000.065	98,24
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.747.270.000	1.712.785.448	98,03	34.484.552	1,97
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4.020.000	3.869.953	96,27	150.047	3,73
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.743.250.000	1.708.915.495	98,03	34.334.505	1,97
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.250.000	1.249.970	100,00	30	0,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.250.000	1.249.970	100,00	30	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1.250.000	1.249.970	100,00	30	0,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	19.620.000	19.612.175	99,96	7.825	0,04
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	19.620.000	19.612.175	99,96	7.825	0,04
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8.420.000	8.419.925	100,00	75	0,00
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan	11.200.000	11.192.250	99,93	7.750	0,07



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					#DIV/0!
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.638.027.854	10.788.407.076	92,70	849.620.778	7,30
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.025.300	92.329.615	99,25	695.685	0,75
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.070.300	77.374.855	99,11	695.445	0,89
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	999.975	100,00	25	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.498.000	1.497.975	100,00	25	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.249.000	1.248.975	100,00	25	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	748.000	747.975	100,00	25	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.900.000	7.899.960	100,00	40	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.560.000	2.559.900	100,00	100	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.307.319.034	8.638.870.276	92,82	668.448.758	7,18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.239.635.034	8.573.437.373	92,79	666.197.661	7,21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.599.000	3.598.731	99,99	269	0,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	64.085.000	61.834.172	96,49	2.250.828	3,51
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.744.700	165.024.450	86,97	24.720.250	13,03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	67.469.700	63.144.450	93,59	4.325.250	6,41
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	122.275.000	101.880.000	83,32	20.395.000	16,68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.681.500	74.520.408	89,05	9.161.092	10,95
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.952.500	3.924.405	99,29	28.095	0,71
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.910.000	21.908.819	99,99	1.181	0,01
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.326.000	2.326.000	100,00	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.050.000	5.050.000	100,00	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	100,00	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.900.000	3.897.204	99,93	2.796	0,07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.343.000	36.213.980	79,87	9.129.020	20,13
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.185.500	151.404.679	99,49	780.821	0,51
Pengadaan Mebel	88.802.000	88.225.908	99,35	576.092	0,65
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.383.500	63.178.771	99,68	204.729	0,32
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.139.458.848	997.867.993	87,57	141.590.855	12,43
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.690.200	99,42	9.800	0,58
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.137.158.848	995.577.793	87,55	141.581.055	12,45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000	600.000	100,00	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.612.972	668.389.655	99,37	4.223.317	0,63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.300.000	238.240.057	99,97	59.943	0,03
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	5.500.000	100,00	-	-



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	422.812.972	418.649.598	99,02	4.163.374	0,98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	100,00	-	-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.229.102.250	1.214.538.971	98,82	14.563.279	1,18
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	813.860.000	803.199.357	98,69	10.660.643	1,31
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	180.750.000	178.391.027	98,69	2.358.973	1,31
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	633.110.000	624.808.330	98,69	8.301.670	1,31
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	415.242.250	411.339.614	99,06	3.902.636	0,94
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	415.242.250	411.339.614	99,06	3.902.636	0,94
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.955.175.700	1.932.968.097	98,86	22.207.603	1,14
Pengembangan Prasarana Pertanian	663.951.700	644.449.906	97,06	19.501.794	2,94
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	540.391.700	522.099.774	96,62	18.291.926	3,38
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	123.560.000	122.350.132	99,02	1.209.868	0,98
Pembangunan Prasarana Pertanian	1.291.224.000	1.288.518.191	99,79	2.705.809	0,21
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.291.224.000	1.288.518.191	99,79	2.705.809	0,21
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	128.370.000	127.649.860	99,44	720.140	0,56
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	128.370.000	127.649.860	99,44	720.140	0,56
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	128.370.000	127.649.860	99,44	720.140	0,56
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	6.353.221.000	6.143.213.046	96,69	210.007.954	3,31
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	6.353.221.000	6.143.213.046	96,69	210.007.954	3,31
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2.861.771.000	2.730.032.685	95,40	131.738.315	4,60
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.747.780.000	2.676.819.240	97,42	70.960.760	2,58
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	743.670.000	736.361.121	99,02	7.308.879	0,98
	23.621.006.804	22.303.092.708	94,42	1.317.914.096	5,58

Sumber Data: Laporan Pengendalian Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3. 21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi
1	Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan Meningkatkan	1.347.371,93	1.699.531,66	103,19	9.665.868.950	9.418.369.974	97,44	2,56
2	Ketahanan Pangan Meningkatkan	90,10	98,40	109,21	2.317.110.000	2.096.315.658	90,47	9,53
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A (80,40)	A (81,54)	101,44	11.638.027.854	10.788.407.076	92,70	7,30
Jumlah Belanja Total					23.621.006.804	22.303.092.708	94,42	5,58
Jumlah Belanja Program Utama					11.982.978.950	11.514.685.632	96,09	3,91
Jumlah Belanja Program Penunjang					11.638.027.854	10.788.407.076	92,70	7,30

Berdasarkan tabel 3.21 di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp23.621.006.804,00 terealisasi Rp22.303.093.708,00 atau 94,42% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp1.317.914.096,00 atau 5,58% yang bersumber dari sisa pengadaan barang dan jasa, efisiensi belanja perjalanan dinas, belanja penyediaan gaji dan tunjangan ASN, cadangan pangan yang tidak terealisasi karena adanya perbedaan HET dan faktor penyimpanan.

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pelaksanaan pasar tani. merupakan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan akses petani secara langsung dengan konsumen dan pasar, membangun jaringan pemasaran dan menyediakan sarana pemasaran sebagai ajang promosi, penumbuhan rasa cinta terhadap produk lokal.



BAB IV berisi:

- A. *Kesimpulan*
- B. *Langkah Perbaikan Kinerja*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan dalam menjalani ketugasannya masih terdapat permasalahan yang perlu dihadapi antara lain, sebagai berikut.

1. Urusan Pertanian
 - a. Sebagian produk pertanian mengalami kesulitan pemasaran akibat kurangnya jejaring pemasaran
 - b. Dampak pemanasan global yang memicu perubahan iklim.
 - c. Regenerasi petani masih sulit dilakukan.
 - d. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum
2. Urusan Pangan
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Gunungkidul telah menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul saat ini sudah baik. Akan tetapi terdapat jenis pangan yang nilai konsumsinya melebihi nilai standar yaitu padi-padian dan sayur dan buah. Terdapat juga jenis pangan yang nilai konsumsinya dibawah nilai standar yaitu pangan hewani.
 - b. Pelaksanaan perizinan berusaha melalui aplikasi terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS) sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membutuhkan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan penjamin mutu, dan ketersediaan sarana prasana yang memadai. Saat ini baru 10 pelaku usaha yang mengajukan PSAT.



B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Urusan Pertanian

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para petani dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
- b. Membina dan sosialisasi ke komunikasi petani milenial.
- c. Terbitnya SK Bupati Gunungkidul Nomor 132/KPTS/2025 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 untuk peningkatan produksi pertanian dan pengalokasian yang cukup sesuai kebutuhan.

2. Urusan Pangan

- a. Meningkatkan promosi dan kampanye sumber pangan karbohidrat pangan lokal non beras sebagai sumber pangan alternatif serta edukasi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan menggunakan berbagai media, terutama media sosial yang banyak dan mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Sosialisasi perizinan berbasis OSS di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Rencana tindak lanjut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul ke depannya yaitu:

1. Urusan Pertanian

- a. Memperbanyak sosialisasi dan pelatihan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim bagi petani.
- b. Menyelenggarakan berbagai pelatihan usaha tani dan manajerial pertanian terutama untuk komoditas-komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi
- c. Sosialisasi Perda dan Perbup yang baru serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pihak terkait dalam rangka implementasi peraturan-peraturan tersebut.

2. Urusan Pangan

- a. Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan promosi B2SA melalui berbagai media.



- b. Penyiapan SDM yang kompeten untuk menangani OSS dan menempatkan personil tersebut secara permanen sebagai bagian pelaksana perizinan, dan melengkapi sarana prasarana penunjang layanan OSS agar dapat memenuhi tuntutan kecepatan dan ketepatan layanan.

Sebagai catatan, untuk periode selanjutnya, mulai tahun 2026 terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilebur dengan Dinas Pertanian dan Pangan menjadi Dinas Pertanian dan Pangan. Perubahan kelembagaan ini menjadi landasan pelaksanaan urusan pertanian dan subsektor terkait pada tahun-tahun berikutnya, tanpa memengaruhi pelaporan kinerja tahun 2025.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭꦤꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539
Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 28 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.7 /Ev. LKJIP /010
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2023

Yth. Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 08/Ev-ITDA/LKJIP/2024 tanggal 1 Maret 2024 kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 6 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga

Predikat	Interpretasi
	masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Kondisi

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik.
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- Tidak terdapat catatan Hasil Evaluasi.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, namun belum dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) SOP Pengumpulan Data Kinerja perlu direvisi.
- 3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 4) Belum semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi standar.
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan. namun belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu:

- a. Perencanaan Kinerja
 - Tidak terdapat rekomendasi.
- b. Pengukuran Kinerja
 - 1) Melakukan review SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
 - 2) Pengukuran kinerja agar dipergunakan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan untuk mencapai kinerja.
 - 3) Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja
 - 1) Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai.
 - 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, memperoleh nilai sebesar 81,33 (delapan puluh satu koma tiga tiga) dengan kategori A (memuaskan), dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	25,37
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,33
3	Pelaporan Kinerja	15 %	12,79
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	19,85
Jumlah		100 %	81,33

Poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

3. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, mohon menjadikan periksa.

INSPEKTUR



SAPTOYO, S.SOS, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wahana Pembangunan Berkelanjutan

Jalan Taman Bhakti 2, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391317; Faksimile (0274) 391317

Laman www.pertanian.gunungkidulkab.go.id; Posel pertanian@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 10 April 2025

Nomor : B/700.1.2.1/90/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Tindak Lanjut LHE AKIP Pada
Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

di

Wonosari

Dalam rangka menindaklanjuti surat Inspektur Daerah Nomor 700.1.2.7/Ev.LKJ/27 tanggal 26 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka dengan ini kami kirimkan tindak lanjut dari surat tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian dan
Pangan,



Rismiyadi, SP.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197410121999031008

Lampiran Surat

Nomor : B/700.1.2.1/90/2025

Tanggal : 10 April 2025

No	KONDISI	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA		
a	Dokumen Perencanaan Kinerja yang mencakup dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra, DPA, PK, IKU SKP dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja telah di susun	-----	NIHIL
2	PENGUKURAN KINERJA		
a	Pengukuran kinerja telah dilakukan namun hasil pengukuran kinerja belum seluruhnya menjadi dasar perubahan/ penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja	Agar melakukan pengukuran kinerja secara tepat, sebagai alat untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.	Pengukuran kinerja telah disusun secara berkala, telah diverifikasi dan dipublikasikan. Tindak lanjut akan dilaksanakan pada pengukuran indikator kinerja secara lebih spesifik dan akan digunakan sebagai dasar pencapaian target kinerja
3	PELAPORAN KINERJA		
	Telah Menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja. Namun hal yang masih perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain:		
a	Laporan kinerja belum menyajikan seluruh informasi yang mendukung pencapaian kinerja	Agar menyajikan informasi dan data dukung yang lengkap pada pelaporan kinerja dimasa yang akan datang	Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai standar dengan menyajikan informasi realisasi kinerja dengan target tahunan serta akan menyajikan seluruh informasi yang mendukung pencapaian kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	KONDISI	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			Tindak lanjut akan dilaksanakan pada penyampaian informasi atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya, efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, didukung tabel-tabel yang lebih informatif
b	Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai	Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada lini pimpinan dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja dan negosiasi target kinerja yang akan diperjanjikan pada periode yang akan datang	Pendekatan terstruktur terhadap target kinerja yang akan diperjanjikan pada periode yang akan datang telah dilakukan. Tindak lanjut akan dilaksanakan pada pendekatan yang lebih konsisten melalui sosialisasi tujuan, dan brainstorming untuk kinerja yang lebih berkualitas
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
a	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang	-----	NIHIL

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,



Rismiyadi, SP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197410121999031008



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 7 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.7 / TL - AKIP / 120
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP
Internal Tahun 2024 pada Dinas
Pertanian dan Pangan Kabupaten
Gunungkidul

Yth. Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/ITDA-Monev/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 kami telah melaksanakan monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juni 2025 pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran Surat Inspektur Daerah
 Nomor: 700.1.2.7/TL-AKIP/120
 Tanggal: 7 Juli 2025

HASIL MONITORING ATAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL TAHUN 2024
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
PERENCANAAN KINERJA					
1.	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-	-	-
PENGUKURAN KINERJA					
2.	Hasil pengukuran kinerja belum seluruhnya menjadi dasar perubahan/penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja	Agar melakukan pengukuran kinerja secara tepat, sebagai alat untuk penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Surat Kesanggupan Perangkat Daerah untuk hasil kinerja sebagai dasar perubahan/ penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja	Surat Kesanggupan Perangkat Daerah Nomor B/000.8/1216/2025 tentang kesanggupan menggunakan hasil kinerja sebagai dasar perubahan/ penyesuaian aktivitas dalam pencapaian target kinerja	Tindak lanjut dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi
PELAPORAN KINERJA					
3.	1. Laporan kinerja belum menyajikan seluruh informasi yang	1. Agar menyajikan informasi dan data dukung yang lengkap pada Pelaporan	1. Surat Kesanggupan Perangkat Daerah	1. Surat Kesanggupan Kepala Daerah	Tindak lanjut dalam proses penyelesaian

		kinerja dimasa yang akan datang; dan	untuk menyajikan informasi dan data pendukung yang lengkap pada Pelaporan kinerja dimasa yang akan datang; dan	Nomor B/000.8/1214/2025 tentang kesanggupan untuk menyajikan informasi dan data pendukung yang lengkap pada Pelaporan kinerja dimasa yang akan datang;	sesuai rekomendasi
mendukung pencapaian kinerja; 2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.	2. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada lini pimpinan dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja dan negosiasi target kinerja yang akan diperjanjikan pada periode yang akan datang.	2. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada lini pimpinan dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja dan negosiasi target kinerja yang akan diperjanjikan pada periode yang akan datang.	2. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Perangkat Daerah untuk menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada lini pimpinan dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja dan negosiasi target kinerja yang akan diperjanjikan pada periode yang akan datang.	Nomor B/000.8/1215/2025 tentang kesanggupan untuk menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada lini pimpinan dan mendorong penerapan dialog kinerja terutama pada proses analisis ketercapaian kinerja dan negosiasi target kinerja yang akan diperjanjikan pada periode yang akan datang.	

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
4.	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wijaya Bhakti

Jalan Taman Bhakti 2, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391317; Faksimile (0274) 391317

Laman www.pertanian.gunungkidulkab.go.id; Posel pertanian@gunungkidulkab.go.id

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
DALAM PENYAJIAN INFORMASI DAN DATA DUKUNG YANG LENGKAP
PADA PELAPORAN KINERJA**

Nomor : 15/000.8 / 1214 / 2015

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismiyadi, SP., M.Si

NIP : 197410121999031008

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini menyatakan sanggup dan berkomitmen untuk:

1. Menyajikan informasi dan data dukung yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul di masa yang akan datang;
2. Menindaklanjuti temuan dan catatan hasil pelaporan kinerja yang menunjukkan bahwa pengukuran kinerja sebelumnya belum sepenuhnya didukung oleh informasi dan data yang memadai;
3. Melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam proses pelaporan kinerja, dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas dan capaian kinerja didukung oleh bukti yang lengkap, sesuai standar sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
4. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan internal untuk menjamin ketersediaan dan konsistensi data dukung pada setiap tahapan pelaporan kinerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Wonosari, 30 Juni 2015

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,



Rismiyadi, SP., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 197410121999031008



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wisekama Wisakama Wisakama Wisakama

Jalan Taman Bhakti 2, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391317; Faksimile (0274) 391317
Laman www.pertanian.gunungkidulkab.go.id; Posel pertanian@gunungkidulkab.go.id

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
DALAM PENGUATAN INTERNALISASI KINERJA DAN PENERAPAN DIALOG KINERJA PADA
PROSES PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA**

Nomor : 13/000.8/1215/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismiyadi, SP., M.Si
NIP : 197410121999031008
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini menyatakan sanggup dan berkomitmen untuk:

1. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja di seluruh lini pimpinan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, sehingga setiap pimpinan unit kerja memahami, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah;
2. Mendorong penerapan dialog kinerja secara aktif dan berkelanjutan, khususnya pada:
 - o Proses analisis ketercapaian kinerja, guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung kinerja;
 - o Proses negosiasi target kinerja yang akan diperjanjikan pada periode mendatang, agar lebih realistis, terukur, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah;
3. Menjadikan dialog kinerja sebagai bagian dari budaya kerja organisasi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja berkelanjutan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara rutin untuk memastikan efektivitas implementasi dialog kinerja dan pemahaman terhadap target kinerja di setiap unit kerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penyelenggaraan sistem manajemen kinerja yang efektif dan berorientasi hasil.

Wonosari, 30 Juni 2025
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,

Rismiyadi, SP., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 197410121999031008



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wibawa Negeri, Keadilan, Kesejahteraan

Jalan Taman Bhakti 2, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391317; Faksimile (0274) 391317
Laman www.pertanian.gunungkidulkab.go.id; Posel pertanian@gunungkidulkab.go.id

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGUNAAN HASIL PENGUKURAN KINERJA SEBAGAI DASAR PENYESUAIAN
AKTIVITAS DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

Nomor : B/STB.8 /1216 /2015

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismiyadi, SP., M.Si

NIP : 197410121999031008

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini menyatakan sanggup untuk:

1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perubahan atau penyesuaian aktivitas dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;
2. Menindaklanjuti temuan dan catatan hasil pengukuran kinerja yang menunjukkan bahwa pengukuran kinerja belum seluruhnya menjadi dasar dalam perubahan/penyesuaian aktivitas untuk mencapai target kinerja;
3. Melakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan manajemen kinerja yang berbasis pada data hasil pengukuran kinerja agar seluruh program dan kegiatan lebih terarah dan terukur;
4. Melaporkan tindak lanjut tersebut secara periodik dan bertanggung jawab sesuai mekanisme evaluasi kinerja yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk komitmen dan kesanggupan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Wonosari, 30 Juni 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,



Rismiyadi, SP., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 197410121999031008

Wonosari, 5 Januari
 Pihal Kesatu,



PRISMIYADI, SP., M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Pembangunan pertanian yang optimal	Nilai PDRB sub kategori pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan hortikultura	juta rupiah	2.148.400,03

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat	Produksi Tanaman Pangan	ton	1.612.849,00
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	ton	37.400,00
2	Ketahanan Pangan meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	91,80
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP DPP	nilai	A (80,40)

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 2.169.470.000,00	DAU, DAK NF
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 4.920.000,00	DAU
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 19.620.000,00	DAU
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.321.527.250,00	DAU
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 3.867.378.600,00	DAU, DAK F
6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 128.170.000,00	DBH-CHT DAU
7	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 6.743.369.500,00	DAU, DAK F
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.697.254.958,00	DAK NF DAU
		25.951.710.308,00	



5 Januari 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

ꦧꦶꦏꦸꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦥꦠꦤꦶꦢꦤꦥꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391317; Faksimile (0274) 391317
Laman www.pertanian.gunungkidulkab.go.id; Posel pertanian@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISMIYADI, SP., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari
Pihak Kesatu,

RISMIYADI, SP., M.Si

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Pembangunan pertanian yang optimal	Nilai PDRB sub kategori pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan hortikultura	juta rupiah	2.148.400,03

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat	Produksi Tanaman Pangan	ton	1.612.849,00
		Produksi Perkebunan dan Hortikultura	ton	37.400,00
2	Ketahanan Pangan meningkat	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	91,8
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP DPP	nilai	A (81,40)

Program		Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 2.296.240.000,00	DAU, DAK NF
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 1.250.000,00	DAU
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 19.620.000,00	DAU
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.229.102.250,00	DAU
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1.955.175.700,00	DAU, DAK F
6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 128.370.000,00	DBH-CHT DAU
7	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 6.353.221.000,00	DAU, DAK F
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.638.027.854,00	DAK NF DAU
		23.621.006.804,00	


Pihak Kedua
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH


Pihak Kesatu
Wonosari
RISMIYADI, SP. M.Si